



**komisi
pemilihan
umum**
Sulawesi Utara

SOSIALISASI

PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020 DI SULAWESI UTARA

*Potret SOSIALISASI Pemilihan Tahun 2020
di Tengah Pandemi Covid-19*

Idhli R. Firtri Rahmadani, Otniel Wawo, Zulkify Kadengkang, Andri L.J. Sumolang, Stenly Kowaas,
Darul Halim, Azwar Hamid, Arther Tamaka, Rita Darondo, Hasrul Dumambow, Terry Suoth,
Iklam Patonaung, Muhammad Yusran.

jdih.kpu.go.id

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



komisi
pemilihan
umu
Sulawesi Utara

SOSIALISASI

PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020 DI SULAWESI UTARA

*Potret SOSIALISASI Pemilihan Tahun 2020
di Tengah Pandemi Covid-19*

SOSIALISASI

PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020 DI SULAWESI UTARA

Potret SOSIALISASI Pemilihan Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19

Pengarah :

Ardiles M.R. Mewoh, Yessy Y. Momongan, Lanny A. Ointu
Salman Saelangi, Meidy Y. Tinangon, Pujiastuti.

Penulis :

Idhli R. Firtri Rahmadani, Otniel Wawo, Zulkifly Kadengkang,
Andri L.J. Sumolang, Stenly Kowaas, Darul Halim, Azwar Hamid,
Arther Tamaka, Rita Darondo, Hasrul Dumambow, Terry Suoth,
Iklam Patonaung, Muhammad Yusran.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

SOSIALISASI

PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020 DI SULAWESI UTARA

Potret SOSIALISASI Pemilihan Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19

Editor :

Salman Saelangi
Ibnu Mirwan Dali
Stenly Kowaas
Rita Darondo
Eskolano Kakunsi

Desain Sampul dan Isi :

Arvic S dan Endra ° P

Ukuran :

17,6 X 25 cm

ISBN :

978-623-6183-29-8

Cetakan :

2021

Copyright © 2021 by
KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT

KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Timur,
Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112

Website: www.sulut.kpu.go.id

Sambutan

Sosialisasi pada prinsipnya adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan kepada segenap stake holder terkait dan masyarakat. Selain sosialisasi, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota beserta jajarannya juga melaksanakan pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang hak dan kewajibannya, serta untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan. Keberhasilan KPU Provinsi Sulawesi Utara menjadi daerah dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi di Indonesia pada Pemilihan Serentak 2020, yang diselenggarakan di tengah-tengah pandemi Covid-19, merupakan bukti nyata dari kuatnya komitmen serta implementasi program dan strategi sosialisasi di semua tahapan berjalan efektif dan terukur. Untuk itu, saya memberi apresiasi kepada segenap tim sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Sulut yang sudah menjalankan tugasnya dengan capaian kualitas dan kuantitas partisipasi yang mengagumkan. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap masyarakat Provinsi Sulawesi Utara atas kontribusi pemikiran dan partisipasinya aktifnya dalam menyukseskan Pemilihan Serentak 2020. Munculnya asumsi yang menyatakan bahwa tingginya level kontestasi antar peserta Pemilihan mendorong animo masyarakat untuk datang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam menyalurkan hak pilihnya barangkali ada benarnya. Namun demikian, satu hal yang tidak bisa



dipungkiri bahwa capaian luar biasa terkait tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Serentak 2020, lahir karena KPU Provinsi dan jajaran sampai di tingkat desa/kelurahan berhasil memompa minat masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahapan. Kehadiran pemilih di TPS pada 9 Desember hanyalah titik kulminasi yang muncul karena grand design strategi sosialisasi yang dilaksanakan tepat sasaran serta mendapat respon positif dari masyarakat, khususnya para pemilih.

Berangkat dari success story di atas, menjadi penting bagi KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengabadikan pola, metode dan strategi sosialisasi selama pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 dalam sebuah buku. Kiranya tidak pula berlebihan jika saya menyatakan bahwa buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi terpercaya bagi semua pihak yang membutuhkannya, termasuk bagi KPU dan jajarannya dalam mendesign konsep dan strategi sosialisasi pada Pemilu dan Pemilihan serentak pada masa yang akan datang.

Sekali lagi saya menyambut dengan bangga kehadiran buku ini karena selain memuat hal-hal penting terkait sosialisasi Pemilihan Serentak 2020 di Provinsi Sulawesi Utara, juga dikarenakan kombinasi naskahnya berisi cerita-cerita unik dan menarik, lengkap dengan kearifan lokal dan suka duka di lapangan. KPU Provinsi Sulut, semua penulis dan editor yang terlibat dalam pembuatan buku ini juga pantas mendapatkan apresiasi, karena sudah berjerih-lelah menyajikan potret dan best practice sosialisasi di tengah Pandemi Covid-19.

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

Anggota KPU

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat

Kata Pengantar



Menggelar Pemilihan Serentak 2020 di tengah Pandemi Covid-19 benar-benar jadi tantangan terbesar buat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya. Tidak hanya karena semua tahapan harus dilakukan dalam koridor protokol pencegahan Covid-19, tapi yang paling penting adalah bagaimana men-delivery pesan kepada masyarakat agar mereka hadir memberikan suara

di Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena nilai-nilai luhur yang terkandung dari demokrasi partisipatif.

Bagaimana men-delivery pesan seperti dimaksud di atas? Inilah tantangan sesungguhnya buat jajaran KPU di daerah. Bagaimanapun juga, Pandemi Covid-19 mendorong penyelenggara untuk mengemas metode, pola dan strategi sosialisasi dengan pendekatan yang bersenyawa dengan situasi di lapangan. Jika tidak, pesan sosialisasi yang diharapkan sampai di masyarakat tidak akan memberikan feed back yang signifikan.

Tidak diragukan lagi, sosialisasi digital menjadi pilihan paling empuk dalam memaksimalkan tahapan sosialisasi. Aplikasi-aplikasi sosial media seperti facebook, instagram, youtube dan twitter adalah platform yang powerfull dampaknya. Tentu saja syaratnya content yang dikemas harus memiliki daya pikat yang kuat. Makanya kreativitas penyelenggara harus sangat kuat.

Meski begitu bukan berarti pola sosialisasi konvensional dilenyapkan 100 persen. Bagi segmen-segmen masyarakat tertentu, pola klasik ini masih ampuh. Ketika KPU Provinsi membuat sosialisasi serentak di ribuan desa/kelurahan se-Sulut beberapa hari sebelum hari-H pemilihan, dampaknya begitu terasa. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan pimpinan Parpol tingkat desa/kelurahan yang diundang

tak sungkan memberi apresiasi kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), karena sudah memberikan penjelasan detail dan konkrit soal aspek-aspek teknis beserta protokol pencegahan Covid-19 di TPS.

Dinamika dan suka duka KPU Provinsi dan jajaran sampai di tingkat PPS dalam proses sosialisasi tahapan Pilkada tentu saja sangat layak untuk diabadikan dalam sebuah buku. Dikemas dengan konsep bunga rampai, buku ini menyajikan rupa-rupa pola, metode dan strategi sosialisasi yang progresif dan inovatif dari KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.

Selain itu, buku ini juga merekam sejumlah potret sosialisasi yang unik lengkap dengan ke-khasan pemilih di sejumlah wilayah tertentu di Sulawesi Utara, yang diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata buat pengembangan literasi kepemiluan di Indonesia, khususnya di Bumi Nyiur Melambai. Semoga buku ini juga bisa memperkaya spektrum sosialisasi dalam lanskap demokrasi secara luas, sekaligus menjadi sumbangsi akademik buat semua pihak yang ada dalam ekosistem kepemiluan.

Dan terakhir, seandainya best practice yang ada dalam buku ini bisa jadi pijakan pengambilan keputusan penyelenggara dan pemilih, demi kemajuan pemilu dan Pilkada jilid selanjutnya, tidak diragukan lagi semua pihak yang mengambil bagian dalam penulisan buku akan merasa sangat bahagia.

Salam Demokrasi.

Salman Saelangi

Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara
Divisi SDM, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat

Daftar Isi

Sambutan	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x

BAB 1

POTRET SOSIALISASI PADA PEMILIHAN TAHUN 2020

Sosialisasi Pemilihan Langsung Kota Bitung Dimasa Pandemi Covid-19	2
Potret Sosialisasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara	17
Efek Samping Sosialisasi	22
Potret Sosialisasi Dari Tanah Porodisa	29

BAB 2

METODE SOSIALISASI

Transformasi Sosialisasi	37
Tantangan Relawan Demokrasi Dimasa Masa Pandemi Covid-19	57
Upaya Daulat Rakyat Berbuah Salam Yang Tak Terjawab	67
Potret Sosialisasi di Bumi Karangetang Mandolokang Kolo-Kolo	79
Sosialisasi Pemilihan Serentak dan Pandemi Covid-19	99

BAB 3

KEUNIKAN SOSIALISASI LOKAL

Dari Goyo untuk Pemilih Berdaulat	116
Dari Ruhnya Lolak Hingga Kesunyian Pomoman	124
Dari Kokapoy Memotret Sosialisasi Pemilu Di Boltim	145
Menakar Arus Sosialisasi Pemilu / Pilkada Di Daerah Nusa Utara	150

BAB 4

JEJAK RELAWAN DEMOKRASI

Relawan Demokrasi Pada Pilkada 2020 Ditengah Pandemi Covid-19	173
Bunga Rampai Relawan Demokrasi” Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Talaud	184
Menguak Tantangan di Balik Keberhasilan Sosialisasi: Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	192



Bab 1

Potret Sosialisasi Pada Pemilihan Tahun 2020



SOSIALISASI PEMILIHAN LANGSUNG KOTA BITUNG DIMASA PANDEMI COVID-19

Oleh : Idhli Fithriah

Pemilihan Serentak yang dijadwalkan 9 Desember 2020 sudah terlaksana, dan terbilang sukses. Agenda nasional ini dilaksanakan di 270 daerah, dengan rincian: 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 kota. Dasar pelaksanaan pesta demokrasi ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Di tengah tahapan Pemilihan Serentak sementara berjalan, dunia dihebohkan dengan terjadinya wabah Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Imbasnya, langkah-langkah strategis-pun langsung ditempuh, termasuk penundaan tahapan pelaksanaan pesta demokrasi.



Melihat grafik wabah bencana non alam Pandemi Covid-19 yang tak kunjung melandai, pemerintah akhirnya menerbitkan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi UU; PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, serta PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Sosialisasi merupakan salah satu tahapan dalam Pilkada yang teramat penting. Bukan apa-apa, lewat tahapan inilah, segala regulasi terkait dengan kepilkadaan di masa Pandemi Covid-19, dapat disampaikan dan tersampaikan kepada khalayak ramai. Tentunya dengan tetap mengacu pada Juknis KPU Sulut Nomor 221/PP.06.2-Kpt/7106/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020.

Pemilihan Serentak Tahun 2020, sesuai dengan rencana kerja KPU Kota Bitung, yang terintegrasi dengan rencana strategis yang ditetapkan KPU Republik Indonesia, menargetkan untuk capaian tingkat partisipasi masyarakat sebesar 77.5 persen dari jumlah DPT. Untuk mencapai angka presentase tersebut tidaklah mudah, mengingkat Pemilihan Serentak kali ini dilaksanakan ditengah



Pandemi Covid-19 sedang bergeliat. Namun, bagi KPU Bitung, Pandemi bukanlah alasan untuk menciptakan Pemilihan Serentak yang berkualitas. Justru sebaliknya, Pandemi Covid-19 menjadi spirit, untuk menciptakan Pemilihan Serentak Kota Bitung sebagai barometer pesta rakyat yang benar-benar mengacu pada regulasi, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Sosialisasi kepada Pemilih Pemula/Pemilih Muda yang biasanya dilakukan di sekolah-sekolah, universitas/kampus, dan pusat pendidikan lainnya, menjadi salah satu bentuk kegiatan tidak bisa dilaksanakan, karena tempat-tempat tersebut diliburkan. Imbasnya, KPU Kota Bitung harus menyusun strategi baru dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan. Metode yang ditempuh adalah dengan pertemuan langsung, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan (jaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan/memakai *handsanitizer*) yang sangat ketat. Cara lain yang ditempuh adalah sosialisasi *via* media cetak dan elektronik, menyebarkan X-Banner di tempat umum, brosur, pamflet, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, media sosial (medsos) berupa *Facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp*, juga dijadikan media untuk melakukan sosialisasi.

Merujuk Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bagi bakal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang menggunakan jalur perseorangan harus mengumpulkan dukungan minimal 10 persen, jika DPT mencapai 2 juta jiwa; 8,5 persen untuk DPT antara 2-6 juta jiwa; 7,5 persen untuk DPT mencapai 6 juta-12 juta jiwa; 6,5 persen untuk DPT diatas 12 juta jiwa.



Sedangkan untuk bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota yaitu 10 persen, untuk jumlah DPT sampai dengan 250 ribu jiwa; 8,5 persen untuk jumlah DPT antara 250-500 ribu jiwa; 7,5 persen untuk jumlah DPT antara 500-1 juta jiwa; dan 6,5 persen untuk jumlah DPT diatas 1 juta jiwa. Para bakal pasangan calon perseorangan secara administratif diharuskan mengisi formulir B1-KWK (dengan dilampiri foto copy KTP-elektronik/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kelurahan/Desa).

A. Syarat Minimal Dukungan dan Sebaran Calon Perseorangan

Sebagai bentuk pengejawantahan dari regulasi tersebut, KPU Kota Bitung pada November 2019, melaksanakan Sosialisasi terkait Syarat Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, kepada pemerintah Kota Bitung lebih khususnya para Camat Se-Kota Bitung dengan jadwal sebagai berikut :

Table 1

Jadwal Sosialisasi Syarat Minimal Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Kota Bitung Tahun 2020

No.	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Tempat Kegiatan	Peserta	Narasumber
1	Senin, 11 November 2019	Hotel Phoenix Bitung	Forkopimda Ketua dan LO Parpol Bawaslu Kota Bitung Camat Maesa Camat Aertembaga Lurah se Kec. Aertembaga	Ketua dan Anggota KPU Provinsi



			Lurah se Kec. Maesa Panwascam Maesa Panwascam Aertembaga Wartawan/Pers	
2	Rabu, 20 November 2019	Aula Kantor Camat Ranowulu	Camat Ranowulu Camat Matuari Lurah se Kec. Ranowulu Lurah se Kec. Matuari Masyarakat	Anggota KPU Kota Bitung dan Bawaslu Kota Bitung
3	Kamis, 21 November 2019	Aula Kantor Camat Madidir	Camat Madidir Camat Girian Lurah se Kec. Madidir Lurah se Kec. Girian Masyarakat	Anggota KPU Kota Bitung dan Bawaslu Kota Bitung
4	Jumat, 22 November 2019	Aula Kantor Camat Lembeh Selatan	Camat Lembeh Selatan Camat Lembeh Utara Lurah se Kec. Lembeh Selatan Lurah se Kec. Lembeh Utara	Anggota KPU Kota Bitung dan Bawaslu Kota Bitung

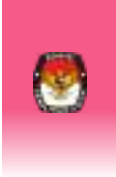




Foto Pemasangan X-Banner di tempat umum, dan area yang gampang dilihat



Foto Sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Bitung kepada masyarakat,
terkait pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020



B. Launching Tahapan Pemilihan Serentak Kota Bitung Tahun 2020

Dalam upaya menggaungkan ajang pesta demokrasi di kota Cakalang, KPU Bitung menggelar Launching Tahapan Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota Bitung pada 29 Januari 2020, di Kantor Wali Kota Bitung, dengan melibatkan masyarakat Kota Bitung. Gelaran yang disiarkan secara live via akun Facebook KPU Kota Bitung ini, menghadirkan Komisioner KPU Sulawesi Utara, Meydi Tinangon dan Ibu Lanny A Ointu, Forkopimda, Bawaslu, Camat, Lurah, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, partai politik, bakal calon perseorangan, pers, dan masyarakat sekitar.

Dalam launching ini juga ikut diperkenalkan *Si Tarum* sebagai Maskot, dan *Bitung Bapilih* sebagai Jingle dalam Pemilihan Serentak Kota Bitung tahun 2020. *Si Tarum* merupakan *Tarsius* atau salah satu hewan langka yang dilindungi di Kota Bitung. Dipilihnya *Si Tarum*, mengandung makna, seluruh masyarakat Kota Bitung untuk ikut serta dalam memilih pemimpin yang dapat memajukan dan mensejahterakan Kota Bitung selang 5 (lima) tahun ke depan. Berikut arti dari maskot *Si Tarum*.

KONSEP DESAIN		Maskot Pilkada Kota Bitung 2020	
GESTURE DAN POSE		FILSAFATI WARNA	
<p>Karakter <i>Si Tarum</i> yang dominan pada mata yang besar dan tajam, membuat gambaran sebagai karakter yang mampu melihat secara jernih dan menyeluruh.</p> <p>Wajah <i>Si Tarum</i> yang tersenyum, menunjukan sifat yang ramah dan gembira. Ini sebagai representasi dari pesta demokrasi yang aman, damai dan menhawa kebahagiaan bagi masyarakat.</p> <p>Pose <i>Si Tarum</i> yang sedang melangkah ke depan, memberi makna ajakan untuk berperan aktif dalam pemilu dengan menggunakan hak pilihnya sebagai solusi untuk menjadikan Kota Bitung lebih maju dan makmur.</p>		<p>Orange : Netral dan Non Partisan Putih : Jujur dan Independen Hitam : Integritas dan Kemandirian Merah : Berani dan Semangat</p> <p>Dengan dominasi warna keseluruhan menjadi stabilisasi dari:</p> <p>Pemilihan Kepala Daerah Bitung 2020 adalah Pemilu yang Netral dan Independen, penuh Kejujuran dan Berintegritas, serta bertanggung secara mandiri dan menhona kepastian.</p>	



KONSEP DESAIN

Maskot Pilkada Kota Bitung 2020

DEMOKRASI TARSIVUS SPECTRUM

Karakter maskot merupakan personifikasi kartunal dari hewan endemik Tarsivus Spectrum yang ada di cagar alam Tangkoko Batuangus di Kota Bitung. Nama Si Tarum merupakan akronim dari Demokrasi Tarsivus Spectrum.

Tarsivus adalah primata terkecil yang bermata besar dan tajam.

Ini memberi inspirasi untuk mengedukasi pemilih dan masyarakat luas dengan memperkenalkan nilai-nilai pemilu, sehingga nantinya memberi pandangan yang luas dan jelas tentang pentingnya pemilu sebagai wujud kedaulatan pemilih dalam demokrasi.

Tarsivus memiliki kepala yang mampu berputar hingga 180 derajat.

Ini menjadi simbol dari pemilu yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menanamkan kesadaran untuk berperan aktif dalam menentukan masa depan dengan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Bitung 2020.

Tarsivus dapat bergerak cepat dengan lompatan yang jauh.

Ini memberi makna bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bitung 2020 diharapkan menghasilkan pemimpin yang berkarakter dan berkualitas. Pemimpin yang cepat membawa kemajuan dan kemakmuran untuk Kota Bitung.

Tarsivus mampu menggenggam dengan kedua tangannya secara sempurna dan mencengkeram kuat dengan kedua kakinya.

Ini menjadi gambaran dari tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dalam menggunakan hak pilihnya akan menciptakan legitimasi yang kuat pada hasil Pemilihan Kepala Daerah Bitung 2020.

UNSUR LOKAL

Karakter Si Tarum menggunakan pakaian adat adat Minahasa, tonaas wangko. Pakaian dan celana hitam sebagai simbol dari karakter yang berintegritas. Penutup kepala berwarna merah sebagai simbol dari karakter yang berani dan tegas. Selempang yang mengikat pinggang sebagai simbol dari karakter yang mempersatukan semua elemen masyarakat. Kancing warna putih sebagai simbol dari karakter yang bersih dan ikhlas.

Maskot Si Tarum





Jingle Pemilihan Serentak

Jingle Pilkada *Bitung Bapilih* diciptakan oleh Bicola Revolution sekaligus sebagai arrangement dan penyanyi. Penetapan lagu ini sebagai Jingle Pilkada setelah KPU Bitung menetapkannya sebagai champion dalam sayembara menciptakan lagu Pilkada Bitung tahun 2020.

Jingle ini memilih warna musik dan lirik modern, dengan durasi 2 menit, tujuannya agar mudah dipahami, dan mengajak pendengar untuk terlibat dalam pesta demokrasi. Berikut jingle “Bitung Bapilih”:

Song “Bitung Bapilih”
Arrangement dan Penyanyi
by. Bicola Revolution

*Mari Sama-Sama Menunju ke TPS
Gunakan Hak Pilih Sesuai Isi Hati
Untuk Memilih Pemimpin dan Wakil yang Baik
Untuk Kemajuan Kota Bitung Kita Nanti
Beda Pilihan Itu Biasa
Saling Jaga Keamanan Bersama
Karena Tujuan Kita Sama
Memilih Pemimpin Kita Bersama
Jangan Sampe, Jangan Sampe
Jangan Sampe, Jangan Sampe Golput
Kalo Golput Bukan Warga Bitung
Mari Kita Bantu Bantu
Kita Bantu, Kita Bantu KPU
Mengsukseskan Pilkada Nanti
di Tahun 2020
Bitung Kota Damai Masyarakatnya
Ramah dan Berwibawa Kota Kita Tercinta
Bitung Kota Cakalang*



Foto Launching Pemilihan Serentak Kota Bitung Tahun 2020,
di Kantor Wali Kota Bitung pada 29 Januari 2020

C. Perekrutan Badan *Adhoc*

Setelah tahapan Pemilihan Serentak resmi dipublish ke khalayak ramai, KPU Kota Bitung membentuk badan *adhoc* terdiri dari: PPK, PPS, PPDP, plus Sekretariat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Dalam perekrutan badan *adhoc* ini, KPU Kota Bitung berkerjasama dengan Dinas Kesehatan Bitung dan Rumah Sakit RW Mongisidi Teling Manado, untuk melaksanakan *rapid test* bagi para calon badan *adhoc*. Ini dimaksudkan biar tercipta penyelenggara yang benar-benar terbebas dari *Corona Virus Disease* (Covid-19).



Disisi lain *rapid test* ini menyebabkan kinerja dari KPU menjadi lebih terkuras. Buktinya, setelah hasil *rapid test* ada calon KPPS ada yang reaktif, maka otomatis harus diganti, sementara SDM yang tersedia dan memenuhi syarat jumlahnya terbatas. Hal ini juga diperparah pembatasan usia calon KPPS dan petugas ketertiban, dan dengan keengganan mereka untuk di *rapid test*, dengan berbagai argumen yang dilontarkan. Imbasnya, proses perekrutannya menjadi lebih lama.

Langkah selanjutnya adalah memberikan pembekalan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada KPPS dan Petugas Ketertiban, Ini dimaksudkan, agar badan adhoc dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, benar-benar memiliki pengetahuan tentang Pelaksanaan Pemilihan Serentak dimasa Pandemi Covid-19.

Bimtek ini diberikan seluruh Komisioner Kota KPU Bitung sesuai dengan Koordinator Wilayah (Korwil) masing-masing Kecamatan. Yang jadi perhatian ekstra, jika kegiatan dilaksanakan di ruangan tertutup/luar jaringan (luring), maka Protokol kesehatan (Prokes): jaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan/pakai *handsanitizer*, merupakan syarat mutlak yang harus diterapkan. Disamping itu, Bimtek juga dilaksanakan via dalam jaringan (daring) dengan menggunakan aplikasi zoom meeting.

D. Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih

Pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, dilaksanakan Sosialisasi dan Uji Publik terkait Data Pemilih yang dilakukan di tingkat PPS dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Ini dimaksudkan biar masyarakat mengecek secara langsung apakah namanya sudah tercantum atau tidak, dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Bagi



yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) PPS setempat dapat segera menindaklanjutinya. Dengan sosialisasi ini PPS juga menerima masukan untuk perbaikan data, apabila ditemukan kekeliruan penginputan pada Daftar Pemilih Sementara (DPS).

E. Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara

Dalam memasuki tahapan pemungutan dan penghitungan suara, KPU Kota Bitung pada 11 November 2020, bertempat di Hotel Fave Bitung, menggelar Sosialisasi kepada Badan Adhoc yakni: Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sosialisasi ini bertujuan agar nantinya PPK dan PPS dapat mengawal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah kerjanya masing-masing.

F. Relawan Demokrasi (Relasi)

Dalam kamus Bahasa Indonesia, relawan hampir sama artinya dengan kata sukarelawan yang artinya adalah orang yang melakukan pekerjaan/sesuatu secara suka rela (tanpa paksaan). Jadi dapat disimpulkan seseorang itu disebut relawan jika melakukan sesuatu hal secara sukarela, mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran, kegiatan yang mereka buat memberikan keuntungan positif bagi lingkungan atau organisasi yang dibantunya serta tidak ada dasar motivasi atau mengharapkan imbalan uang. Relawan dalam penyelenggaraan pemilihan dalam hal ini di lingkungan KPU Kota Bitung, kita menyebutnya dengan kata Relawan Demokrasi atau biasa disebut Relasi. Program Relasi ini adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi serta



membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota.

Relawan Demokrasi sekarang untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020 sangat berbeda dengan Relawan Demokrasi pada Pilkada 2019 lalu. Dimana pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, mereka dihadapkan pada kondisi bencana non alam yaitu pandemik covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*). Karena kondisi ini membuat teman-teman relasi membatasi jumlah orang dalam bersosialisasi, serta senantiasa menerapkan dan memperhatikan protokol kesehatan . Penggunaan alat perlindungan diri (APD), penyediaan sarana sanitasi, pengecekan suhu tubuh, pakai masker, pengaturan jaga jarak, pengaturan larangan kerumunan dan pembatasan peserta setiap sosialisasi, melibatkan tim gugus tugas pencegahan Covid-19. Salah satu buah tangan atas kinerja dari Relawan Demokrasi adalah capaian partisipasi pemilih yang menyentuh level 78 persen. Angka ini jika dibandingkan dengan Pilkada Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 13,2 persen, dimana kala itu hanya mencapai 64,8 persen.

G. Pemilihan Serentak Lanjutan Kota Bitung Tahun 2020

Adanya pandemi Covid-19, otomatis mempengaruhi pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, KPU Kota Bitung kemudian



mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 41/PL.02.2-Kpt/7172/Kota/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Wli Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Terkait regulasi ini, KPU Bitung wajib mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penundaan dimaksud.

Pada 7 Juli 2020 KPU RI kemudian mengeluarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Dengan dikeluarkannya peraturan ini, tahapan pemilihan Tahun 2020 kemudian dilanjutkan menyesuaikan dengan kondisi pandemik Covid-19 yang lagi mewabah.

Dengan Prokes ketat (pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan/pakai *handsanitizer*) KPU Kota Bitung kemudian melakukan sosialisasi kepada stakeholder dan masyarakat luas terkait pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lanjutan. Kegiatan ini





dilaksanakan pada 10-11 Agustus 2020, yang melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang ada di Kota Bitung, dan 8-10 Agustus dengan menghadirkan badan *adhoc*.



POTRET SOSIALISASI DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Oleh: Otniel Wawo

Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU Minahasa Tenggara

Participasi pemilih jadi salah satu parameter suksesnya suatu hajatan pemilihan umum. Untuk mewujudkan tingkat partisipasi pemilih yang sesuai harapan, berbagai upaya perlu dilakukan. Salah satunya adalah sosialisasi yang intens serta menyentuh semua kalangan.

Catatan ini sedikit mengulas tentang upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mendorong masyarakat terlibat aktif dalam tahapan pemilihan umum serta capaian hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020.

➤ **Mengenal Minahasa Tenggara**

Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu daerah otonom yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 144 desa/kelurahan yang terbagi dalam 3 daerah pemilihan. Secara geografis, daerah yang memiliki luas 161,23 Km² ini memiliki dataran yang luas, pegunungan serta pantai. Keseluruhan wilayah Kabupaten yang beribukota di Ratahan dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan transportasi jenis apapun. Sedangkan dengan akses informasi,



sebagian besar sudah terjangkau layanan internet, dan hanya beberapa desa di Kecamatan Touluaan Selatan dan Ratatotok yang belum.

Daerah Pemilihan di Kabupaten Minahasa Tenggara

Kecamatan Ratahan Kecamatan Ratatotok Kecamatan Tombatu
Kecamatan Ratahan Timur Kecamatan Belang Kecamatan Tombatu
Timur
Kecamatan Pasan Kecamatan Tombatu Utara
Kecamatan Pusomaen Kecamatan Silian Raya
Kecamatan Touluaan
Kecamatan Touluaan Selatan

➤ Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 85.377 pemilih, dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 72.728 atau 85,18 persen. Jumlah partisipasi pemilih di Kabupaten Minahasa Tenggara melampaui target yakni 85 persen, dan menjadikan Minahasa Tenggara sebagai daerah non penyelenggara (hanya melaksanakan satu jenis pemilihan yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi secara nasional.



Table 2

DATA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
TAHUN 2020 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NO	KECAMATAN	DPT	PENGGUNAAN HAK PILIH	TINGKAT PARMAS (%)	SUARA		JUMLAH
					SAH	TIDAK SAH	
	Silian Raya	4690	3876	82.64 %	3835	41	3876
	Touluaan	5277	4607	87.30 %	4549	58	4607
	Tombatu Timur	7296	6090	83.47 %	6027	63	6090
	Belang	12344	10945	88.67 %	10874	71	10945
	Tombatu	7325	5811	79.33 %	5773	38	5811
	Pusomaen	7067	6288	88.98 %	6259	29	6288
	Tombatu Utara	6501	5409	83.20 %	5378	31	5409
	Pasan	5853	5028	85.90 %	4971	57	5028
	Ratahan Timur	4869	4369	89.73 %	4340	29	4369
	Ratatotok	10065	8375	83.21 %	8344	31	8375
	Ratahan	10585	8895	84.03 %	8830	65	8895
	Touluaan Selatan	3505	3035	86.59 %	2997	38	3035
	Jumlah	85377	72728	85.18 %	72177	551	72728

Sumber : Pleno KPU Minahasa Tenggara

➤ **Pelaksanaan Sosialisasi Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih.**

Sosialisasi menjadi hal mutlak dilakukan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam semua tahapan serta menggunakan hak pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020.

Dalam pelaksanaannya, sosialisasi dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung yakni kegiatan yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara dalam hal ini Komisioner, PPK, PPS dan Relawan Demokrasi. Dalam sosialisasi ini, penyelenggara memanfaatkan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ibadah maupun



kegiatan kemasyarakatan seperti acara suka maupun duka untuk menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. Selain itu, KPU Minahasa Tenggara juga melakukan kegiatan dialog lewat Fokus Grup Discussion dengan berbagai komunitas, termasuk melaksanakan dialog berupa pendidikan politik bagi pemilih pemula. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah sosialisasi yang melibatkan pihak di luar penyelenggara seperti Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, pemerintah kecamatan dan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta insan pers di Minahasa Tenggara.

Pelaksanaan sosialisasi ini sendiri, penyelenggara sebelumnya melakukan pemetaan terhadap kondisi di lapangan termasuk melakukan analisa data partisipasi pemilih pada pemilihan sebelumnya. Wilayah yang tingkat partisipasi pemilihnya rendah jadi salah satu pertimbangan untuk memperbanyak sosialisasi di wilayah tersebut.

Dalam pelaksanaannya, selain menyosialisasikan tentang tahapan pemilihan serta upaya KPU menerapkan protokol kesehatan ketat dalam setiap tahapan termasuk pemungutan dan penghitungan suara, penyelenggara juga berupaya meyakinkan publik tentang pentingnya masyarakat khususnya wajib pilih memberikan hak pilih mereka pada pemungutan suara, termasuk upaya meminimalisir bahkan menghilangkan sikap pragmatis yang cukup kental di wilayah ini.

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tahapan pemilihan ini, yang juga menjadi ancaman terhadap tingkat partisipasi pemilih. Mengatasi hal tersebut, penyelenggara terus melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas atau Satgas penanganan Covid-19 Minahasa Tenggara, termasuk meminta data pemilih yang

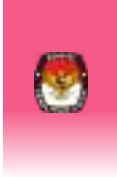


sementara melaksanakan isolasi mandiri di rumah untuk dikunjungi saat pemungutan suara.

Upaya-upaya yang dilakukan, mendapat respon positif dari berbagai pihak. Pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun pihak lainnya termasuk media masa, secara intens menyampaikan ke masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. Hasilnya, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Minahasa Tenggara melampaui target yakni 85,18 persen dari target sebelumnya 85 persen.

➤ **Kesimpulan**

Berkaca dari capaian tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, sosialisasi yang intens kepada semua lapisan masyarakat menjadi hal penting untuk terus dilakukan dalam semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Materi sosialisasi juga, disampaikan dengan bahasa sederhana agar mudah dicerna dan diterima masyarakat, termasuk penyelenggara yang selain menjaga integritas juga mampu menunjukkan sikap baik sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Catatan ini sendiri diharapkan dapat dijadikan referensi sekaligus bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pemilihan Umum ke depan yang semakin baik. Semoga (*)



EFEK SAMPING SOSIALISASI

Oleh: Zulkifli Kadengkang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 merupakan pelaksanaan pemilihan pertama yang diselenggarakan di tengah-tengah pandemik yakni *Corona Virus Disease* (Covid-19). Pelaksanaan hajatan demokrasi lima tahunan ditengah pandemik ini justru melahirkan dinamika baru khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan partisipasi pemilih.

Dengan alasan itulah KPU Kota Kotamobagu menformat serta mendesain pelaksanaan sosialisasi dengan lebih kreatif, inovatif, menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Yang pasti tidak mudah melakukan sosialisasi ditengah situasi mewabahnya penyakit, butuh kesungguhan serta kemampuan lebih agar materi dan apa-apa yang disosialisasikan bisa terterima serta dipahami oleh masyarakat, yang notabenenya pemilih.

Sebagaimana diketahui, sosialisasi tidak saja dimaknai sebagai penyebaran informasi terkait pemilihan semata, yaitu informasi



tentang tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada), ajakan untuk memilih, serta terkait waktu dan hari H pemungutan suara, tapi juga harus diupayakan menjadi sebuah “magnet”



bagi masyarakat pemilih dalam memahami arti pemilihan itu sendiri. Bahkan lebih jauh dari itu sosialisasi merupakan internalisasi pemberian pemahaman nilai-nilai demokrasi tiap warga negara Indonesia yang dilindungi oleh Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Internalisasi nilai-nilai demokrasi tersebut diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat, baik menyangkut hak maupun kewajiban masyarakat. Di sini perlu kami sampaikan bahwa sosialisasi ini pun terus dilakukan bukan hanya bermain pada permukaan semata, tapi lebih jauh dari itu, yakni penanaman serta pemahaman nilai-nilai demokrasi. Terkait itu, KPU Kota Kotamobagu terus berupaya melakukan pendidikan pemilih dalam rangka menanamkan nilai-nilai demokrasi, yang bukan hanya ditunjukkan bagi para pemilih yang sudah bertahun-tahun menggunakan hak pilihnya tetapi juga kepada pemilih pemula. Dengan harapan akan terbentuknya pemahaman terkait nilai demokrasi sebagaimana amanat UUD 1945. Pemahaman nilai-nilai demokrasi memang sudah harus ditanamkan kepada generasi muda kini sejak usia dini. Sehingga dengan sendirinya kesadaran akan hak serta kewajiban politik mereka sebagai warga negara sudah tertanam sejak awal.

Kami; KPU Kota Kotamobagu menilai bahwa sosialisasi perlu diarahkan kepada para pemilih yang “bermazhab” golongan putih (golput). Pemilih seperti itu bisa menjadi hambatan dalam proses pendidikan pemilih bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam setiap pelaksanaan sosialisasi, KPU Kota Kotamobagu selalu menggunakan metode komunikasi dua arah; dialog serta diskusi, ke-timbang pemaparan teori-teori yang terlalu monoton dan akan berdampak peserta cenderung jenuh. Hal itu diciptakan agar terjalin komunikasi dan *sharing* informasi serta tukar pikiran. Meski demikian, metode sosialisasi satu arah tetap terus dilaksanakan, termasuk melalui media-



media sosialisasi, seperti pamphlet, baligo, poster, brosur, spanduk dan lainnya.

Kami; KPU Kota Kotamobagu banyak menemukan berbagai kasus maupun kejadian dimana pemahaman pemilih terhadap pilkada atau pemilihan secara umum, masih sebatas pada hal-hal teknis saja. Diantaranya terkait dengan tahapan dan waktu pemungutan suara. Pemahaman dan pengertian mereka terkait pemilihan belum masuk atau menyentuh pada hal-hal yang lebih substansi. Oleh Karena itu tidaklah mengherankan bila pemilih masih banyak yang tidak mengenal serta

memahami visi-dan misi dari setiap calon. Yang mereka tahu hanyalah sebatas hal-hal umum sebagaimana banyak dipahami masyarakat lainnya. Bahkan tidak sedikit diantara mereka



yang hanya ikut-ikutan atau menjadi pengikut orang-orang yang mereka anggap berpengaruh, tanpa memikirkan apa keinginan mereka terhadap calon yang ada.

Karena itu jangan heran praktik politik uang (money politics) masih mendominasi setiap pemilihan di daerah dan sangat besar berpengaruh kepada para pemilih. Menurut mereka, “*skarang torang pe waktu dapa doi, dari kalau dorang so menjabat dorang so nda mo haga pa torang*” (sekarang waktu kami untuk mendapatkan uang, karena jika mereka sudah terpilih, maka mereka juga pasti sudah tidak akan melihat mereka). Atau ada Bahasa lainnya; “*ada doi ada suara*” (ada uang, ada suara).



Nah, paradigma serta cara pandang seperti itulah yang terus terjadi dan menjadi momok di kalangan masyarakat. Ini sebuah tantangan bagi KPU Kota Kotamobagu, sekaligus peluang agar terus, terus, dan terus melakukan sosialisasi serta pendidikan politik kepada pemilih dan masyarakat Kota Kotamobagu, sehingga terciptanya pemilih yang berkualitas dan bermartabat, jauh dari praktek-praktek politik uang.

PERLU DIBANGUN KESADARAN POLITIK

Kesadaran politik masyarakat penting untuk selalu dibangun, walaupun tahapan Pilkada telah selesai. Ini penting agar tidak terkesan bahwa kegiatan sosialisasi hanya ada dan hadir sebatas digelarnya pemilihan maupun pemilihan umum. KPU Kota Kotamobagu berharap supaya proses pendidikan politik melalui sosialisasi bisa terus



dilakukan, sehingga tidak akan terciptanya lagi ruang-ruang kosong terkait internalisasi demokrasi bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Kotamobagu.

Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih beberapa waktu lalu, KPU Kota Kotamobagu bekerjasama dan menggandeng berbagai kalangan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penerapan atas asas transparansi dalam Pilkada. KPU Kota Kotamobagu dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak saja terpaku pada target partisipasi pemilih dalam Pilkada, namun lebih dari itu untuk



menanamkan pemahaman nilai-nilai demokrasi kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mendesain bentuk sosialisasi serta pendidikan pemilih yang lebih arif, agar dapat berdampak pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman atas nilai-nilai demokrasi sebagaimana amanah Pancasila dan UUD 1945.

Adapun sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Kotamobagu yakni; mengadakan forum warga, keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kaum marginal, keagamaan, netizen, daerah rawan bencana, rawan konflik, wilayah partisipasi rendah, segmen kecamatan, pelaku media.



Selain itu, KPU Kota Kotamobagu juga menjalin kerjasama dengan *stakeholder* yang ada di daerah untuk turut mensukseskan penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020. Walaupun pada pelaksanaan sosialisasi Pilkada kali ini, kerjasama dengan beberapa stakeholder seperti media, tidak berjalan dengan baik karena terkendala anggaran yang ada di KPU Kota Kotamobagu, yang memang tidak tersedia sama sekali. Namun itu bukan menjadi penghalang untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan Pilkada kepada masyarakat melalui media.



Catatan yang bisa diperoleh bahwa sosialisasi yang dilakukan selain untuk meningkatkan partisipasi pemilih, juga bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang tahapan

pelaksanaan Pemilihan maupun Pilkada juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya pelaksanaan dan keterlibatan masyarakat dalam Pemilu maupun Pilkada demi masa depan bangsa dan daerah tercinta.

Perlu diinformasikan bahwa efek dari pelaksanaan sosialisasi dalam rangka Pilkada serentak tahun 2020 ini, sangat banyak. Walaupun KPU Kota Kotamobagu pada Pilkada Tahun 2020 ini tidak mencapai target partisipasi pemilih nasional sebesar 77,5 persen sebagaimana yang ditargetkan KPU RI, karena hanya mencapai 74,71 persen. Namun, disisi itu, KPU Kota Kotamobagu berhasil meningkatkan partisipasi pemilih dari pelaksanaan Pilkada lima tahun sebelumnya (2015) yakni hanya mencapai 53,45 persen. Selain ada peningkatan partisipasi pemilih sebesar 21,26 persen dari Pilkada sebelumnya, juga ada peningkatan pemahaman nilai-nilai demokrasi kepada lapisan masyarakat akibat giat-giat sosialisasi yang dilakukan.



A. KATEGORI DATA PEMILIH

NO.	KECAMATAN	DPT			%		JUMLAH DPT-DPPH-DPTB			%	
		L	P	JMH	L	P	L	P	JMH	L	P
1	KOTAMOBAGU UTARA	6056	6094	12150	49,84	50,15	6133	6177	12310	49,82	50,17
2	KOTAMOBAGU TIMUR	10888	10819	21707	47,94	49,84	11058	10982	22040	50,17	49,82
3	KOTAMOBAGU SELATAN	11584	11023	22607	50,36	48,75	11753	11192	22945	51,22	48,77
4	KOTAMOBAGU BARAT	14693	14482	29175	50,36	49,63	15035	14810	29845	50,37	49,62
JUMLAH		43221	42418	85639	50,46	49,53	43979	43161	87140	50,46	49,53

B. KATEGORI PENGGUNA HAK PILIH

NO.	KECAMATAN	DPT			%		JUMLAH DPT -DPPH- DPT B			%	
		L	P	JMH	L	P	L	P	JMH	L	P
1	KOTAMOBAGU UTARA	4428	4692	9120	48,55	51,44	4505	4775	9280	48,54	51,45
2	KOTAMOBAGU TIMUR	8136	8622	16758	48,54	51,45	8306	8785	17091	48,59	51,4
3	KOTAMOBAGU SELATAN	8877	9168	18045	49,19	50,8	9046	9337	18383	49,2	50,79
4	KOTAMOBAGU BARAT	9135	9428	18563	49,21	50,78	9477	9756	19233	49,27	50,72
JUMLAH		30576	31910	62486	48,93	51,06	31334	32653	63987	48,96	51,03

C. KATEGORI PENGGUNA SURAT SUARA

NO.	KECAMATAN	DITERIMA	KEMBALI	%	TAK PAKAI	%	JUMLAH	%
1	KOTAMOBAGU UTARA	12460	1	0,008	3179	25,51	9280	74,47
2	KOTAMOBAGU TIMUR	22261	7	0,031	5163	23,19	17091	76,77
3	KOTAMOBAGU SELATAN	23182	4	0,017	4795	20,68	18383	79,29
4	KOTAMOBAGU BARAT	29891	16	0,053	10642	35,6	19233	64,34
JUMLAH		87794	28	0,03	23779	27,1	63987	72,88

Artinya, bahwa setiap pelaksanaan sosialisasi oleh KPU Kota Kotamobagu berefek banyak hal, yakni dengan adanya peningkatan partisipasi pemilih sebesar 21,26 persen dari pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara pada tahun 2015 sebesar 53,45 persen. (***)



”POTRET SOSIALISASI DARI TANAH PORODISA”

Oleh : **Andri L. J. Sumolang, ST**

Ketua Divisi SDM Dan Parmas KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

Kabupaten Kepulauan Talaud yang berdiri di tahun 2002 setelah dimekarkan dari kabupaten induk yaitu Sangihe Talaud. Setelah resmi menjadi satu daerah yang otonom, kabupaten Kepulauan Talaud sudah beberapa kali melaksanakan pesta demokrasi, baik itu



Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Porodisa yang lebih kental akan nama dari kabupaten Kepulauan Talaud memiliki jumlah penduduk 94,5 ribu jiwa (BPS. SP2020) dengan luas wilayah daratan 1.251,02 km² dan luas lautnya sekitar 37.800 km² (95,24persen)

Dengan berotonomi kabupaten Kepulauan Talaud terus berkembang, salah satunya dari segi pendidikan politik, dimana dengan hadirnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2003. Berbagai kegiatan sudah dilakukan, salah satunya sosialisasi mengenai kegiatan Pemilu maupun Pilkada. Hingga sampai saat ini KPU kabupaten Kepulauan Talaud hadir untuk



memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan pemilih agar cita-cita demokrasi bisa terwujud.

Dalam pemilihan serentak tahun 2020, KPU kabupaten Kepulauan Talaud gencar melakukan kegiatan sosialisasi. Sebab, penyelenggara Pemilu KPU kabupaten Kepulauan Talaud, memiliki peran dalam melakukan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat walaupun dalam kondisi terbatas yaitu di masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Walaupun secara geografis letak kabupaten Kepulauan Talaud yang memiliki banyak pulau, namun itu tidak menyurutkan semangat Komisioner dan sekretariat untuk melakukan sosialisasi.

Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat mengindikasikan bahwa, rakyat mengikuti, memahami, serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi masyarakat yang rendah mengindikasikan bahwa rakyat kurang memberi perhatian dan menaruh minat terhadap kegiatan kenegaraan. Olehnya, untuk mencapai target partisipasi masyarakat yang sudah ditetapkan sebesar 77,5 persen, berbagai kegiatan sosialisasi telah KPU kabupaten Kepulauan Talaud lakukan dengan mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan KPU.

Kegiatan sosialisasi yang pertama dilaksanakan adalah mengunjungi SMA N 1 Kabaruan. Perjalanan dari ibu kota Melonguane ke pulau Kabaruan ditempuh dengan waktu 1 (satu) jam menggunakan speed boat. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang kepemiluan kepada siswa/siswi, sehingga mereka mengetahui semua tahapan kepemiluan tersebut. Setelah dilaksanakan sosialisasi, KPU kabupaten Kepulauan Taluad melaksanakan kuis kepada peserta sosialisasi (siswa/siswi) agar dapat mengukur sejauh mana serapan materi sosialisasi yang diterima oleh mereka.



Tidak hanya sampai disitu saja kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam hal pencalonan, KPU kabupaten Kepulauan Talaud mengundang stakeholder dalam kegiatan sosialisasi pencalonan bakal calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bertempat di aula Kantor KPU kabupaten Kepulauan Talaud bersama dengan Pimpinan KPU Provinsi Sulawesi

Utara Bapak Salman Saelangi, S. Kel dan Bapak Meidy Y. Tinangon, S.Si., M.Si sebagai narasumber dalam melakukan sosialisasi kepada *stakeholder* bersama dengan pimpinan partai politik. Tujuannya adalah untuk memberikan



pemahaman kepada seluruh undangan yang hadir mengenai sistem pencalonan calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan serentak tahun 2020.

Pada kegiatan sosialisasi tingkat kecamatan, KPU kabupaten Kepulauan Talaud melakukan sosialisasi di 19 kecamatan yang ada di tanah *Porodisa*. Yang pertama dilaksanakan adalah kecamatan Melonguane Timur, yang dihadiri oleh pemerintah, tokoh agama, masyarakat, tokoh adat dan pemuda. Kegiatan ini berjalan dengan baik, bahkan oleh undangan yang hadir sangat berterima kasih kepada KPU kabupaten Kepulauan Talaud karena sudah hadir memberikan pengetahuan mengenai kepemiluan kepada masyarakat di kecamatan



ini. Bahkan salah seorang tokoh adat berharap pelaksanaan Pilkada serentak bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala atau pun masalah yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan sampai pada kecamatan yang berada di pulau Kabaruan, Nanusa dan Miangas. Tujuannya agar semua tahapan pelaksanaan pemilihan serentaka tahun 2020 sampai kepada mereka yang berada di kecamatan kepulauan.

Ditengah pelaksanaan sosialisasi basis kecamatan yang dilakukan di wilayah kepulauan, tentunya



ada kendala yang dihadapi salah satunya adalah faktor cuaca. Sebagai daerah kepulauan tidak bisa dihindari adalah cuaca dimana ada saat lautannya teduh dan ada saatnya lautan itu berombak. Pada saat melakukan sosialisasi di kecamatan Kabaruan dan Damau, tim sosialisasi harus berhadapan dengan gelombang yang lumayan besar, tetapi hal ini tidak menyurutkan niat dan semangat tim sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang kepemiluan kepada masyarakat yang ada di tanah *Tamarongge* (sebutan untuk Pulau Kabaruan). Sampai kembali ke ibu kota Melonguane tim sosialisasi berada dalam keadaan yang sehat walafiat.



Untuk tingkat partisipasi rendah dan daerah rawan konflik, KPU kabupaten Kepulauan Talaud melakukan sosialisasi di Kecamatan Melonguane, dalam kegiatan ini turut hadir sebagai narasumber melalui aplikasi zoom meeting adalah bapak Salman Saelangi, S.Kel selaku Ketua Divisi SDM, Parmas KPU Provinsi Sulawesi Utara. Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2015 di kecamatan Melonguane, tingkat partisipasi masyarakat hanya sampai 61,89 persen, sehingga ini menjadi salah satu target sosialisasi. Karena kecamatan Melonguane juga merupakan ibu kota kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, sehingga tingkat partisipasi masyarakat di kecamatan Melonguane naik di angka 63,85 persen. Sementara untuk



daerah rawan konflik kecamatan Melonguane yang merupakan ibu kota kabupaten memang sangat rentan akan konflik. Sebab tensi politik di kecamatan ini sangat tinggi, sehingga perlu dilakukan sosialisasi. Alhasil, dalam pemilihan serentak tahun 2020, kabupaten Kepulauan Talaud lebih khusus lagi kecamatan Melonguane semua dalam keadaan aman dan sehat. Hal ini, selain karena semangat dan niat tulus dari kami KPU kabupaten Kepulauan Talaud, juga karena peran serta semua elemen masyarakat untuk menyukseskan pemilihan serentak tahun 2020 sangat baik.

Tidak hanya sampai disini saja kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten Kepulauan Talaud. Sasaran sosialisasi juga ditujukan bagi penyandang disabilitas, mereka diberikan sosialisasi mengenai tahapan pemilihan serentak tahun 2020. Kegiatan ini sangat penting untuk memberikan informasi kepada penyandang disabilitas dalam menggunakan hak suaranya pada pemilihan serentak tahun 2020. Ini bentuk perhatian pemerintah terutama KPU, karena pemilih disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan pemilih non disabilitas. Karena kita ketahui bersama, untuk pemilih disabilitas itu banyak hambatan yang mereka alami, dan itu perlu dipahami dan direspon oleh pihak KPU sebagai penyelenggara Pilkada dalam hal teknis.

Kemudian yang menjadi tantangan bagi KPU kabupaten Kepulauan Talaud dalam melaksanakan sosialisasi yaitu di wilayah kecamatan Miangas yang memiliki 1 desa dan kecamatan Nanusa yang memiliki 9 desa dan terbagi di 3 pulau berpenghuni dengan jarak tempuh dari ibu kota Melonguane yaitu, untuk Miangas ditempuh dengan waktu 6 jam dan untuk Nanusa 4 jam. Kondisi perairan talaud yang berubah-ubah menjadi tantangan tersendiri bagi KPU kabupaten Kepulauan Talaud, karena kita diperhadapkan dengan gelombang yang bisa dikatakan menantang adrenalin. Namun dengan semangat dan



tekad yang kuat demi terwujudnya pesta demokrasi yang luber dan jurdil di *Tanah Porodisa* semua bisa dilalui dan dilaksanakan dengan baik.

Dalam pelaksanaan sosialisasi juga persoalan yang ditemui oleh KPU kabupaten Kepulauan Talaud ketika tahapan pemilihan serentak tahun 2020 dilanjutkan kembali setelah sempat tertunda karena merebaknya *Virus Corona Disease 2019 (Covid-19)*. Yang paling menonjol adalah dalam setiap sosialisasi yakni pembatasan jumlah peserta yang hadir, kemudian dalam pelaksanaan sosialisasi dimasa pandemi Covid-19 mengharuskan kegiatan dilakukan secara online (daring), dimana jaringan internet di sebagian besar wilayah kepulauan belum memadai. Hal ini yang menjadi salah satu kendala yang sangat besar.

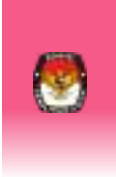
Kedepan ini yang menjadi tantangan bagi kami (KPU Kabupaten Kepulauan Talaud) dalam melakukan sosialisasi. Persoalan-persoalan yang ditemui dilapangan pada saat sosialisasi menjadi perhatian yang sangat penting sehingga kedepan apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini bisa terwujud dengan baik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di *Tanah Porodisa* yang telah bersama-sama menyukkseskan pesta demokrasi di tahun 2020. Sukses ini sukses kita semua.



Bab 2

Metode Sosialisasi



TRANSFORMASI SOSIALISASI

Inovasi dan Kreativitas KPU Tomohon di Pilkada New Normal

Oleh : Stenly Kowaas (*Anggota KPU Kota Tomohon*)



ERA DISRUPTIF: Sosialisasi KPU Tomohon lewat aplikasi zoom, yang mana pesertanya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, penggiat Pemilu dan pimpinan Ormas.

SETIAP era ditandai dengan perubahan. Oleh karena itu, orang dan lembaga yang tidak *aware* dengan perubahan, pasti akan tertinggal dan hanya bisa meratap menahan pahit melihat kesuksesan pihak lain yang cepat beradaptasi dengan perubahan itu sendiri.

Dalam dua dekade terakhir, teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan perubahan fundamental di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam di internal lembaga pemerintah. Perubahan yang cepat membuat tantangan baru bagi semua pimpinan lembaga, entah itu swasta maupun pemerintah. Tidak ada pilihan lain selain secepatnya beradaptasi dan bertransformasi dengan lingkungan baru.



Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga dituntut melakukan hal yang sama. Secepatnya bertransformasi. Menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan *market* (pemilih), agar produk (program) yang disusun dan diimplementasikan di lapangan cocok dengan kondisi kekinian. Jika tidak peka dengan perubahan, mempertahankan kejayaan kelembagaan dengan *mindset* konvensional, sangat mungkin hasil yang dituai tidak akan sesuai ekspektasi.

Di dua jilid Pemilu (2014-2019) dan Pilkada (2015-2020), sangat terlihat komitmen usaha KPU memaknai perubahan lewat berbagai program dan kebijakan. Sistem informasi data pemilih (Sidalih), Sistem informasi partai politik (Sipol), Sistem informasi penghitungan (Situng), Sistem informasi pencalonan (Silon) dan terakhir Sistem Elektronik Rekap (Sirekap), adalah wujud aktualisasi konkrit KPU dalam meletakkan fondasi penting di era transformasi informasi dan komunikasi.

Bahwa akan ada sedikit dinamika bahkan kontroversi, hal tersebut adalah residu normatif dari perubahan itu sendiri. Yang terpenting, KPU sudah membuat langkah maju mendobrak kekakuan yang selalu identik dengan beberapa lembaga pemerintahan. Hasilnya mungkin tidak akan langsung spektakuler. Tapi di masa yang akan datang, pilihan beradaptasi lebih dini dengan perubahan pasti akan terlihat hasilnya. Dan yang terpenting, entitas yang ada di KPU sekarang dan yang akan datang, sudah mendapatkan fondasi absolut terhadap apa yang dibutuhkan lembaga dan masyarakat modern.

Lembaga yang progresif memang harus seperti itu. Berani tidak populer karena mengambil resiko lewat rencana program jangka panjang yang lebih *goal-nya sustainable*. Mengejar kesuksesan jangka pendek hanyalah pilihan buat orang-orang yang tidak visioner dan kurang memedulikan nasib lembaga di waktu yang akan datang.



Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 terang saja makin mendesak KPU untuk memperdalam dan memperluas spektrum transformasi. Penyebabnya tidak lain karena gelaran pesta demokrasi lokal itu dilaksanakan saat Pandemi Covid-19. Semua tahapan dijalankan dalam tatanan kenormalan baru. Pola-pola lama selain tidak relevan lagi dengan situasi, akan membuat penyelenggara, peserta Pilkada dan masyarakat rentan terinfeksi Virus Corona.

KPU Kota Tomohon sendiri merancang banyak metode sosialisasi metode digital ketimbang konvensional. Tantangan terbesarnya adalah kreativitas. *Content* yang atraktif dan inovatif harus dirancang menyentuh semua segmen pemilih. Tidak hanya kepada pemilih pemula dan pemilih muda yang lebih bersenyawa dengan dunia digital, tapi juga kepada segmen pemilih dengan *range* usia 30-50 tahun. Sementara untuk pemilih di atas 50 tahun, apalagi yang sudah lanjut usia (Lansia), pendekatan metode konvensional seperti tatap muka mau tidak mau harus dilakukan.

Kerja keras keluarga besar KPU Kota Tomohon sendiri berbuah hasil menawan. Usai proses pemungutan dan penghitungan suara digelar, Tomohon nangkring di posisi puncak sebagai daerah dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi untuk kategori kota. Capaiannya 91,35 persen. Hasil yang tentu saja mencengangkan, mengingat sebelumnya banyak pihak ramai-ramai memprediksi minat pemilih datang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan terjun bebas karena takut terinfeksi Covid-19. Hasil di lapangan akhirnya memproduksi hal yang berbeda.

Boleh saja kalau belakangan banyak kalangan memberikan pendapat baru, bahwa tingginya tingkat partisipasi pemilih di Tomohon disebabkan oleh karena level kontestasi yang tinggi antar paslon dan pendukung masing-masing. KPU Tomohon tentu tidak



dalam posisi untuk melarang orang berpikiran seperti itu. Sah-sah saja. Demokrasi memang melazimkan perbedaan argumentasi. Tapi hasil akhir tetap saja hasil akhir. 91,35 persen bukanlah angka yang lahir karena faktor tunggal. Banyak elemen yang saling berkontraksi dan kemudian membentuk elemen pemicu dalam mendorong pemilih berduyun-duyun datang di TPS. Salah satunya, tentu saja, karena pilihan KPU Tomohon memberi prioritas besar pada metode sosialisasi secara digital, yang mana itu merupakan wujud transformasi penyelenggara yang akrab dengan perubahan. (*)

Kunci Utamanya Kreativitas



POLA NEW NORMAL: *Flyer* promosi iven Kuis Pilkada 2020 KPU Tomohon

PLATFORMNYA tersedia. Daya jangkanya tanpa tanding. Outputnya konkrit. Begitulah kira-kira memaknai era digital. Tantangannya cuma satu; kreatif. Lebih dahsyat dampaknya kalau kreativitas dibungkus dengan ide *simple* tapi imajinatif. Jika simpel mampu dikendalikan, hasil manis tinggal menunggu waktu.



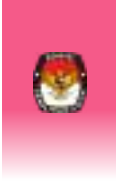
Menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saat Pandemi Covid-19, “memaksa” Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon beradaptasi dan berupaya mengatasi kondisi masalah yang dihadapi. Kalau sebelumnya prosentase program sosialisasi digital dan konvensional masih 50-50, kehadiran Virus Corona membuat KPU Kota Tomohon mengubah strategi dengan menempatkan prosentase sosialisasi digital menjadi lebih dominan.

Dari sekian banyak ide kreatif yang diusulkan dalam sejumlah rapat internal, KPU Tomohon mematenkan beberapa metode sosialisasi, yang dianggap paling memungkinkan, efektif dan bersenyawa dengan kebutuhan pasar pemilih Pilkada. Berikut daftarnya:

1. **Kuis Pilkada**
2. **Tik Tok Challenge**
3. **Virtual Run For Vote**
4. **Podcast**
5. **Lomba Selfie di TPS**

Untuk melengkapi kedoyanan KPU Tomohon menggenjot sosialisasi digital, hampir 20 media massa berbasis online digandeng untuk menambah massif sosialisasi secara digital. Hampir semua kegiatan maupun promosi even KPU Tomohon dipublikasikan pihak eksternal, dalam hal ini media online.

Sederet metode sosialisasi di atas belum termasuk *flyer-flyer* dengan design kekinian yang setiap hari diviralkan lewat akun resmi sosial media KPU Kota Tomohon, apakah itu *Facebook, Instagram dan chanel Youtube*. Dikemas dengan menarik karena content yang di-*upload* harus memiliki karakter kuat dan daya tarik maksimal. Masyarakat sekarang makin selektif. Jika tidak menggoda, *content* di



media sosial tidak akan menarik simpati. Sekali lagi kunci utamanya kreativitas. (*)

Rating Tinggi Kuis Pilkada



RATING TINGGI: Penonton sekaligus peserta *live* Kuis Pilkada Tomohon 2020 selalu tinggi.

KUIS Pilkada terbukti menjadi salah satu metode baru yang sexy. Awalnya dirancang sepekan sekali. Tapi karena ratingnya terbilang tinggi, kadang harus dibuat dua kali seminggu. Padahal hadiahnya jauh dari mewah. Kami hanya membuat sejumlah *gift* yang murah-meriah seperti payung, kaos, *tumbler* plus Alat Pelengkap Diri (APD) Covid-19 seperti *hand sanitizer* dan masker.

Program Quis Pilkada dibuat simple. Tidak berat. Tujuannya supaya lebih penonton yang sekaligus jadi peserta jadi tertarik. Durasinya juga pendek. Paling lama 15 menit. Akan tetapi, pesan sosialisasi cepat ditangkap warga. Diawali dengan sosialisasi singkat terkait tahapan yang sementara berlangsung, penonton mau tidak mau



harus memperhatikan karena soal akan diambil dari materi sosialisasi yang disampaikan secara *live* di akun *facebook* KPU Tomohon.

Begitu pertanyaan disampaikan, pemirsa quis Pilkada cukup mengetik jawaban di kolom komentar akun *facebook*. Yang benar dan paling cepat mengetik jawaban yang menang. Setiap episode quis Pilkada hanya ada tiga pertanyaan. Dibuat begitu supaya lebih banyak yang penasaran. Kalau penasaran karena tidak menang, tentu mereka akan menonton dan ikut lagi di episode selanjutnya. Begitu strategi entertainment yang lazim digoreng para produser program-program televisi mainstream.

Quis Pilkada terbukti melahirkan multiplier efek yang kuat. Selain karena pesan sosialisasi benar-benar diterima secara utuh, *netizen* yang meminta pertemanan dengan FB KPU Tomohon melonjak tajam. Operator sampai harus membuat fanpage khusus, karena akun facebook biasa hanya dibatasi 5000 pertemanan. Di dunia media sosial, jumlah pengikut adalah aset terbesar. Makin banyak, makin kuat dampaknya. Ibarat di dunia perbankan, makin banyak nasabah otomatis nilai kapitalisasi bank makin bertambah.

Dalam kaitan dengan sosialisasi tahapan Pilkada, Quis Pilkada adalah berkah tak ternilai. Kalau di banyak kegiatan sosialisasi secara tatap muka, kehadiran peserta dalam jumlah banyak bukan jaminan bahwa yang disampaikan bisa ditangkap oleh semua yang hadir. Banyak yang sekadarnya memenuhi undangan penyelenggara, tapi tidak benar-benar memperhatikan materi yang disosialisasikan. Berbeda dengan Quis Pilkada. Penontonnya otomatis harus memperhatikan materi yang dilontarkan *host*, karena potongan-potongan materi yang disampaikan berpotensi jadi pertanyaan. Inilah yang dinamakan upaya minimum, tapi hasilnya maksimum. (*)



Memanfaatkan Tren TikTok Challenge



TREN BARU: Peserta menampilkan ajakan memilih lewat karya TikTok. Puluhan video peserta disukai puluhan ribu warga di akun sosial media mereka masing-masing.

DI era digital, semua serba cepat berubah. Hampir selalu ada tren baru yang muncul. Memanfaatkan tren untuk mencapai tujuan tentu harus jadi opsi. Sesuatu yang jadi tren biasanya memengaruhi gaya hidup masyarakat. TikTok tidak terkecuali. Platform ini sudah menjadi sedemikian fenomenal sejak diluncurkan. Anak muda sampai orang tua, “terinfeksi” dengan virus TikTok. Aplikasi ini memang sangat booming karena sangat bersenyawa dengan rupa-rupa gaya hidup jaman *now*, yakni narsis dan lebay. KPU Tomohon juga tidak menyia-nyaikan tren ini. Dihadirkanlah yang namanya Pilkada Tiktok Challenge.

Sejak di-*publish* di akun sosial media (Sosmed) KPU Tomohon Facebook dan Instagram, sambutan masyarakat begitu tinggi. *Flyer* Pilkada Tiktok Challenge bahkan jadi viral sekira dua pekan. TikTok lovers di Tomohon berlomba-lomba mem-posting *flyer* tersebut,



sembari men-tag sesama rekan dunia maya mereka, yang merupakan warga dan pemilih di Kota Tomohon.

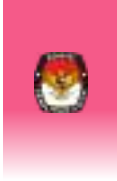
Supaya aura Pilkada sedemikian kental di Pilkada TikTok Challenge, semua peserta (tim maupun perorangan) wajib memakai jingle Pilkada KPU Provinsi dan KPU Tomohon sebagai *backsound*. Ini juga. Berkat lomba ini, jingle Pilkada KPU Provinsi dan KPU Tomohon menjadi sedemikian populer di Tomohon. Bahkan di angkutan-angkutan umum di Kota Tomohon, jingle ini sering sekali diputar.

Syarat lainnya, semua gerakan yang dilakukan tidak boleh menampilkan simbol-simbol yang identik dengan peserta Pilkada. Bagaimanapun juga, tujuan lomba ini harus bersih dari hal-hal yang berbau kontestasi. Sebagai penyelenggara, KPU Tomohon menjaga benar supaya tidak jadi sorotan di kemudian hari. Peserta yang tidak patuh, tentu saja tidak mendapat nilai yang bagus.

Hasil karya setiap peserta juga wajib di-upload di Facebook dan Instagram, dengan men-tag akun KPU Tomohon. Pemenang akan ditentukan oleh ramai tidaknya tanggapan masyarakat di platform Sosmed peserta. Sebenarnya inilah tujuan utama lomba ini digelar, yakni ajakan dating ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 dimunculkan lewat karya yang bisa menjangkau banyak orang.

Benar saja. Dari sekian banyak peserta yang ikut, ada puluhan karya peserta yang mendapatkan atensi dahsyat dari masyarakat luas. Ada malah yang mendulang belasan ribu like (Facebook) dan simbol hati (Instagram) di unggahan mereka, yang mana ini jadi salah satu penilaian utama bagi calon pemenang. Mencengangkan memang. Kami sebenarnya sudah memprediksi bahwa TikTok Challenge akan jadi heboh. Tapi yang terjadi lebih dari ekspektasi awal.

Memang benar. Era sekarang yang dibutuhkan memang bukan lagi melulu *work hard*, tapi *work smart*. Yang kreatif memanfaatkan tren



dan digitalisasi akan lebih akrab dengan kesuksesan. Sederhana itu rumusnya. (*)

KPU Pelopor Virtual Run For Vote

Hidup Sehat, Ratusan Peserta Bantu Sosialisasi Pilkada



DOUBLE IMPACT: Selain mengajak warga Tomohon untuk hidup sehat di era Pandemi Covid-19, ratusan runner di Tomohon mengajak pemilih untuk ke TPS, lewat postingan-postingan di sosial media.

PANDEMI Covid-19 membuat banyak warga meng-*upgrade* kembali pola hidup sehat. Olahraga salah satunya. Berlari dan bersepeda menjadi dua olahraga paling digandrungi, karena selain membuat tubuh bugar, dua tipe olahraga ini tidak terlalu sulit untuk dilakoni.

KPU Kota Tomohon memanfaatkan situasi ini untuk dijadikan metode sosialisasi, lewat iven bertajuk Run For Vote. Konsepnya bukan *offline*, tapi online. Perlombaanannya dikemas virtual. Mulai dari pendaftaran sampai saat *race*, semua dilakukan secara online. Meski virtual run terbilang baru pertama kali Tomohon, peserta membludak. Saat informasi pembukaan pendaftaran di share di akun Facebook dan



Instagram KPU Tomohon, link pendaftaran langsung dibanjiri pendaftaran.

Bayangkan saja. Tidak sampai sehari, kuota 150 slot pendaftar awal sudah langsung *sold out*. Tim kerja Virtual Run For Vote sampai geleng-geleng kepala melihat luar biasanya animo warga Tomohon terhadap iven ini. Kolom komentar akun Facebook dan Instagram, serta nomor *contact person* tim kerja langsung dijejali pertanyaan sampai protes. Rata-rata menanyakan kenapa pendaftaran sudah ditutup, dan atau meminta KPU Tomohon menambah kuota slot peserta.

Melihat respon tinggi warga, akhirnya diputuskan kuota peserta ditambah. Apa boleh buat. Kami harus menambah order jersey dan medali, demi untuk mewujudkan aspirasi warga yang tidak sempat mendapatkan slot di pendaftaran awal. Kuota ditambah 50 peserta. Lagi-lagi, hanya hitungan jam slot sudah *sold out*. Fantastis.

KPU Kota Tomohon membuat syarat dan ketentuan, yang mana tujuannya *double impact*. Selain menjadi bagian dari lembaga pemerintahan yang intens mendorong warga untuk menjalani pola hidup sehat, setiap peserta wajib meng-*upload* semua etape keikutsertaan mereka di Virtual Run For Vote di akun sosial media (Sosmed) *Facebook* dan *Instagram* masing-masing, dengan men-tag akun Sosmed KPU Tomohon.

Simple-nya begini. Setiap peserta akan mendapatkan *flyer* E-Bib yang dikirimkan ke email masing-masing. *Flyer* tersebut wajib mereka upload di akun *Facebook* dan *Instagram* masing-masing, dengan syarat menyertakan kata-kata ajakan memilih, plus hastag Pilkada 9 Desember 2020, ayo ke TPS dan jangan Golput. Itu berarti, sosialisasi terkait Pilkada tidak hanya dilakukan KPU, tapi juga dilakukan ratusan peserta Virtual Run For Vote. Warga tidak hanya berpartisipasi, tapi



sudah menjadi agen sosialisasi KPU Tomohon dalam mengumandangkan Pilkada. *Multiplier* efeknya sangat maksimal.

Ketika periode *race* digelar, setiap hasil lari yang direkam lewat rupa-rupa aplikasi olahraga, juga wajib di-*upload* di Sosmed masing-masing, tentu dengan men-tag akun Facebook dan Instagram KPU Tomohon. Lagi-lagi kata-kata atau kalimat ajakan memilih dijadikan caption di setiap unggahan, lengkap dengan sejumlah hastag Pilkada.

Saat akhir periode lomba, yang diatur beberapa hari sebelum hari H Pilkada, 9 Desember 2020, peserta menjemput jersey jersey dan medali finisher. Lagi-lagi semua peserta memposting ajaka memilih dengan memakai Jersey lengkap dengan medalnya. Bisa dibayangkan *impact*-nya, saat 200 peserta mewarnai jagad dunia maya Tomohon dengan postingan-postingan ajakan hidup sehat dan ajakan ke TPS untuk memilih calon kepala daerah Sulut dan Tomohon.

Tidak hanya memelopori dimulainya era lomba lari virtual di Tomohon, KPU juga mampu mendorong warga untuk hidup sehat dan membantu secara nyata kampanye memilih di Pilkada 9 Desember 2020. Tidak salah memang *quote* sejumlah tokoh milenial terkait dunia digitalisasi: “Yang dibutuhkan sekarang bukan *work hard*, tapi *work smart*.” (*)



Broadcast Pilkada Berwujud Podcast



PLATFORM BARU: KPU Tomohon ikut menjajal cara para selebritis untuk melakukan promo/sosialisasi lewat siaran Podcast.

PERUBAHAN menghempas semua industri. Tidak terkecuali bisnis pertelevisian. Para selebritis tidak lagi membutuhkan *platform* televisi untuk bisa menjual pesona mereka. Cukup membuat akun sosial media seperti *Facebook*, *Instagram* dan *channel Youtube*, dikoneksikan dengan internet, *the show go on* lewat acara kekinian bertajuk Podcast.

KPU Tomohon ikut tergiur mencicipi Podcast ini. Dan, supaya atraktif serta menarik banyak penonton, konsepnya benar-benar dibuat sama dengan yang dikemas oleh para selebritis nasional. Ada host, kemudian ada bintang tamu. Menyematkan kata narasumber jadi sangat terkesan jadul. Lebih keren disebut bintang tamu.

Episode Podcast hadir seminggu sekali. Ruangan Rumah Pintar Pemilu (RPP) dikemas jadi seperti studio mini, meski dengan perlengkapan broadcasting yang tidak seglamour yang ada di studio-studio televisi. Kan yang penting *output*-nya. Bukan fasilitasnya. Memang diakui kualitas siaran tak sementereng yang di televisi, tapi minimal sosialisasi program dan tahapan bisa diketahui masyarakat



lewat siaran di akun *Facebook*, *Instagram* dan *Channel Youtube* KPU Kota Tomohon.

Istilah-istilah seperti *cut*, *action* dan *pariwara*, akhirnya tersaji di kantor KPU. Memang tidak super rapi. Tapi untuk ukuran staf KPU yang hanya bermodal nekat, hasilnya sudah sangat maksimal. Yang membanggakan, semua kru podcast mulai dari produser acara, cameramen dan lain-lain yang terlibat, semuanya *full* staf KPU Kota Tomohon.

Bintang tamu yang tampil di Podcast KPU variatif. Sering Komisioner KPU Tomohon, tapi terkadang mengundang pihak eksternal. Seperti pimpinan Bawaslu dan stakeholder terkait lainnya. Konsepnya host memberikan pertanyaan seputar tahapan serta hal-hal teknis Pilkada, kemudian bintang tamu memberi penjelasan.

Seperi kemasan Podcast selebritis pada umumnya, suasana dibuat tidak kaku. Sangat santai. Supaya semua mengalir, dan masyarakat Tomohon yang menonton tidak mendapatkan suguhan yang membosankan. Kan seperti itu tujuan *talkshow* di televisi-televisi *mainstream*. Ada talk (pembicaraan), tapi juga harus ada unsur *show*. Supaya menarik.

Podcast juga sekali lagi merupakan cerminan program kekinian. Budgetnya kaki lima, hasilnya bintang lima. Bayangkan saja jika harus mengikat Kerjasama dengan televisi. Harga sekali *live* durasi satu jam, biayanya pasti luar biasa mahal. Bandingkan dengan Podcast yang fasilitas produksinya seadanya, tapi mampu menarik penonton dalam jumlah banyak.

Radio juga begitu. Benar bahwa suaranya didengar masyarakat, tapi emosi yang tergambar dari mimik host dan bintang tamu tidak bisa dilihat warga. Auranya tentu saja berbeda. Podcast emosinya lebih kuat. Tidak mengherankan bahwa konsep ini menjadi sedemikian



booming saat ini. Sebuah kebanggaan KPU Tomohon mengambil bagian dari era baru *broadcasting* (*)

Hebohnya Lomba Selfie di TPS



NARSIS POSITIF: Peserta lomba selfie di TPS dengan karya kreatif mereka.

INILAH etape terakhir iven KPU Tomohon dalam proses sosialisasi dan pendidikan pemilih di Pilkada 2020. Lomba Selfie di TPS. Sejak pengumuman lomba ini di-bom KPU Tomohon lewat akun resmi Sosial Media (Sosmed) KPU Tomohon beserta seluruh anggota PPK dan PPS lewat akun Sosmed mereka masing-masing, tanggapan masyarakat sudah sedemikian heboh.

Kali ini KPU Tomohon memang tidak tanggung-tanggung menyiapkan hadiah. Daya tariknya memang di hadiah uang tunai. Makin menggiurkan nilainya, makin banyak yang tertarik. Tidak rugi KPU Tomohon mengguyur Lomba Selfie di TPS dengan anggaran Rp16 Juta, jika warga yang awalnya tidak tertarik datang ke TPS memilih hadir karena ingin ikut lomba.



Lomba Selfie di TPS sendiri adalah jilid kedua. Yang pertama lahir saat Pemilu 2019. Pesertanya luar biasa banyak. Dan ketika tujuh pemenang dipublikasikan membawa pulang hadiah jutaan rupiah waktu itu, tidak sedikit yang dirundung rasa kecewa karena melewatkan momentum tersebut.

Tak heran, saat digelar lagi di Pilkada 2020, peserta makin berjubel. Caranya pun tidak sulit. Cukup datang ke TPS, memilih, berselfie ria, setelah itu mereka meng-uploadnya di sosial media masing-masing. Tentu dengan catatan, unggahannya harus ditautkan dengan akun *Facebook* atau *Instagram* KPU Tomohon. Fotonya juga harus menampilkan unsur jari yang sudah ada tintanya. Sebagai penanda sudah memilih.

Makin narsis dan atraktif fotonya, makin besar peluang menang. Menampilkan foto keluarga pasca memilih, tentu mendapatkan kredit poin khusus. Tak heran, banyak peserta meng-upload foto sekeluarga pasca memilih. Lomba selfie di TPS ini memiliki magnet strategis dalam menarik warga untuk berbondong-bondong menyalurkan hak suara. Persis sama dengan tagline lomba ini. “Pilih calonnya, bawa pulang hadiahnya.” Benar-benar *happy ending* iven. (*)



Team Work Kuat, Hasil Pasti Hebat



FAKTOR KUNCI: Kombinasi talenta tim sosialisasi KPU Tomohon melahirkan banyak ide dan gagasan progresif.

“**TALENT** wins games, but teamwork and intelligence wins championships.” Quote ikonik dari legenda hidup klub Basket NBA Chicago Bulls, Michael Jordan, adalah filosofi holistik yang menginspirasi KPU Tomohon dalam menjelajahi tahapan demi tahapan Pilkada 2020. “Talenta dapat memenangkan berbagai permainan, namun sebuah kerja sama tim dan juga kecerdasan intelektual dapat memenangkan berbagai kejuaran.”

Sebagai Komisioner Divisi Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, penulis tentu memiliki kemewahan untuk merancang pola dan metode sosialisasi. Tapi keangkuhan itu disingkirkan sejauh mungkin, tidak hanya karena segmen sosialisasi yang beragam, tapi era digital dan aura kekinian membutuhkan kreativitas dan inovasi program dari banyak pihak. Khususnya anak-anak muda.

Sejak awal penyusunan program sosialisasi Pilkada 2020, penulis sudah begitu optimis karena meyakini KPU Tomohon kali ini dianugerahi skuad yang komplit. Ada yang jenius membuat konten



video, ada yang ahli membuat *flyer-flyer* imajinatif, ada yang punya segudang ide kreatif di kepalanya, ada juga yang memiliki ketekunan dalam hal data dan administrasi, sementara ada yang punya daya jelajah tinggi dalam proses implementasi program di lapangan. Benar-benar *dream team*.

Hampir semua konsep program berbasis platform digital lahir dari tim ini. Peran saya hanya menggambarkan output kegiatan yang diharapkan, memberi bumbu semangat kepada masing-masing personil tim, serta mengkomunikasikan anggaran setiap kegiatan dengan pihak pengelola keuangan sekretariat KPU Tomohon. Selebihnya eksekusi diserahkan kepada tim millennial ini.

Salah satu kelebihan bekerja dengan anak-anak muda adalah kepercayaan diri yang kuat. Setiap program yang akan dilaksanakan, selalu mereka yakini akan berdampak kuat di masyarakat. Ini sebenarnya sangat fundamental, karena terkadang seorang pemimpin masih belum yakin benar dengan setiap program yang disuguhkan ke publik. “Tenang pak. Santai saja. Pasti kuat respon publik.” Inilah kalimat yang rajin dilontarkan tim.

Benar saja. Hampir semua program yang disusun berjalan relatif baik. Bahwa ada kekurangan sini dan sana, hal tersebut layak diberi permakluman, mengingat macam-macam keterbatasan yang muncul saat proses eksekusi program. Yang utama, KPU Tomohon sudah berusaha dan pernah berselancar di era digital dengan metode sosialisasi yang kreatif dan inovatif. Kalimat inspiratif Michael Jordan lagi-lagi ampuh. “Saya dapat menerima kegagalan. Semua orang pasti pernah gagal dalam hidup mereka. Tapi saya tidak bisa menerima kegagalan karena tidak mencoba.” (*)



Sentralnya Peran Badan Adhoc



KEKUATAN NYATA: Daya jangkau sosialisasi menjadi makin kuat saat anggota PPK dan PPS aktif melakukan sosialisasi di lapangan.

RIBUAN badan adhoc, mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemugutan Suara (PPS), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tentu saja adalah kekuatan nyata di lapangan. Jika diatur dengan baik lewat pola dan sistem yang terukur, sosialisasi di lapangan akan sangat *powerfull*.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon merasakan benar manfaat yang lahir dari aktivitas sosialisasi ribuan badan adhoc. Di kelurahan masing-masing, banyak dari mereka yang merupakan tokoh masyarakat. Tentu saja segala sesuatu yang disampaikan, punya dampak yang baik itu KPU secara kelembagaan.

KPU Kota Tomohon merancang setiap PPS dan PPK memberikan laporan periodik mingguan, tentang kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Ini wajib. PPS menyampaikan laporan ke PPK, direkap, kemudian diteruskan ke KPU. Tak harus *hardcopy*. Cukup disampaikan lewat email atau aplikasi seperti WhatsApp.



Setiap anggota PPK juga harus rajin melakukan monitoring langsung. Ini jadi bagian laporan mereka setiap Minggu. Komisioner KPU Tomohon juga juga rutin turun lapangan melakukan monitoring. Ini penting agar anggota PPK dan PPS benar-benar serius melakukan sosialisasi tahapan Pilkada 2020.

Selain sosialisasi langsung lewat ibadah-ibadah maupun kegiatan-kegiatan keluarga, memanfaatkan akun sosial media semua anggota PPK dan PPS juga menjadi sebuah kemewahan buat KPU Tomohon. Tidak ribet. Setiap tahapan, ajakan dan atau informasi penting tentang Pilkada 2020 cukup dibuat dalam bentuk *flyer*, kemudian di-share atau repost di akun Facebook dan Instagram semua badan adhoc.

Tapi tentu ada cara untuk mengontrol. Itulah kenapa setiap postingan anggota badan adhoc, selalu ditautkan dengan akun resmi KPU Tomohon. Dengan begitu, bisa kelihatan siapa-siapa saja yang aktif mengeksekusi informasi Pilkada 2020 di dunia maya. Jika kekuatan individu-individu dalam sebuah lembaga dimaksimalkan, hasilnya selalu dahsyat. (*)



TANTANGAN RELAWAN DEMOKRASI DIMASA MASA PANDEMI COVID-19

Oleh: Darul Halim

Dalam berbagai sumber, sejarah Minahasa Utara (Kabupaten Minahasa Utara) agak sulit untuk ditelusuri. Baik dalam skala lokal yang bersifat tradisional, maupun sumber asing yang berasal dari luar negeri. Tidak banyak sejarawan atau budayawan lokal yang mengkaji sejarah Bumi Klabat ini secara lebih spesifik. Sumber sejarah masa lampau menyebutkan, Kabupaten Minahasa Utara menjadi satu bagian dengan sejarah umum daerah Minahasa. Wilayah yang untuk sebagian besarnya merupakan Minahasa Utara, adalah lokasi anak suku Tountewoh yang kemudian menjadi Tonsea-Minahasa.

Kabupaten Minahasa Utara terletak di Provinsi Sulawesi Utara yang berjarak sekira 19 km dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara, Manado. Kabupaten yang beribukota di Airmadidi ini, merupakan daerah otonom baru yang dimekarkan dari Kabupaten Minahasa, melalui Undang-Undang Nomor 33 tahun 2003 dan diresmikan pada Januari 2004. Kabupaten dengan slogan **“Mengasihi, Melayani dan Mensejahterahkan.”** ini memiliki potensi alam yang luas serta kekayaan sejarah dan budaya daerah, yang menjadi daya tarik tersendiri. Sebagai Kabupaten dengan tujuan wisata yang cukup menjanjikan, Kabupaten Minahasa Utara menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor yang diandalkan. Ini seperti yang tertuang dalam Visi Kabupaten Minahasa Utara: **“Minahasa Utara Menjadi**



Kabupaten Agribisnis, Industri dan Pariwisata Secara Terpadu Serta Berkelanjutan di tahun 2021.”

Sebagai daerah yang masih memegang teguh adat istiadat keminahasaan, secara langsung berimplikasi terhadap Pemilihan Serentak Tahun 2020. Salah satu indikatornya adalah kesukacitaan yang tercipta kala hajatan pesta demokrasi ini digelar pada 9 Desember 2020. Sebelum sampai pada hari H pencoblosan suara, ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara, salah satunya adalah pembentukan Relawan Demokrasi.

Berdasarkan Surat Edaran KPU Umum RI Nomor: 630/pp.06-SD/06/KPU/VIII/2020, Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Serentak dibagi 5 (lima) basis pemilih, dengan rincian sebagai berikut: Pemilih perempuan, Pemilih penyandang disabilitas, Keagamaan, dan Warga internet. Program Relawan Demokrasi adalah salah satu gerakan sosial, dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Relawan Demokrasi menjadi mitra KPU Kabupaten Minahasa Utara, dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih. Disamping itu juga Relawan Demokrasi merupakan bentuk pelibatan masyarakat sebagai subyek demokrasi dikomunitasnya sendiri. Dengan harapan kualitas pesta demokrasi dapat di tingkatkan, ketika peran, fungsi, dan kinerja relawan dapat dilakukan secara optimal. Relawan Demokrasi diprakarsai pembentukannya sejak Pilkada 2014, berlanjut hingga Pilkada 2019 dan 2020.

Meski demikian, ada yang berbeda dengan tugas dan fungsi Relawan Demokrasi yang dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya, dengan yang dilaksanakan pada 2020. Dimana Relawan Demokrasi Tahun 2020 diperhadapkan dengan Pandemi Covid-19, yang dalam sejarah kepemiluan di Indonesia baru pertama kali terjadi. Perubahan



strategy *trial and error* dalam proses sosialisasi dan Pendidikan pemilih, tidak bisa tidak harus dilakukan. Karena tidak ada panduan yang sudah teruji untuk bisa dijadikan pegangan dalam tahapan lanjutan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Untuk itu, pemerintah bersama KPU mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2020, yang kemudian diperkuat menjadi UU Nomor 6 tahun 2020. Demikian pula dengan PKPU tentang tahapan lanjutan.

Perubahan jadwal yang tidak menentu, menyebabkan Relawan Demokrasi harus menyesuaikan agenda kegiatan, agar sejalan dengan tahapan Pemilihan Serentak yang dilakukan. Penerapan Protokol Kesehatan yang ketat, baik bagi oleh penyelenggara dan masyarakat, juga menyebabkan strategi sosialisasi dan Pendidikan pemilih berubah dari yang biasanya melibatkan massa dengan jumlah banyak, kini dibatasi dengan penerapan social/ physical distancing. Relawan Demokrasi juga dituntut tidak hanya meningkatkan partisipasi dan kualitas Pemilihan Serentak, tapi juga mampu mensosialisasikan penerapan protocol kesehatan dalam setiap tahapan pesta demokrasi.

Relawan Demokrasi Basis Perempuan

Relawan Demokrasi basis perempuan, bekerja dibidang keperempuanan, dengan kekhususan memberi sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada perempuan terutama ibu rumah tangga. Keberadaan Relawan Demokrasi ini menjadi cukup sentral, karena menunjukkan partisipasi perempuan dalam kepemiluan Indonesia. Perempuan juga memiliki pengaruh yang besar terutama didalam keluarga. Contoh kecilnya adalah, pendapat dari seorang ibu (perempuan) menjadi hal penting yang akan mempengaruhi keadaan dari suatu keluarga. Kegiatan perempuan juga banyak yang mengharuskan untuk bertemu dengan banyak khalayak ramai.



Misalnya, jika ke pasar seorang ibu pasti banyak ketemu teman-temannya, ataupun kegiatan arisan.



Foto. Relawan Demokrasi Basis Perempuan

Relawan Demokrasi Basis Pemilih Penyandang Disabilitas

Masyarakat yang memiliki hak pilih dalam hajatan Pemilihan Serentak bukan hanya mereka sempurna keberadaannya fisiknya, penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Minahasa Utara menjadikan Penyandang Disabilitas sebagai salah satu basis Relawan Demokrasi. Dibentuknya Relawan Demokrasi berbasis disabilitas menjadi bukti kepedulian KPU Kabupaten Minahasa Utara terhadap kaum disabilitas, dan bukti bahwa negara tidak mendiskriminasikan mereka. Dengan adanya basis disabilitas juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam berpolitik. Keberpihakan pemerintah dan KPU Kabupaten Minahasa Utara terhadap kaum disabilitas juga tercermin pada penyediaan kertas suara dan TPS yang ramah untuk masyarakat disabilitas.



Foto: Relawan Demokrasi Basis Penyandang Disabilitas

Basis Keagamaan

Berdasarkan pedoman pelaksanaan Relawan Demokrasi basis keagamaan selama ini diorientasikan pada tokoh-tokoh agama saja. Ini dimaksudkan, biar distribusi dan konsumsi informasi ke pemilu dan demokrasi, bisa masuk ke dalam ruang kehidupan para jamaah. Bentuk sosialisasi Relawan Demokrasi basis Keagamaan dilakukan ke jamaah disela-sela sholat jumat, jamaah gereja/pura/wihara/klenteng dan lain sebagainya. Sementara kegiatannya antarlain dapat berupa:

- a. Menghadiri Ibadah Minggu Pagi/Sore dan Ibadah lainnya.
Dengan meminta ijin terlebih dahulu melalui pertemuan langsung dengan Pimpinan/Ketua jemaat sehari sebelum mengadakan sosialisasi.



- b. Tatap Muka
Berkordinasi dengan pimpinan jemaat atau Hukum Tua untuk dapat memberi kesempatan menyampaikan sosialisasi.
- c. Tanya Jawab Seputar Pemilu dan Visualisasi Alat Peraga memberikan pertanyaan dan edukasi yang menarik, untuk dijawab dengan dibantu alat peraga.



Foto:Relawan Demokrasi Basis Keagamaan

Basis Warga Net

Awalnya Smartphone merupakan barang mewah bagi beberapa kalangan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, sesuatu yang dianggap “wah” tersebut, justru menjadi kebutuhan utama, menyamai kebutuhan primer lainnya. Kondisi ini oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara dijadikan salah media untuk mensosialisasikan tahapan Pemilihan Serentak, yakni dengan membentuk Relawan Demokrasi Basis Warga Net. Trend Pandemic Covid-19 yang terus naik, juga berimplikasi terhadap media pengguna internet yang ikut mengalami



peningkatan. Himbauan pemerintah untuk di rumah saja (*stay at home*) mengakibatkan kurangnya kegiatan sosialisasi secara tatap muka, sehingga masyarakat beralih medsos (*facebook, instagram, dan whatsapp*), sebagai media mencari informasi dan berinteraksi dengan sesama makhluk sosial. Melihat fenomena ini KPU Kabupaten Minahasa Utara sebagai penyelenggara Pemilihan Serentak, sadar bahwa media sosial menjadi salah satu kunci utama dalam melakukan sosialisasi yang lebih efektif dan efisien. Sosialisasi melalui media sosial menjadi pilihan terbaik, karena tidak akan melanggar protokol kesehatan, mengurangi kegiatan tatap muka, dan kegiatan berkumpul lainnya dalam jumlah banyak.

Untuk menjadi seorang Relawan Demokrasi Basis Warga Net, KPU Kabupaten Minahasa Utara mensyaratkan, harus memiliki *followers* minimal 500 orang. Ini dimaksudkan agar bisa menjangkau lebih banyak orang dalam kegiatan sosialisasi warga net di media sosialnya. Dengan postingan edukasi kepemiluan di medsos, mampu menjangkau seluruh *netizen* dan *followers*, di dunia maya.





Gambar yang disosialisasikan Relawan Demokrasi Basis Warga Net

Potret Masa depan Relawan Demokrasi di Minahasa Utara

Program Relawan Demokrasi khusus di Minahasa Utara bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses Pemilihan Serentak, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi, dan membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil, dalam agenda politik baik Pemilu maupun Pilkada. Salah satu indikator sisi positif dari keberadaan Relawan Demokrasi adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, seperti yang tertera pada tabel berikut ini:



Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pilkada 2019 dan Pemilihan Serentak Tahun 2020

Kecamatan	Tingkat Partisipan	
	2019	2020
Airmadidi	74,38 persen	83,91 persen
Talawan	74,93 persen	80,96 persen
Likupang Barat	88,45 persen	86,74 persen
Kauditan	82,83 persen	83,08 persen
Kalawat	80,17 persen	80,96 persen
Dimembe	82,22 persen	80,93 persen
Wori	89,03 persen	85,32 persen
Likupang Timur	87,39 persen	84,03 persen
Kema	81,90 persen	79,74 persen
Likupang Selatan	87,54 persen	86,72 persen
Jumlah	81,80 persen	82,90 persen

Sumber: KPU Kabupaten Minahasa Utara

Dari uraian diatas, KPU Kabupaten Minahasa Utara merekomendasikan: program Relawan Demokrasi tidak hanya dijalankan pada saat Pemilihan Serentak, tapi harus dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan. Proses kaderisasi Relawan Demokrasi juga harus terus dilakukan termasuk peningkatan kapasitas para relawan. Kolaborasi kegiatan Relawan Demokrasi dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya dengan kelompok jurnalistik, menjadi penting dilakukan dimasa yang akan, datang agar jangkauan kelompok sasaran, bisa semakin luas dan public akan mengetahui segala aktivitas Relawan Demokrasi. Keragaman metode penjangkauan



informasi dan media pembelajaran, penting untuk diperhatikan dalam setiap kegiatan Relawan Demokrasi, agar tidak terkesan monoton, dan mampu menyesuaikan dengan kondisi kelompok sasaran. Penggunaan teknologi informasi penting untuk dirintis kedepan, sebagai media sosialisasi dan Pendidikan dalam setiap kegiatan.



UPAYA DAULAT RAKYAT BERBUAH SALAM YANG TAK TERJAWAB

Oleh: Azwar Hamid¹

Sebelum proklamasi kemerdekaan, bangsa ini awalnya berdaulat pada tuan, yakni bangsa penjajah yang menggunakan kekuasaannya dengan cara-cara memaksa dan tanpa mempertimbangkan peri kemanusiaan maupun peri keadilan, dimana segala bentuk kebijakan tidak didasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih kepada mementingkan kepentingan para kaum mereka sendiri dengan memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Kondisi inilah yang mendasari dan menjadi cikal bakal perjuangan para pendahulu bangsa diberbagai daerah di wilayah Nusantara yang pada akhirnya membuahkan hasil pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan diproklamirkannya Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia oleh Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta, yang menandakan bahwa bangsa Indonesia telah bebas dan lepas dari daulat tuan dianut selama penjajahan, terbentuknya sebuah negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah Negara Republik Indonesia berdaulat pada akyat, maka untuk mendistribusikan kedaulatan rakyat tersebut secara merata, maka Negara Indonesia selanjutnya menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, yakni sebuah sistem pemerintahan dimana

¹ Staf Pelaksana Subbagian Teknis dan Hubmas KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan



semua rakyatnya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. *Democracy means simply the bludgeoning of the people by the people for the people*, kutipan dari Oscar Wilde, dramawan terkemuka di Irlandia, tentang pandangannya mengenai demokrasi.

Dalam penyelenggaraannya, demokrasi dijalankan dengan kriteria-kriteria praktik politik, salah-satunya dengan melakukan pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dari hal tersebut diatas, dapat digambarkan bahwa sistem demokrasi ini mengharuskan pemimpin-pemimpin baik ditataran pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun wakil-wakil di parlemen tersebut dipilih secara, umum, rahasia, langsung, jujur dan adil serta transparan dan akuntabel melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilu juga digunakan sebagai sarana untuk melindungi kepastian hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih.

Nah, untuk melaksanakan Pemilu agar berjalan sesuai apa yang diamanatkan Undang-Undang maka dibentuklah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Keppres Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan ketentuan UU No. 13 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Dalam perjalanannya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melalui banyak halang rintang, misalnya saja pada Pemilu tahun 2019 (Pileg dan Pilpres) yang memakan banyak korban jiwa dipihak penyelenggara oleh karena beban kerja yang sangat besar, sehingga pada Pemilihan Serentak tahun 2020, Komisi Pemilihan



Umum membuat beberapa aplikasi untuk menunjang dan mengurangi beban kerja petugas-petugas dilapangan seperti Sirekap, Sidalih, dan aplikasi-aplikasi lainnya.

Tantangan lain yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum yakni, tingkat partisipasi masyarakat (parmas) yang masih tidak menentu, mengapa partisipasi pemilih dianggap hal yang penting? itu karena, indikator keberhasilan suatu pemilu adalah setinggi apa tingkat partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam mengikuti pesta demokrasi, selain itu tingkat partisipasi masyarakat juga menentukan sekuat apa legitimasi suatu pemerintah yang terpilih baik itu pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.

Sehingga untuk memaksimalkan partisipasi pemilih tersebut, KPU RI selaku penyelenggara pemilihan melakukan sebuah terobosan melalui surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, yakni sebuah gerakan masyarakat yang tergabung dalam Relawan Demokrasi (Relasi).

Relawan Demokrasi sendiri adalah sebuah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya apalagi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 ini dilaksanakan dalam masa pandemi *Covid-19* yang sangat berdampak pada kesehatan, kondisi sosial politik, ekonomi masyarakat serta yang lebih parahnya lagi diprediksi oleh beberapa pihak akan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat.

Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang menjadi *pioneer* dalam beberapa basis strategis yang telah dipetakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kurangnya literasi politik serta pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memilih



dengan idealisme sendiri, mengakibatkan banyaknya masyarakat yang terjebak dalam politik pragmatis, juga menjadi alasan untuk menggagas Gerakan Relawan Demokrasi ini.

Selain itu, Gerakan ini juga diharapkan mampu melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan ditengah pandemi *Covid-19* yang mana ketentuannya telah termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 hingga masyarakat tidak perlu panik untuk menyalurkan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan kata lain gerakan ini sebagai perpanjangan tangan Komisi Pemilihan Umum untuk menjangkau masyarakat secara luas, dengan melibatkan masyarakat itu sendiri dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pemahaman politik masyarakat tentang pentingnya memilih, serta untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat untuk memilih ditengah pandemi *Covid-19*.

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sendiri , sedikitnya ada 21 (dua puluh satu) relawan yang tergabung setelah melalui beberapa kali tahapan seleksi, dan terbagi dalam beberapa basis strategis, yaitu :

1. Basis Keluarga;
2. Basis Pemilih Pemula;
3. Basis Pemilih Muda;
4. Basis Pemilih Perempuan;
5. Basis Penyandang Disabilitas;
6. Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus;
7. Basis Kaum Marginal;
8. Basis Komunitas;
9. Basis Keagamaan;
10. Basis Warga Internet;



Basis-basis tersebut adalah basis yang telah di tentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menjadi sasaran sosialisasi.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pemilihan Serentak Tahun 2020 sungguh sangat berbeda dengan pemilu dan pemilihan sebelumnya karena diselenggarakan ditengah wabah pandemi sangat meresahkan masyarakat dunia. Hal ini mengharuskan pihak penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum untuk memanfaatkan fasilitas media sosial untuk bersosialisasi secara online, namun pada praktiknya penyelenggara juga menemukan hambatan yakni terbatasnya akses internet di beberapa daerah kecamatan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yakni di Kecamatan Pinolosian Timur, serta sebagian wilayah Kecamatan Pinolosian Tengah, yang berakibat pada kurang optimalnya sosialisasi secara *online* tersebut.

Pandemi *Covid-19* juga berakibat pada dibatasinya jumlah peserta sosialisasi yang dilakukan para relawan oleh karena kurangnya fasilitas memadai untuk dilakukan sosialisasi sesuai ketentuan pada protokol kesehatan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun Komisi Pemilihan Umum, yang mengakibatkan kurang luasnya cakupan masyarakat yang ikut terlibat dalam sosialisasi.

Dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bisa dianggap berhasil dalam penyelenggaraan 2 (dua) pemilihan sekaligus, yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan yang ditandai dengan tidak adanya sengketa penyelenggaraan maupun hasil pemilihan, tingginya partisipasi masyarakat, serta tidak ditemukannya lonjakan



kasus *Covid-19* di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pasca Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Berikut tabel tentang tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:

Tabel. 1
Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara
Tahun 2020

NO	KECAMATAN	DATA PEMILIH			PENGGUNA HAK PILIH				TINGKAT PARMAS (%)
		DPT	DPTb	Total	DPT	DPTb	DPPh	Total	
1	BOLAANG UKI	11.916	194	12.110	10.936	194	42	11.172	92,25
2	HELUMO	4.390	57	4.447	4.194	57	3	4.254	95,66
3	POSIGADAN	9.586	134	9.720	9.078	134	5	9.217	94,83
4	TOMINI	3.904	30	3.934	3.751	30	6	3.787	96,26
5	PINOLOSIAN	7.579	58	7.637	7.027	58	11	7.096	92,92
6	PINOLOSIAN TENGAH	4.445	81	4.526	4.106	81	6	4.193	92,64
7	PINOLOSIAN TIMUR	5.563	47	5.610	5.025	47	3	5.075	90,46
JUMLAH		47.383	601	47.984	44.117	601	76	44.794	93,35

(Sumber : Divisi Parmas KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)



Tabel. 2
Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow
Selatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	DATA PEMILIH			PENGGUNA HAK PILIH				TINGKAT PARMAS	
		DPT	DPTb	Total	DPT	DPTb	DPPh	Total	(%)	
1	BOLAANG UKI	11.916	194	12.110	10.936	194	5	11.135	91,95	
2	HELUMO	4.390	57	4.447	4.194	57	0	4.251	95,59	
3	POSIGADAN	9.586	134	9.720	9.078	134	1	9.213	94,78	
4	TOMINI	3.904	30	3.934	3.751	30	3	3.784	96,19	
5	PINOLOSIAN	7.579	58	7.637	7.027	58	3	7.088	92,81	
6	PINOLOSIAN TENGAH	4.445	81	4.526	4.106	81	0	4.187	92,51	
7	PINOLOSIAN TIMUR	5.563	47	5.610	5.025	47	2	5.074	90,45	
JUMLAH		47.383	601	47.984	44.117	601	14	44.732	93,22	

(Sumber : Divisi Parmas KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)



Dari data tabel tingkat partisipasi masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa dari 47.383 data pemilih, tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara sebesar 93,35 persen sedangkan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Bolaang Mongondow Selatan sebesar 93,22 persen. Dengan angka tersebut, hal itu termasuk yang tertinggi jika dibandingkan dengan data tingkat partisipasi diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Capaian yang luar biasa tersebut, tidak terlepas dari usaha-usaha yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi (Relasi) yang telah berjuang secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik dalam melaksanakan tugas pendidikan politik, maupun dalam melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan dalam masa pandemi *Covid-19*.

Dalam melaksanakan tugas, para relawan demokrasi tentu tidak berjalan dengan mulus begitu saja, dihimpun dari berbagai laporan dari para relawan, yang paling banyak yakni saat turun *door to door* mereka disangka petugas kepolisian yang sedang melakukan *sweeping* masker hingga masyarakat menutupkan pintu, tidak adanya sarana yang memadai untuk dilakukan sosialisasi. Tidak kalah unik relawan atas nama Elpira Pakaya yang saat melakukan sosialisasi disangkanya petugas partai, salam yang tidak terjawab hingga ditinggalkan pada saat melakukan sosialisasi. Masalah-masalah tersebut sudah mereka anggap sebagai tantangan tersendiri dalam mengemban amanah sebagai Relawan Demokrasi yang memang tidak mudah. Ada pula strategi mengunjungi pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat yang digunakan oleh salah seorang relawan yakni dengan memanfaatkan momen ditengah-tengah kegiatan arisan ibu rumah tangga, pertemuan karang taruna dan pengajian-pengajian majelis taklim.



Berikut pengalaman-pengalaman yang kami himpun dari para Relawan Demokrasi bentukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dikirim melalui *whatsapp*:

1. Relawan atas nama Fadli: Pengalaman selama menjadi relawan demokrasi Pemilihan Serentak tahun 2020. Awal saya turun sosialisasi di desa Bakida, saya langsung mendatangi masyarakat di daerah terpencil, yang ada di pegunungan walaupun banyak rintangan harus menyeberangi sungai yang sangat mengerikan, jalannya licin, walaupun banyak terpeleset tetap dilalui. Saya tetap melanjutkan perjalanan, tiba di tempat itu saya mengucapkan salam pada mereka, mereka menjawab sambil ketakutan karena saya datang pakai rompi dan masker sebelum saya membuka masker mereka sangat ketakutan jadi saya minta waktu sedikit mereka diam tidak menjawab pertanyaan saya, walaupun mereka tidak menjawab saya langsung saya menyampaikan materi sosialisasi tentang pemilihan, dan akhirnya mereka tahu bahwa saya adalah relawan demokrasi bentukan Komisi Pemilihan Umum”.
2. Rahmat Riyanto Abas, awal menjadi Relawan Demokrasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2020 di mulai ketika sebuah link berita yang memuat pengumuman rekrutmen Relawan Demokrasi tahun 2020 di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di *share* di grup *whatsapp*, setelah saya membaca seluruh persyaratan serta tugas dan tanggung jawab menjadi relawan, hati saya tergerak untuk ikut berpartisipasi. Tepat dihari itu juga, saya mendatangi kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memasukkan permohonan untuk dapat berpartisipasi. Disitulah awal cerita ini dimulai ketika



akhirnya saya ikut tergabung menjadi Relawan Demokrasi untuk basis Warga Net. Tugas yang saya emban juga tidak tanggung-tanggung. Selain menjalankan kewajiban melaksanakan sosialisasi di basis Warga-Net, kami di tuntut pula menyosialisasikan pemilihan serentak di basis segmen yang berbeda-beda. Artinya sewaktu- waktu kami juga harus siap jika ada permintaan untuk melaksanakan sosialisasi di basis yang lain sebagai contoh basis marginal.



Perkiraan kami terlintas pada mulanya sebelum terjun ke lapangan, kegiatan ini terkesan gampang dan mudah. Hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkenaan dengan Pemilihan tahun 2020. Karena memang latar belakang kami yang saat itu aktif di organisasi kepemudaan, rasa-rasanya kalau berbicara di depan khalayak umum sudah biasalah, dalam pikiran kami waktu itu. Setelah mendapatkan bimbingan dari KPU Kab. Bolaang Mongondow Selatan untuk terjun ke lapangan, pertama kalinya melaksanakan sosialisasi pemilihan serentak, barulah kendala dan permasalahan itu muncul.

Pertama kali menemui kendala adalah di karenakan belum rampungnya alat peraga penunjang sosialisasi, salah satunya adalah contoh surat suara. Hal ini menjadikan kami harus berpikir ulang bagaimana agar sosialisasi dapat berjalan efektif dan lancar. Akhirnya



solusi dari permasalahan ini dapat diatasi dengan memperlihatkan foto calon kepala daerah melalui media perangkat *seluler* (HP).

Berbekal file presentasi yang kami dapatkan sewaktu mengikuti bimbingan yang kami manfaatkan untuk presentasi di basis Warga Net maupun di masyarakat. Tetapi juga ada permasalahan yang muncul di kala awal-awal kami melaksanakan sosialisasi yaitu jaringan *seluler* terkadang mati, sehingga tidak memungkinkan kami untuk meng-*upload* (mengunggah) bahan sosialisasi ke media sosial.

Seiring waktu berjalan kami dihadapkan beberapa pertanyaan entah dari tokoh pemuda maupun tokoh masyarakat perihal penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020, terutama basis masyarakat yang berdomisili tinggal di wilayah perkotaan yang secara kualifikasi berpendidikan tinggi. Sehingga memaksa kami untuk harus berkomunikasi intens dengan para komisioner KPU Bolaang Mongondow Selatan untuk sering bertanya perihal pemilihan. Karena memang kami akui untuk memahami dan mempelajari semua aturan terkait penyelenggaraan pemilihan tidak cukup hanya satu kali bimbingan teknis. Ketika berhadapan dengan masyarakat, kami bagaikan guru dan murid, kami diposisikan sebagai orang yang paling tahu perihal tentang penyelenggaraan pemilihan serentak. Lantas inilah yang memaksa kami untuk harus lebih banyak belajar lagi dengan cara membuka PKPU dan materi-materi pemilihan serentak lainnya.

Permasalahan lain muncul ketika melaksanakan sosialisasi di masyarakat, ada sebagian masyarakat meminta kami di dalam penyampaian sosialisasi harus cepat dengan alasan agar tidak memakan waktu, dalam penyampaian pun kami diuntut harus seefektif mungkin. Bahasa yang komunikatif juga turut serta menjadi faktor yang paling mendukung dalam kegiatan sosialisasi. Karena di



Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, banyak kegiatan di lingkungan masyarakat masih yang menggunakan bahasa Gorontalo (hulonthalo) dan bahasa Mongondow. Otomatis kami yang harus lebih banyak belajar dan mengenal kosakata dari bahasa daerah tersebut. Yang mana kita ketahui bersama, bahwa seiring perkembangan jaman banyak anak muda yang mulai melupakan dan sedikit malu untuk menggunakan bahasa daerah.

Mulai saat itulah kami berfikir bahwa tidak mudah menjadi seorang Relawan Demokrasi. Kami di tuntut terus belajar dan mulai beradaptasi dengan kegiatan dimasyarakat. Semenjak itu pula kami mulai prihatin banyaknya anak muda yang sebaya dengan kami, sudah tidak peduli dengan lingkungan dan hanya mementingkan *gadget dan game*.

Sebagai Relawan Demokrasi juga merupakan ikhtiar sebagai anak bangsa untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa utamanya dalam hal pendidikan politik. Kegiatan ini pula juga yang mengajarkan kepada kami arti penting sebuah demokrasi, bahwa setiap masyarakat memperoleh kedudukan yang sama sebagai warga negara untuk ikut andil menentukan arah dan nasib bangsa dan Negara hingga lima tahun yang akan datang.

Begitulah pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para relawan, yang sebagian besar berbangga karena bisa berpartisipasi dan menyumbangkan tenaga dan fikirannya demi menyukseskan perhelatan pemilihan demi tercapainya tujuan dan cita-cita awal *founding father*.



POTRET SOSIALISASI DI BUMI KARANGETANG MANDOLOKANG KOLO-KOLO

Oleh : Arther N. Tamaka

A. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah merupakan salah satu ciri dari budaya demokrasi, dimana rakyat secara langsung diberikan akses yang seluas-luasnya untuk dilibatkan dan diikutsertakan dalam menentukan arah dan kebijakan politik suatu negara. Pemilihan Umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin politik di lembaga legislatif dan eksekutif baik itu Presiden dan Wakil Presiden maupun kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pemilihan kepala daerah merupakan perwujudan dari demokrasi ditingkat lokal, dimana rakyat memiliki hak dan kesempatan untuk berpartisipasi menentukan pemimpin di daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara langsung dalam politik merupakan indikator dari sebuah negara demokrasi. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan dapat diartikan sebagai kegiatan sukarela dari masyarakat untuk ikut dalam setiap tahapan proses penyelenggaraan pemilihan. Partisipasi masyarakat dalam setiap jenis pemilihan pasti akan mengalami pergerakan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 khususnya di kabupaten



Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menurun dibanding dengan tingkat partisipasi pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan sebelumnya. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan serentak ditengah pandemi *Covid-19* menghasilkan angka partisipasi 74 persen, capaian angka ini tidak lepas dari metode sosialisasi yang di desain dan digunakan oleh KPU kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban politiknya dalam pemilihan serentak tahun 2020.

Pelaksanaan sosialisasi dengan berbagai metode yang telah dibuat oleh KPU kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro diperhadapkan dengan beberapa tantangan dilapangan seperti, tantangan kewilayahan yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa secara geografis masyarakat tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan dimana empat (4) kecamatan berada di pulau yaitu kecamatan Tagulandang, kecamatan Tagulandang Selatan, kecamatan Tagulandang Utara dan kecamatan Biaro dan ada 39 (tiga puluh sembilan) desa yang berada di kepulauan dari total 93 (sembilan puluh tiga) desa/kelurahan yang ada di kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Tantangan selanjutnya yaitu pelaksanaan Pilkada serentak dilaksanakan ditengah pandemi *Covid-19*, ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara secara umum, karena KPU dituntut untuk dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi secara massif kepada masyarakat untuk mempublikasikan dan menginformasikan tahapan penyelenggaraan pemilihan, dimana sebelum adanya pandemi *Covid-19* melanda bangsa Indonesia kegiatan sosialisasi terkait dengan pemilihan serentak dengan menghadirkan peserta dalam jumlah yang banyak adalah sesuatu yang wajar.



Pelaksanakan kegiatan sosialisasi ditengah pandemi *Covid-19* selain kami KPU menyampiakan informasi tentang teknis tahapan penyelenggaraan pemilihan dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya hak dan kewajiban politik setiap warga masyarakat, disisi lain juga KPU wajib menerapkan protokol kesehatan secara taat dan disiplin dalam setiap tahapan termasuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan mengatur jarak antar peserta, memakai masker, cuci tangan dan pembatasan jumlah peserta. Kemudian kami juga dalam kegiatan sosialisasi berupaya meyakinkan pemilih untuk tidak takut dan tidak khawatir dalam memberikan hak pilih mereka untuk datang ke TPS dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat yang secara teknis telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020. KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam kegiatan sosialisasi berupaya secara maksimal membangun kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam setiap tahapan pemilihan.

B. Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau biasa dikenal dengan SITARO merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Utara dengan luas wilayah kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 3.066,95 km² yang terdiri dari, luas daratan 275,95 Km² (9persen) dan luas lutan 2.791Km² (91persen). Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan salah satu daerah kepulauan yang berada pada bagian utara dari semenanjung pulau sulawesi yang secara astronomi terletak diantara 2° 07' 48" - 2° 48' 36" Lintang Utara dan antara 125° 09' 36" - 125° 29' 24" Bujur Timur.



Berdasarkan posisi geografisnya, kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Sangihe
- Sebelah timur berbatasan dengan laut Maluku
- Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Minahasa Utara
- Sebelah barat berbatasan dengan laut Sulawesi

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan daerah kepulauan yang memiliki wilayah cukup luas dengan cakupan 47 (empat puluh tujuh) pulau, dimana 10 (sepuluh) pulau berpenghuni dan tiga puluh tujuh (37) pulau belum berpenghuni. Salah satu dari pulau yang ada yaitu pulau Makalehi merupakan pulau terluar yang berbatasan dengan negara Filipina. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan bagian integral dari Provinsi Sulawesi Utara, dengan ibu kota kabupaten Ondong Siau berjarak 146 Km dari kota Manado yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara.

Jarak rentang kendali :

- Ulu Siau – Tagulandang : 21 mil laut
- Ulu Siau – Biaro : 41 mil laut
- Ulu Siau – Tahuna : 60 mil laut
- Ulu Siau – Manado : 85 mil laut



C. Langkah - Langkah dan Upaya Sosialisasi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pasal 4 secara eksplisit disebutkan bahwa sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat bertujuan :

1. Menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat
3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu

Pemahaman dan pengetahuan dari sebagian masyarakat selaku wajib pilih yang merupakan pemegang kedaulatan itu sendiri masih terbatas pada tatanan teknis saja seperti hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan, namun masih belum menyentuh sampai pada aspek substansinya. Pemilih datang ke TPS untuk menggunakan hak konstitusionalnya sebagian tidak mengenal secara jelas profil dari masing-masing pasangan calon mulai dari visi-misi dan program kerja termasuk rekam jejak para calon. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dimaksudkan agar masyarakat mendapat informasi terkait dengan teknis pelaksanaan pemilihan serta informasi tentang peserta pemilihan secara utuh.

Sosialisasi pada umumnya dipahami sebagai sebuah proses belajar, kondisi ini terjadi karena pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya seperti belajar mengenai peran, norma dan nilai untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Menurut pandangan



Berger (dalam Sutaryo, 2005) bahwa sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat. Dalam suatu proses politik, sosialisasi politik menjadi suatu hal yang penting karena terdapat keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi dalam sebuah proses politik. Sosialisasi politik menurut Syarbarini, dkk (2004) adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Masyarakat melalui proses sosialisasi politik inilah memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup melalui pendidikan formal dan informal atau tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga atau tetangga maupun dalam pergaulan masyarakat. (dikutip dalam Yusa Djuyandi), 2014. Efektivitas Sosial Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.

Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam menyukseskan tahapan pemilihan serentak ditengah mewabahnya pandemi *Covid-19* telah berupaya secara maksimal dalam melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, dengan maksud agar tingkat partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang menggunakan hak pilih mereka dalam hajatan lima tahunan ini meningkat, minimal mencapai angka partisipasi yang ditargetkan secara nasional pada angka 77,5 persen. Dalam rangka meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan khususnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak tahun 2020, KPU kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro selaku penyelenggara teknis tahapan dituntut untuk secara aktif dan massif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tujuannya agar



masyarakat selaku wajib pilih mendapatkan informasi secara paripurna tentang tahapan pemilihan serta memberikan pemahaman akan pentingnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat itu sendiri dalam setiap tahapan termasuk menyampaikan bagaimana cara masyarakat dapat berpartisipasi secara proaktif dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan. Selain itu, informasi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana KPU dapat menyuguhkan informasi tentang peserta pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara kepada masyarakat mulai dari visi-misi, program kerja dan rekam jejak dari masing-masing pasangan calon.

Potret dan bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam menyukseskan pelaksanaan pemilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 dikemas dalam beberapa bentuk kegiatan seperti :

1. Sosialisasi berbasis Kecamatan

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan basis peserta di tingkat kecamatan ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi tentang teknis tahapan penyelenggaraan pemilihan dan informasi mengenai peserta pemilihan yang ikut berkontestasi mulai dari profil masing-masing pasangan calon yang memuat visi-misi, program kerja dan rekam jejak dapat diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan, termasuk penyampaian mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*. Penjelasan terkait dengan protokol kesehatan kepada peserta sosialisasi ini mejadi hal yang penting dan wajib disampaikan dalam setiap tahapan pemilihan yang dilakukan oleh KPU kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro seperti, pelaksanaan kegiatan



kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilihan harus dipahami oleh masyarakat yang ikut dalam kegiatan sosialisasi bahwa kondisinya sudah berbeda dengan pelaksanaan kampanye dikondisi normal atau sebelum adanya pandemi *Covid-19*, dimana dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam *Covid-19* yang mengatur secara teknis pelaksanaan kampanye, seperti metode kampanye dimana untuk rapat umum dan kegiatan lainnya secara ketentuan tidak dapat dilakukan, kemudian adanya pembatasan jumlah peserta kampanye, untuk metode kampanye pertemuan terbatas, tata muka dan dialog dihadiri paling banyak 50 orang dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, mulai dari pengecekan suhu tubuh, jaga jarak, cuci tangan, pake masker dan menghindari kerumunan selanjutnya debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon yang hanya dihadiri oleh pasangan calon, KPU, Bawaslu dibatasi dua (2) orang dan tim kampanye empat (4) orang. Masyarakat didorong untuk mengikuti dan menyaksikan melalui media daring (*live streaming facebook, youtube dan zoom meeting*) serta penyebaran bahan kampanye dengan memperhatikan protokol kesehatan. Namun pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ditengah situasi mewabahnya pandemi *Covid-19* menjadi sedikit berbeda, dimana sejatinya pelaksanaan sosialisasi itu dihadiri oleh banyak orang dengan maksud agar semakin banyak peserta yang hadir semakin banyak juga yang menjadi informan untuk meneruskan dan mempublikasi informasi kepada masyarakat yang ada dilingkungan sekitarnya. Sebagai bentuk ketaatan KPU dalam mengikuti protokol kesehatan, dalam pelaksanaan



kegiatan sosialisasi jumlah peserta yang hadir dibatasi hanya 20 (dua puluh) orang yang diambil dari perwakilan pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, kaum perempuan, tokoh pemuda dan komunitas nelayan/tani, dengan pertimbangan bahwa mereka ini dinilai memiliki jaringan atau keanggotaan yang jelas sampai ditingkat desa/kelurahan sehingga mampu meneruskan informasi yang mereka terima saat sosialisasi kepada masyarakat atau pun komunitas mereka. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi basis kecamatan ini dilaksanakan di 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan metode tatap muka mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.



Foto.Dok. Divisi
Parmas KPU Kab.
Kepl. SITARO.
Sosialisasi di
Kecamatan
Tagulandang Utara.

2. Sosialisasi di Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Terpencil dan Daerah Rawan Konflik

KPU kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melakukan pemetaan wilayah sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020. Kegiatan sosialisasi pada daerah yang telah dipetakan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin baik panitia maupun peserta yang ikut. Pemetaan wilayah dimaksud didasarkan pada beberapa point indikator seperti :



- a. Pemetaan daerah dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah. Sebagai bahan pembandingan pemetaan dilihat dari data tingkat partisipasi pemilih saat Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Proses pemetaan ini penting dilakukan agar kegiatan sosialisasi dapat difokuskan, sehingga kesadaran masyarakat akan terbangun secara aktif untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilihan dengan datang ke TPS menggunakan hak pilih dengan menerapkan protokol kesehatan ;
- b. Pemetaan daerah terpencil, hal ini penting dilakukan agar adanya pemerataan informasi kepada masyarakat yang ada di wilayah terpencil, mengingat sebagian wilayah di kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro masuk dalam kategori ini seperti wilayah kecamatan Siau Barat Utara yang merupakan daerah rawan bencana alam dan juga tidak ada akses jaringan internet. Sehingga dalam menjawab kebutuhan akan pemerataan informasi KPU kabupaten Kepulauan Sitaro hadir melakukan sosialisasi daerah terpencil di wilayah kecamatan Siau Barat Utara untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat.
- c. Pemetaan daerah rawan konflik, berkaca dari pelaksanaan Pilkada pada 2018 dan Pemilu 2019, KPU kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro datang menyapa dan memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan. KPU berkoordinasi secara intens dengan berbagai pihak terkait seperti pemerintah daerah, pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda dan tokoh perempuan untuk bersama-sama mengawal tahapan penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan secara aman, damai dan kondusif.



Dok. Divisi Parmas
KPU Kab. Kepl.
SITARO. Sosialisas
di Daerah Terpencil

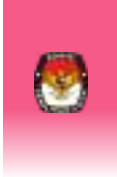
Dok. Divisi
Parmas KPU Kab.
Kepl. SITARO.
Sosialisas di
Daerah Rawan
Konflik



Dok. Divisi Parmas
KPU Kab. Kepl.
SITARO. Sosialisas
di Daerah Partisipasi
Rendah

3. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Bagi Pemilih Pemula

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula yang dikemas dalam kegiatan *KPU Goes To school* dilakukan oleh KPU kabupaten Kepulauan Sitaro dalam sebuah gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang difokuskan pada pemilih pemula. Sejumlah

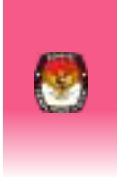


penelitian menunjukkan bahwa mereka yang termasuk dalam kelompok pemilih pemula yang akan menggunakan hak pilihnya pertama kali memasuki usia memilih, memiliki kecenderungan dan pandangan untuk memilih pada pemilu atau pemilihan berikutnya. Disisi yang lain pemilih pemula ini dipandang belum memiliki banyak informasi dan pengetahuan tentang pentingnya pemilu atau pemilihan serta pemahaman yang masih minim terkait dengan teknis pemilihan pada hari pemungutan suara mulai dari surat suara, tata cara menggunakan hak pilih di TPS dan penerapan protokol kesehatan.

Kegiatan *KPU Goes to school* yang gencar dilakukan ke pemilih pemula yang ada diberbagai sekolah SMA/SMK di wilayah kabupaten Kepulauan Sitaro ini dimaksudkan agar adanya transfer pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan politik yang akan membentuk mereka menjadi pemilih pemula yang rasional dan cerdas dalam rangka melahirkan pemimpin politik yang cerdas dan berkualitas. Kegiatan *KPU Goes to school* ini dilakukan di 6 (enam) sekolah SMA/SMK, untuk pemilih pemula yang tidak terjangkau melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara tatap muka disekolah-sekolah, karena adanya pembatasan kegiatan belajar disekolah akibat pandemi *Covid-19*, maka sosialisasi dilakukan dengan memasifkan kegiatan relawan demokrasi basis pemilih pemula untuk menjangkau siswa-siswi yang ada dirumah atau ditempat dimana mereka berkumpul.



Dok. Divisi Parmas
KPU Kab. Kepl.
SITARO. Sosialisas
bagi Pemilih
Pemula di SMK
Buhias

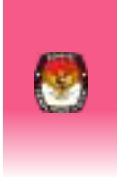


4. Sosialisasi Melalui Media Sosial

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi berbasis internet yang kian pesat dan merambah disemua lini kehidupan, maka kami pun memposisikan media sosial pada posisi yang penting dan strategis dalam memberikan dan mempublikasi informasi tentang tahapan pemilihan kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan partisipasi pemilih. Media sosial merupakan media online berbasis internet yang sangat mendukung aktifitas interaksi sosial ditengah masyarakat. Keberadaan media sosial menjadi penting sebagai sarana yang efektif dalam mendukung proses pendidikan politik. Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19, aktifitas penyelenggara dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dibatasi secara ruang dan waktu, maka

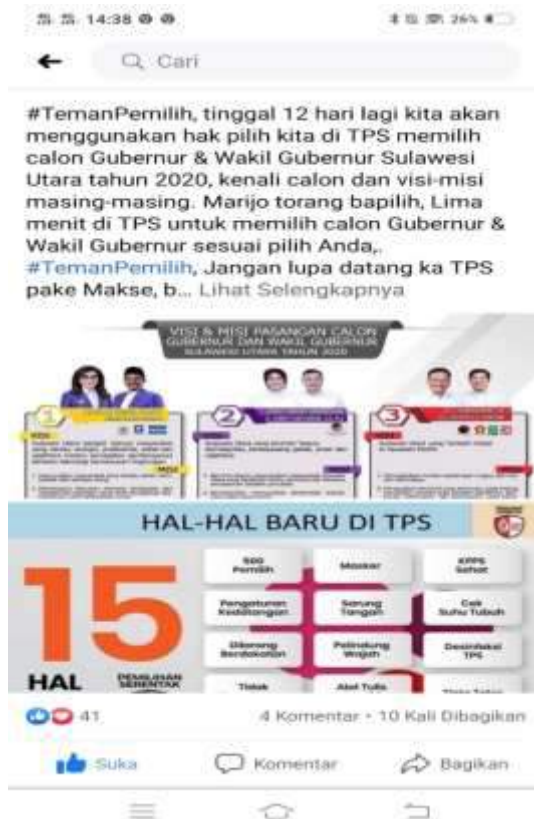
publikasi informasi terkait tahapan penyelenggraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dikemas dalam sebuah tulisan dan gambar yang menarik untuk dipublikasikan secara massif dengan memanfaatkan media sosial KPU kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (facebook dan youtube)





dan media sosial penyelenggara mulai dari anggota KPU, Sekretariat KPU, dan badan *ad hoc* baik itu PPK, PPS dan Sekretariat dan KPPS. Menjelang hari pemungutan suara intensitas penggunaan media sosial ini terus ditingkatkan oleh KPU kabupaten Kepulauan Sitaro bersama dengan jajaran ditingkat *ad hoc* guna menyampaikan pesan, ajakan dan

himbauan kepada semua masyarakat selaku wajib pilih untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, memberikan edukasi dan pemahaman tentang pendidikan politik agar masyarakat nantinya datang ke TPS menggunakan hak konstitusionalnya dan tidak golput.



Sumber : Media Sosial Resmi KPU Kab. Kepl. SITARO

Sosialisasi Serentak di 93 Desa/Kelurahan

Mejelang hari pemungutan suara KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terus bergerak memaksimalkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, tanggal 5 Desember 2020 KPU melaksanakan sosialisasi serentak di 93 desa/kelurahan. Kegiatan ini pun kami



mendelegasikan pelaksanaan kegiatan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS). Untuk peserta PPS diberikan ruang melakukan pemetaan pada wilayah masing-masing untuk mengundang perwakilan dari pemerintah desa/kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kaum perempuan dan masyarakat yang dipandang masih kontra dengan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dengan jumlah peserta 25 orang. Materi kegiatan dikemas oleh KPU dengan menitik beratkan pada teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan penerapan protokol kesehatan serta ajakan dan himbauan untuk menggunakan hak pilih.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua masyarakat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Sitaro yang berjumlah 52.710 yang tersebar di 188 TPS dipastikan mendapatkan informasi secara luas dan benar tentang apa yang akan dipilih disiapkan oleh pemilih dari rumah untuk dibawa ke TPS seperti identitas diri berupa KTP, formulir C. Pemberitahuan, Pulpen dan memakai masker. Pada saat kegiatan sosialisasi pemilih dibekali juga dengan kegiatan simulasi





pemungutan suara dengan protokol kesehatan persis dengan kondisi pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020.

6. Sosialisasi oleh Relawan Demokrasi

Relawan demokrasi merupakan gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Masyarakat diberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta, dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih. Relawan demokrasi digagas dengan melibatkan kelompok masyarakat dari 10 (sepuluh) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi dengan jumlah 30 orang. Pelopor demokrasi yang dibetuk disetiap basis ini kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya.

Dengan adanya program relawan demokrasi ini diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu atau pemilihan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Program relawan demokrasi ini membawa sebuah optimisme untuk mampu mengerakan masyarakat dilingkungan dimana mereka berada, agar mau menggunakan hak pilih dengan cerdas dan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga berimplikasi pada peningkatan partisipasi pemilih dan kualitas hasil pemilihan serentak tahun 2020 untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara lebih baik dari pemilu atau pemilihan sebelumnya. Segmetasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh program sosialisasi dan pendidikan



pemilih yang dilakukan oleh KPU kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Relawan demokrasi dalam melakukan kegiatannya tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta kegiatan.

Satu tantangan yang harus dihadapi oleh para relawan demokrasi dalam melaksanakan tugas dilapangan untuk membantu KPU dalam mensosialisasi tahapan pemilihan kepada masyarakat sesuai komunitasnya adalah kondisi pandemi *Covid-19*. Adanya pembatasan aktifitas masyarakat dalam melakukan kegiatan membuat relawan demokrasi ini harus naik turun rumah dor to dor untuk melakukan kegiatan sosialisasi menjangkau masyarakat sesuai dengan basis komunitasnya. Kondisi ini kemudian tidak mengurunkan niat dan



semangat juang para pelopor demokrasi ini dalam melaksanakan amanah yang mulia ini selama tiga (3) bulan masa kerja, dengan kebesaran hati mereka menyapa dan berdialog

dengan komunitas masyarakat mensosialisasikan tahapan pemilihan, secara seksama dengan materi yang telah disiapkan oleh KPU yang dikemas dalam sebuah modul. Relawan demokrasi ini dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan atribut berupa topi, rompi, kaos, tanda pengenal dan perlengkapan protokol kesehatan seperti masker, sarung tangan, pelindung wajah. Kemudian relawan ini juga sebelum mereka melaksanakan tugas dilakukan pembekalan dan orintasi tugas oleh KPU kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan maksud agar mereka memahami secara utuh tugas dan tanggung jawab



mereka. Adapun perlengkapan yang mereka gunakan sebagai bahan sosialisasi seperti X-Baner, dan brosur yang berisi poin-poin penting mulai dari hari dan tanggal pemilihan, peserta pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur yang dilengkapi foto, visi-misi dan program masing-masing calon. Selain itu juga KPU kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menyiapkan masker kepada masing-masing basis relawan untuk dibagikan pada saat mereka turun sosialisasi ke masyarakat.

7. Pemanfaatan Bahan Sosialisasi

Selain kegiatan sosialisasi melalui media cetak dan online, KPU kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro memanfaatkan ketersediaan anggaran dengan mencetak bahan sosialisasi seperti baliho dan spanduk yang di pasang ditempat strategis dan kemudian brosur, pamflet dan masker dibagikan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mendapat informasi dan selalu ingat bahwa *Rabu 9 Desember 2020* adalah hari pemungutan suara. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya terbatas sampai pada pembuatan dan pembagian bahan sosialisasi, namun secara kelembagaan KPU kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menyurat ke pemerintah desa/kelurahan, pimpinan Gereja, pengurus Masjid untuk berkenan membacakan surat dimaksud melalui pengeras suara yang ada di kantor desa/kelurahan, dibacakan kepada warga jemaat saat selesai ibadah baik di gedung Gereja maupun di Masjid, dimana isi dari surat ini memuat beberapa poin penting tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan meliputi hari tanggal pemilihan, waktu pemungutan suara, nama dan nomor urut peserta pemilihan, tata cara mencoblos, protokol kesehatan di TPS dan himbauan untuk menggunakan hak pilih. Hal ini kemudian dilakukan oleh KPU



kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai bentuk komitmen untuk memberikan dan menyuguhkan informasi secara terbuka dan merata untuk semua lapisan masyarakat.

D. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 ditengah pandemi *Covid-19* telah dilaksanakan oleh KPU kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro secara maksimal dengan ketaatan dan kedisiplinan yang tinggi terhadap protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19*. Berbagai metode sosialisasi kepada masyarakat yang dikemas dan di desain sebagai upaya untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 agar diketahui oleh masyarakat secara luas dengan harapan kesadaran masyarakat akan tumbuh dan berimplikasi pada meningkatnya partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020.

Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak tahun 2020 ditengah wabah pandemi *Covid-19* telah dilaksanakan berjalan dengan aman, lancar dan damai. Tingkat partisipasi pemilih di kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebesar 74 persen, bagi kami KPU selaku penyelenggara capaian angka partisipasi ini sudah sangat baik dan wajar, mengingat pelaksanaan pemilihan diperhadapkan dengan tanggapan yang cukup berat dengan adanya wabah pandemi *Covid-19*. Selain itu pula, tantangan kewilayahan, keterbatasan anggaran, kemudian kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro hanya melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kesuksesan pelaksanaan pemilihan serentak tidak



lepas dari peran semua pihak yang bersinergi membantu KPU kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam menjalankan agenda sosialisasi kepada masyarakat baik pemerintah daerah, TNI/Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers dan masyarakat itu sendiri yang telah berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pemilihan.



SOSIALISASI PEMILIHAN SERENTAK DAN PANDEMI COVID-19

Oleh : Rita Dorondo

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung oleh rakyat dilaksanakan sejak Tahun 2005. Proses penyelenggaraan Pesta Demokrasi ini mengalami beberapa perbaikan mengikuti perubahan UU yang mendasarinya. Pemilihan Serentak 9 Desember 2020, merupakan sejarah demokrasi pada masa Pandemi Covid-19. Hajatan yang awalnya dijadwalkan 23 September 2020, akhirnya bisa terlaksana pada 9 Desember 2020.

Presiden RI Joko Widodo menuturkan, Pandemi Covid-19 tidak ada yang tahu akan berakhir kapan, sehingga Pemilihan Serentak Tahun 2020 harus tetap berjalan. Situasi tidak bisa dibiarkan, penyelenggaraan Pemilihan Serentak harus tetap dilakukan. Tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, Pemilihan Serentak Tahun 2020 akan menjadi sejarah baru, karena untuk pertama kalinya digelar di tengah situasi pandemi. "Ini sejarah pertama ya. Tahun 2020 menjadi pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan di tengah Pandemi Covid-19," beber Arief dalam rilisnya di situs resmi penanganan Covid-19.

Pemilihan Serentak ini merupakan momen penting, karena dalam pelaksanaannya akan menjadi dasar dan pijakan bagi generasi mendatang jika dihadapkan dalam situasi seperti ini, yaitu pandemi Covid-19. "Kebetulan sekarang virusnya *corona*. Suatu saat bisa saja ada virus yang lain. Maka hari ini kita tidak hanya membuat sejarah secara teknis pelaksanaannya, tetapi juga regulasinya. Kemudian,



model pelaksanaannya, kulturnya. Ini penting untuk bisa menjadi model di masa yang akan datang," ucap Arief.

Jika pada tataran nasional, semua pemangku kepentingan menyetujui Pemilihan Serentak Tahun 2020 tetap dilaksanakan di masa Pandemi, bagaimana dengan Provinsi Sulawesi Utara, atau yang lebih spesifik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara? Sebagai penyelenggara Pemilihan Serentak pada tingkat Kabupaten, tidak ada alasan untuk menolak. Justru sebaliknya, wajib mengikuti regulasi yang ditetapkan Pemerintah dan KPU RI, yaitu Pemilihan Serentak tetap dilaksanakan 9 Desember 2020, meski grafik Pandemi Covid-19 terus menunjukkan peningkatan.

Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, sebagai ujung tombak dalam mensosialisasikan, semua tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020, sudah barang tentu harus lebih ekstra hati-hati dalam mensosialisasikan tahapan Pemilihan Serentak kepada masyarakat umum. Dimana protokol kesehatan (memakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan/memakai *handsanitizer*) menjadi syarat mutlak dalam setiap agenda sosialisasi kepada khalayak ramai. Langkah ini ditempuh, karena berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan penyelenggara.

Metode ini juga merupakan pengejawantahan dari PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang ditetapkan 12 Juni 2020, dan dipertegas dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease*



2019 (Covid-19), dan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

Dengan terbitnya regulasi tersebut, KPU Provisi Sulawesi Utara langsung action dengan menyusun Jadwal Sosialisasi Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020. Dimana untuk KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Table
Jadwal Sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2020
KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Lokasi
1.	Minggu, 8 Desember 2019	Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020 Berbasis Komunitas Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kaidipang	Warkop Basudara Jl. Trans Sulawesi Desa Boroko, Waktu : 08.30 – 12.00 Wita
2.	Minggu, 8 Desember 2019	Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020 Berbasis Komunitas Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bolangitang Barat	RM. Laviesta Jl. Trans Sulawesi Desa Kuala Utara Waktu : 13.00 Wita – Selesai
3.	Selasa, 14 Januari 2020	Sosialisasi Rawan Bencana	Warkop Basudara Jl. Trans Sulawesi Desa Boroko Waktu : 08.30 Wita – Selesai



4.	Kamis, 10 September 2020	Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020 Berbasis Komunitas Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bintauna	Kafe Sarjana Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Bintauna Waktu : 15.00 Wita – Selesai
5.	Jumat, 16 Oktober 2020	Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020 Berbasis Komunitas Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bintauna	RM. Salsa Jl. Trans Sulawesi Desa Sampiro Waktu : 13.30 Wita – Selesai
6.	Selasa, 20 Oktober 2020	Sosialisasi Goes to School Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020 di SMK Negeri 1 Sangkub	SMK Negeri 1 Sangkub Jl. Trans Sulawesi Desa Sangkub Waktu : 09.30 Wita Selesai
7.	Kamis, 22 Oktober 2020	Sosialisasi Goes to School Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020 di SMA Negeri 1 Bintauna	SMA Negeri 1 Bintauna, Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Bintauna Waktu : 09.30 Wita – Selesai
8.	Rabu, 28 Oktober 2020	Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020 Berbasis Komunitas Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bolangitang Timur	RM. Puncak Indah Jl. Trans Sulawesi Desa Binuanga Waktu : 08.30 Wita – Selesai
9.	Rabu, 28 Oktober 2020	Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan	RM. Mas Joko Jl. Trans Sulawesi



		Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020 Berbasis Komunitas Tingkat Kecamatan di Kecamatan Pinogaluman	Desa Dengi, Pinogaluman Waktu : 13.30 Wita – Selesai
10.	Selasa, 1 Desember 2020	Sosialisasi Media Gathering	Kediri Café and Resto Jl. Trans Sulawesi, Desa Tote Waktu : 08.00 Wita – Selesai
11.	Selasa, 1 Desember 2020	Sosialisasi Daerah Partisipasi Rendah	Warkop Basudara Jl. Trans Sulawesi, Desa Boroko Waktu : 14.00 Wita – Selesai
12.	Senin, 7 Desember 2020	Sosialisasi Daerah Terpencil	RM. Pogopita Jl. Trans Sulawesi Desa Boroko Waktu : 14.00 Wita – Selesai
13.	Selasa, 8 Desember 2020	Sosialisasi Daerah Rawan Konflik	Warkop ICHA Desa Talaga Tomoago Waktu : 08.00 – 12.00 Wita
14.	Selasa, 8 Desember 2020	Sosialisasi Penyandang Disabilitas	Wisata Mangrove Desa Binuanga, Bolangitang Timur Waktu : 13.00 Wita – Selesai

Sumber: KPU Bolaang Mongondow Utara

Pasca jadwal pelaksanaan sosialisasi Pemilihan Serentak ditetapkan, Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM langsung bergerak. Bertempat di



Cafe Sarjana Kelurahan Bintauna, Kecamatan Bintauna, 10 September 2020, digelar Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020. Dengan Protap Covid-19 yang sangat ketat, kegiatan ini menghadirkan narasumber Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara, Dr.Ardilles Mewoh, dan Yessy Momongan. dan secara langsung dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Djunaidi Harunja, SH.

Foto. Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Djunaidi Harundja SH, sedang memberikan materi dalam Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan 2020 Berbasis Komunitas Tingkat Kecamatan.



Kegiatan ini dihadiri sekira 20 peserta, yang merupakan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di kecamatan tersebut.

Djunaidi dalam sambutannya menyampaikan, sosialisasi ini sebelumnya telah dilaksanakan di dua Kecamatan yakni Kecamatan Kaidipang dan Bolangitan Barat. Sosialisasi ini berkaitan dengan edukasi politik kepada pemilih, dan juga pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Dengan target kesuksesan partisipasi pemilih, yang menyentuh level 77,5persen pada tingkat nasional, menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk terus mensosialisasikan, semua tahapan Pemilihan Serentak



kepada publik. Biar target tersebut dapat dipenuhi, bahkan bukan tidak mungkin dapat dilampaui.

Suksesnya gelaran Pemilihan Serentak ini bukan hanya tugas dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara semata, tetapi menjadi tanggung jawab semua stakeholder, yang ada di Kabupaten Juara (sebutan untuk Bolaang Mongondow Utara). Sebelum gelaran Pemilihan Serentak Tahun 2020 dilaksanakan, terlebih dahulu telah dibentuk Relawan Demokrasi (Relasi) yang juga bertugas mensosialisasikan semua tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 kepada masyarakat.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada 8 Desember 2019, menggelar sosialisasi kepada khalayak ramai. Ini diwujudkan dalam gelaran Sosialisasi Stakeholder (para pemangku kepentingan) tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tentang Pencalonan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Tahun 2020, bertempat di Lavista Cafe Desa Kuala Utara.

Dalam kegiatan tersebut terungkap bahwa, hasil Pilkada Tahun 2019 partisipasi masyarakat politik untuk Pemilihan Umum mencapai 83persen, melampaui dari target yang ditetapkan secara nasional. Ini tentunya menjadi landasan kesadaran politik dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020. Proses ini penting disosialisasikan terus-menerus oleh penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020. "Kehadiran bapak ibu dari unsur pengurus parpol, organisasi masyarakat, LSM, serta para pemerhati Pemilihan Serentak Tahun 2020, ikut memberi andil positif" ujar Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Rita Sophia Darondo.

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Dr. Ardiles Mewoh, yang hadir dalam kegiatan tersebut memberikan apresiasi tersendiri terhadap



penyelenggaraan Pilkada Tahun 2019, dimana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada diatas 89persen dalam keikutsertaan wajib pilih memilih dan memilah wakil rakyatnya, dengan raihan 83persen. Sementara untuk Pilkada Bolaang Mongondow Utara, nagkring pada strip 91persen, atau berada diatas target nasional, sehingga KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masuk urutan kelima secara nasional daerah penyelenggara Pilkada.

Disamping jalur perseorangan, jalur Parpol atau koalisi Parpol, adalah media yang dapat ditempuh para bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk bisa terakomodir dalam hajatan Pemilihan Serentak. Untuk menjadi kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020, harus memperoleh dukungan 19.812 foto copy KTP-elektronik, dan minimal memperoleh dukungan di 8 (delapan) daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara, yang jika dibagi akan memperoleh dukungan 24.000 foto copy KTP-elektronik setiap daerah pemilihan. Meski demikian, ada pengecualian dalam memberikan dukungan kepada bakal calon peseorangan, yang otomatis dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yakni: calon peseorangan dengan dukungan KTP-elektronik yang berasal dari anggota TNI- Polri, PNS, Kepala Desa atau perangkat desa, yang masih aktif. Setelah memperoleh dukungan via KTP-elektronik, langkah selanjutnya yang dilakukan bakal calon adalah, mengisi Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, surat pernyataan dukungan setiap pendukung yang ditempel foto copy KTP-elektronik yang dilampiri surat keterangan.

Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, (jaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan/pakai *handsanitizer*) sosialisasi ini dihadiri oleh Perwira Penghubung Kodim 1303 Kodim BM Mayor Inf. Nus; Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara diwakili Kasie



DATUN, Kapolres Bolaang Mongondow Utara yang diwakili AKP Saiful Tammu, Kasie Intel Polres Bolaang Mongondow Utara AKP Noldi Harimu, S.Pd, Staf Kesbangpol Pemkab Bolaang Mongondow Utara Hamsah Lantapon, Ketua Partai Persatuan Pembangunan (P3) Sidik Binol, Sekretaris P3 Hamza Datukramat, Sekretaris PDI-P Bolaang Mongondow Utara Zamad Lauma, Wakil Ketua PDI-P Carles Sumaili dan Max Takumansang, Pengurus PAN Bolaang Mongondow Utara Abd. Kadir Hangkiho.

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada 28 Oktober 2020 juga menggelar Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020 Berbasis Komunitas Tingkat Kecamatan, bertempat di RM Puncak Indah Desa Binuanga. Kecamatan Bolangitang Timur. Gelaran ini



Foto. Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Rita Sophia Darondo, sedang memberikan materi dalam Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan 2020 Berbasis Komunitas Tingkat Kecamatan

sasarannya adalah menjangkau semua lapisan masyarakat, agar partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi benar-benar tersalurkan sesuai dengan amanat konstitusi. Jadi, bukan hanya secara kuantitas, tapi secara kualitas, dalam arti kata selain datang ke TPS, pemilih juga memberikan atau menyalurkan hak pilihnya secara sah. Salah satu



amanah terpenting yang dititipkan dalam sosialisai tersebut adalah, agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban menjelang dan setelah pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Jadilah pemilih yang cerdas, bangunlah negeri ini dengan sikap politik yang bijak dan cerdas, tanpa anarkis.

Untuk lebih memantapkan program-program yang telah disusun, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggandeng wartawan, dalam mesosialisasikan semua tahapan Pemilihan Serentak ini. Keterlibatan para jurnalis ini diwujudkannyatakan dalam bentuk *Media Gathering*, yang digelar pada 1 Desember 2020 bertempat di Kediri Café, Desa Tote Kecamatan Bolangitang Barat.

Dengan situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 yang belum mereda, keterlibatan para kuli tinta ini, menjadi salah satu media yang sangat efektif, dalam melakukan sosialisasi. Media online misalnya, dengan cakupan yang sangat luas, otomatis bisa menjangkau seluruh masyarakat, terutama pemilih pemula pengguna *gadget*, yang doyan berselancar di dunia maya.

Dalam *Media Gathering* tersebut juga disampaikan 15 hal baru saat berada di TPS yakni: dalam setiap TPS hanya dibatasi maksimal 500 orang, pemilih menggunakan masker, KPPS harus sehat, pengaturan kedatangan peserta pemilih, menggunakan sarung tangan, mengecek suhu tubuh badan, dilarang berdekatan, menggunakan pelindung wajah, desinfeksi TPS, tidak bersalaman, menggunakan alat tulis sendiri, bilik khusus, tinta tetes, mencuci tangan dan yang terakhir menyediakan tissue kering.



Foto. Ketua Divisi Sosdiklih,
Parmas, dan SDM KPU
Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Rita
Sophia Darondo, didampingi
Praktisi Media Islan Tabo,
S.Sos, M.Si (masker putih),
saat memberikan materi
dalam Media Gathering
dengan para wartawan
media cetak dan online.



Yang tak kalah menarik adalah, ketika KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, PPK, PPS, plus Relasi pada 18 November 2020 menyambangi Unit Pemukiman Tertinggal Daerah (UPTD) Goyo, yang masuk dalam kategori wilayah terpencil bercirikan tanpa listrik, dan jaringan cellular phone. Goyo bukanlah sebuah Desa, namanya adalah Unit Pemukiman Tertinggal Daerah (UPTD) Goyo, yang merupakan bagian dari Desa Ollot 2, Kecamatan Bolangitang Barat, Kecamatan Bolangitang Barat, Bolaang Mongondow Utara. Dimana untuk sampai ke daerah ini membutuhkan tenaga ekstra, pertama harus melewati sungai tanpa jembatan, plus melewati jalan terjal berkelok dipenuhi batu dengan diameter, kecil, sedang, dan besar.



**MEMEGANGI TALI
TAMBANG:**

Foto. Ketua Divisi
Sosdiklih, Parmas, dan
SDM, Rita S Darondo,
Relawan Demokrasi
(RELASI), dan warga
yang akan ke UPTD Goyo,
juga menggunakan rakit
sebagai media untuk
menyeberangi sungai.

Kondisi alam yang kurang bersahabat ini, menjadi tantangan tersendiri bagi Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM untuk menaekkannya. Meski demikian, protap kesehatan (jaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan/pakai *handsanitizer*), menjadi lagu wajib yang selalu dikumandangkan dalam melakukan sosialisasi, mengingat bencana non alam berupa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, lagi mewabah di seantero dunia.

Keunikan UPTD Goyo, ternyata bukan hanya menjadi magnet bagi Divisi Parmas dan SDM, jajaran kepolisian juga menjadikan area transmigran ini, sebagai wilayah yang mendapatkan perhatian khusus. Buktinya, pada 8 Desember 2020 atau sehari jelang hari pencoblosan, Kapolres Bolaang Mongondow Utara AKBP. Wahyu Purdiwiarso, SH, S.IK, turun langsung ke lapangan dengan menaiki rakit, memantau dan mengawal distribusi logistik ke UPTD Goyo. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan pergeseran logistik pemilu benar-benar aman dan steril, mulai dari Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hingga UPTD Goyo.

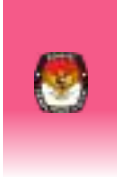


**MELEWATI
SUNGAI:**

Foto. Jajaran
Kepolisian Polres
Bolaang Mongondow
Utara dibawah
komando Kapolres
AKBP. Wahyu
Purdiwarso, SH,
S.IK, turun langsung
ke lapangan dengan
menaiki rakit,
memantau dan
mengawal distribusi
logistik ke UPTD
Goyo.



Porsi khusus yang diberikan Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM terhadap UPTD Goyo, ternyata membuahkan hasil positif, meski tidak terlalu signifikan, Berdasarkan data dan fakta, dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 yang digelar 9 Desember 2020, warga UPTD Goyo yang memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT (*Model A3-KWK*) sebanyak 197 orang, sementara yang datang ke TPS 002 Desa Ollot 2, dan menyalurkan hak politiknya sebanyak 136 orang, atau setara 69,03persen. Berikut tabel jumlah DPT dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, Desa Ollot 2, TPS 002 (UPTD Goyo).



Table

Jumlah DPT dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, Desa Ollot 2, TPS 002 (UPTD Goyo)

1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	105
		PR	92
		JML	197
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>)	LK	2
		PR	2
		JML	4
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	5
		PR	2
		JML	7
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	112
		PR	96
		JML	208

PENGGUNA HAK PILIH			
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	67
		PR	58
		JML	125
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>) yang menggunakan hak pilihnya	LK	2
		PR	2
		JML	4
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	5
		PR	2
		JML	7
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	74
		PR	62
		JML	136

Sumber: KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Sementara itu untuk skala yang lebih luas, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berhasil menorehkan tinta emas dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020. Dimana jika pada Pilkada Tahun 2015



tingkat partisipasi pemilih berada pada leve 66,22persen, maka pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 menyentuh strip 77,52persen, atau meningkat 11,3persen. Angka ini juga melampaui target nasional, dengan presentase 77,50persen. Berikut disajikan Jumlah DPT dan Pengguna Hak Pilih pada gelaran Pilkada Tahun 2015 dan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Tabel
Jumlah DPT dan Pengguna Hak Pilih pada Pilkada Tahun 2015

No	Uraian	Kecamatan							Jlh
		Bintauna	Bolangitang Barat	Bolangitang Timur	Kaidipang	Pinogaluman	Sangkub		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A Data Pemilih									
1	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	L	5.221	5.576	5.214	4.875	4.123	3.641	28.710
		P	4.969	5.184	5.123	4.751	3.937	3.415	27.379
		Jlh	10.190	10.760	10.397	9.626	8.060	7.056	56.089
2	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb) 1	L	10	19	22	36	10	5	102
		P	17	25	18	22	10	5	97
		Jlh	27	44	40	58	20	10	199
3	Pemilih terdaftar dalam Pemilih Pindahan (DPPH)	L	2	8	1	2	1	1	15
		P	1	6	2	2	0	1	12
		Jlh	3	14	3	4	1	2	27
4	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb) 2 pengguna KTP/identitas lainnya	L	9	12	21	27	11	3	83
		P	10	16	18	26	14	5	89
		Jlh	19	28	39	53	25	8	172
5	Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	L	5.242	5.615	5.318	4.940	4.145	3.650	28.910
		P	4.997	5.231	5.161	4.801	3.961	3.426	27.577
		Jlh	10.239	10.846	10.479	9.741	8.106	7.076	56.487
B Pengguna Hak Pilih									
1	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	L	3.204	3.463	3.007	3.165	2.863	2.335	18.037
		P	3.514	3.504	3.285	3.216	3.039	2.493	19.051
		Jlh	6.718	6.967	6.292	6.381	5.902	4.828	37.088
2	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb) 1	L	5	12	14	12	7	2	52
		P	7	17	11	7	7	2	51
		Jlh	12	29	25	19	14	4	103
3	Pemilih terdaftar dalam Pemilih Pindahan (DPPH)	L	2	8	1	2	1	1	15
		P	1	6	2	2	0	1	12
		Jlh	3	14	3	4	1	2	27
4	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb) 2 pengguna KTP/identitas lainnya	L	9	12	21	27	11	3	83
		P	10	16	18	26	14	5	89
		Jlh	19	28	39	53	25	8	172
5	Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	L	3.220	3.495	3.043	3.206	2.882	2.341	18.187
		P	3.532	3.543	3.316	3.251	3.060	2.501	19.203
		Jlh	6.752	7.038	6.395	6.457	5.942	4.842	37.390

Sumber: KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



Tabel
Jumlah DPT dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan
Serentak Tahun 2020

No	Uraian	Kecamatan						Jlh	
		Sangkul	Bintauna	Bolangitang Timur	Bolangitang Barat	Kaidipang	Pinogaluman	Total	
								1	2
A Data Pemilih									
1	Jumlah Pemilih Dalam DPT (Model A-3 KWK)	L	3.742	5.313	5.438	5.815	4.959	4.201	29.468
		P	3.580	5.043	5.125	5.505	4.867	4.083	28.203
		Jlh	7.322	10.356	10.563	11.320	9.826	8.284	57.671
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	L	6	9	2	17	10	6	50
		P	4	7	6	13	22	4	56
		Jlh	10	16	8	30	32	10	106
3	Jumlah Pemilih tidak Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilih dengan e-KTP atau Surat Keterangan (DPTb)	L	36	50	32	43	77	28	266
		P	45	44	43	37	83	46	298
		Jlh	81	94	75	80	160	74	564
4	Jumlah Pemilih (A1+A2+A3)	L	3.784	5.372	5.472	5.875	5.046	4.235	29.784
		P	3.629	5.094	5.174	5.555	4.972	4.133	28.557
		Jlh	7.413	10.466	10.646	11.430	10.018	8.368	58.341
B Pengguna Hak Pilih									
1	Jumlah Pemilih dalam DPT	L	2.664	3.785	3.704	4.217	3.815	3.357	21.542
		P	2.924	4.104	4.005	4.373	3.981	3.560	22.947
		Jlh	5.588	7.889	7.709	8.590	7.796	6.917	44.489
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang Menggunakan Hak Pilih	L	5	7	1	15	10	5	43
		P	4	6	3	11	22	2	48
		Jlh	9	13	4	26	32	7	91
3	Jumlah Pemilih tidak Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilih dengan e-KTP atau Surat Keterangan (DPTb)	L	36	50	32	43	77	28	266
		P	45	44	43	37	83	46	298
		Jlh	81	94	75	80	160	74	564
4	Jumlah Pemilih (B1+B2+B3)	L	2.705	3.842	3.737	4.275	3.902	3.390	21.851
		P	2.973	4.154	4.051	4.421	4.086	3.608	23.293
		Jlh	5.678	7.996	7.788	8.696	7.988	6.998	45.144

Sumber: KPU Bolaang Mongondow Utara

Berdasarkan data diatas, tergambar dengan jelas bahwa: Pemilih dalam DPT pada Pilkada Tahun 2015 berjumlah 56.089. Angka ini mengalami peningkatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, dimana jumlahnya mencapai 57.671. Raihannya ini berbanding lurus dengan partisipasi masyarakat yang mendatangi TPS dan menyalurkan hak politiknya pada hari H. Pada Pilkada Tahun 2015, pemilih yang menggunakan hak pilih mencapai 37.390. Capaian ini mengalami peningkatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang mencapai 45.144. (***)



Bab 3

Keunikan SOSIALISASI Loka



DARI GOYO UNTUK PEMILIH BERDAULAT

Oleh: Rita Dorondo

Keringat yang menetes ditambah terpaan teriknya sinar matahari, tak menghalangi senyum yang tersungging dibibirnya, kala menyapa kami: Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, PPK, PPS, plus Relawan Demokrasi pada 18 November 2020. Dari raut wajahnya terpancar aura kegembiraan, baginya kehadiran kami, berarti rezeki bagi dirinya. Dari atas rakit yang terbuat dari anyaman bambu, Syamsuddin (40), warga Desa Ollo 2, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, mulai bercerita tentang profesinya sebagai pengayuh rakit, demi membantu masyarakat yang dari dan akan ke Goyo.

Untuk melintasi sungai dengan diameter 30 meter tersebut, Syamsuddin tidak memerlukan perahu atau sejenisnya. Ia hanya mengandalkan sepotong kayu dengan panjang 5 meter, plus seutas tali tambang yang terbentang dan diikatkan pada pohon di kedua sisi sungai, yang dijadikan tumpuan untuk menggerakkan rakit. Tarifnya-pun murah meriah, hanya dengan uang Rp. 5.000,- per orang, kita bisa melintasi sungai tersebut, dengan aman dan nyaman.

Goyo bukanlah sebuah Desa, namanya adalah Unit Pemukiman Tertinggal Daerah (UPTD) Goyo, yang merupakan bagian dari Desa Ollo 2, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Oleh Pemerintah



Relawan Demokrasi saat
melakukan sosialisasi di Goyo.



Republik Indonesia dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) pada tahun 2004 dijadikan area transmigrasi untuk warga Probolinggo, Jawa Timur. Untuk mencapai UPTD Goyo, diperlukan perjuangan ekstra. Bukan apa-apa, disamping harus melewati sungai tanpa jembatan, juga harus melintasi jalan setapak yang terjal dan berkelok, penuh dengan bebatuan yang diameter kecil, sedang, dan besar. Karena kondisi Geografis yang terbilang cukup ekstrim, dan ditamba dengan ketiadaan jaringan PLN plus *cellular phone*, maka KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dalam hal ini Divisi Parmas dan SDM, menjadikan UPTD Goyo, sebagai fokus untuk mensosialisasikan tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020, untuk Wilayah Terpencil.



Sosialisasi di Daerah
UPTD Goyo



Kondisi alam yang kurang bersahabat ini, menjadi tantangan tersendiri bagi Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM untuk menaklukkannya. Meski demikian, protap kesehatan (jaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan/pakai *handsanitizer*), menjadi lagu wajib yang selalu dikumandangkan dalam melakukan sosialisasi, mengingat bencana non alam berupa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), lagi mewabah di seantero dunia. Metode ini juga merupakan pengejawantahan dari PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang ditetapkan pada 12 Juni 2020, dan dipertegas dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

ANTUSIASME WARGA:

Keunikan UPTD Goyo, ternyata bukan hanya menjadi magnet bagi Divisi Parmas dan SDM, jajaran kepolisian juga menjadikan area transmigran ini, sebagai wilayah yang mendapatkan perhatian khusus. Buktinya pada 8 Desember 2020, atau sehari jelang hari pencoblosan, Kapolres Kabupaten Bolaang Mongondow Utara AKBP. Wahyu Purdiwarso, SH, S.IK, turun langsung ke lapangan dengan menaiki rakit, memantau dan mengawal distribusi logistik ke UPTD Goyo.



FOTO. Kehadiran tim dari Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, PPK, PPS, dan tim Relawan Demokrasi (RELASI) di UPTD Goyo yang akan melakukan sosialisasi disambut dengan suka cita, terbukti dengan suguhan menu makan siang yang menggugah selera.



Tindakan ini dilakukan untuk memastikan pergeseran logistik pemilu benar-benar aman dan steril, mulai dari Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hingga UPTD Goyo.

Porsi khusus yang diberikan Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM terhadap UPTD Goyo, ternyata membuahkan hasil positif, meski tidak terlalu signifikan. Berdasarkan data dan fakta, dalam gelaran Pemilihan Serentak Tahun 2020, warga UPTD Goyo yang memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT (*Model A3-KWK*) sebanyak 197 orang, sementara yang datang ke TPS 002 Desa Ollot 2, dan menyalurkan hak politiknya sebanyak 136 orang, atau setara 69,03persen. Dengan raihan presentase tersebut, pantaslah disematkan kalimat “*Dari Goyo untuk Pemilih Berdaulat*”



MELEWATI SUNGAI:

FOTO. Jajaran Kepolisian Polres Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dibawah komando Kapolres AKBP. Wahyu Purdiwarso, SH, S.IK, turun langsung ke lapangan dengan menaiki rakit, memantau dan mengawal distribusi logistik ke UPTD Goyo.



Berikut tabel jumlah DPT dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, Desa Ollot 2, TPS 002 (UPTD Goyo).

Table
Jumlah DPT dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, Desa Ollot 2, TPS 002 (UPTD Goyo)

1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	105
		PR	92
		JML	197
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>)	LK	2
		PR	2
		JML	4
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	5
		PR	2
		JML	7
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	112
		PR	96
		JML	208

PENGGUNA HAK PILIH			
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	67
		PR	58
		JML	125
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>) yang menggunakan hak pilihnya	LK	2
		PR	2
		JML	4
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	5
		PR	2
		JML	7
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	74
		PR	62
		JML	136

Sumber: KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



Table
**Jumlah DPT dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan
Serentak Tahun 2020, Desa Ollot 2, TPS 002 (UPTD Goyo)**

1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	105
		PR	92
		JML	197
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>)	LK	2
		PR	2
		JML	4
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	5
		PR	2
		JML	7
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	112
		PR	96
		JML	208

PENGGUNA HAK PILIH			
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	67
		PR	58
		JML	125
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>) yang menggunakan hak pilihnya	LK	2
		PR	2
		JML	4
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	5
		PR	2
		JML	7
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	74
		PR	62
		JML	136

Sumber: KPUD Bolaang Mongondow Utara

Secara Komprehensif Jumlah DPT dan Pengguna Hak Pilih pada Pilkada Tahun 2015, Pemilihan Serentak Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel
Jumlah DPT dan Pengguna Hak Pilih pada Pilkada Tahun
2015

No	Uraian	Kecamatan						Jlh Total	
		Bintauna	Bolangtang Barat	Bolangtang Timur	Kaidipang	Pinogahuman	Sangkub		
		1	2	3	4	5	6		7
A Data Pemilih									
1	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	L	5.221	5.576	5.214	4.875	4.123	3.641	28.710
		P	4.969	5.184	5.123	4.751	3.937	3.415	27.379
		Jlh	10.190	10.760	10.397	9.626	8.060	7.056	56.089
2	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb) 1	L	10	19	22	36	10	5	102
		P	17	25	18	22	10	5	97
		Jlh	27	44	40	58	20	10	199
3	Pemilih terdaftar dalam Pemilih Pindahan (DPPh)	L	2	8	1	2	1	1	15
		P	1	6	2	2	0	1	12
		Jlh	3	14	3	4	1	2	27
4	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb) 2 pengguna KTP/identitas lainnya	L	9	12	21	27	11	3	83
		P	10	16	18	26	14	5	89
		Jlh	19	28	39	53	25	8	172
5	Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	L	5.242	5.615	5.318	4.940	4.145	3.650	28.910
		P	4.997	5.231	5.161	4.801	3.961	3.426	27.577
		Jlh	10.239	10.846	10.479	9.741	8.106	7.076	56.487

B Pengguna Hak Pilih									
1	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	L	3.204	3.463	3.007	3.165	2.863	2.335	18.037
		P	3.514	3.504	3.285	3.216	3.039	2.493	19.051
		Jlh	6.718	6.967	6.292	6.381	5.902	4.828	37.088
2	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb) 1	L	5	12	14	12	7	2	52
		P	7	17	11	7	7	2	51
		Jlh	12	29	25	19	14	4	103
3	Pemilih terdaftar dalam Pemilih Pindahan (DPPh)	L	2	8	1	2	1	1	15
		P	1	6	2	2	0	1	12
		Jlh	3	14	3	4	1	2	27
4	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb) 2 pengguna KTP/identitas lainnya	L	9	12	21	27	11	3	83
		P	10	16	18	26	14	5	89
		Jlh	19	28	39	53	25	8	172
5	Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	L	3.220	3.495	3.043	3.206	2.882	2.341	18.187
		P	3.532	3.543	3.316	3.251	3.060	2.501	19.203
		Jlh	6.752	7.038	6.395	6.457	5.942	4.842	37.390

Sumber: KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



Jumlah DPT dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020

No	Uraian	Kecamatan						Jlh total	
		Sangkub	Bintauna	Bolangtang Timur	Bolangtang Barat	Kaidipang	Pinogaluman		
		1	2	3	4	5	6		7
A	Data Pemilih								
1	Jumlah Pemilih Dalam DPT (Model A-3 KWK)	L	3.742	5.313	5.438	5.815	4.959	4.201	29.468
		P	3.580	5.043	5.125	5.505	4.867	4.083	28.203
		Jlh	7.322	10.356	10.563	11.320	9.826	8.284	57.671
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	L	6	9	2	17	10	6	50
		P	4	7	6	13	22	4	56
		Jlh	10	16	8	30	32	10	106
3	Jumlah Pemilih tidak Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilih dengan e-KTP atau Surat Keterangan (DPTb)	L	36	50	32	43	77	28	266
		P	45	44	43	37	83	46	298
		Jlh	81	94	75	80	160	74	564
4	Jumlah Pemilih (A1+A2+A3)	L	3.784	5.372	5.472	5.875	5.046	4.235	29.784
		P	3.629	5.094	5.174	5.555	4.972	4.133	28.557
		Jlh	7.413	10.466	10.646	11.430	10.018	8.368	58.341
B	Pengguna Hak Pilih								
1	Jumlah Pemilih dalam DPT	L	2.664	3.785	3.704	4.217	3.815	3.357	21.542
		P	2.924	4.104	4.005	4.373	3.981	3.560	22.947
		Jlh	5.588	7.889	7.709	8.590	7.796	6.917	44.489
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang Menggunakan Hak Pilih	L	5	7	1	15	10	5	43
		P	4	6	3	11	22	2	48
		Jlh	9	13	4	26	32	7	91
3	Jumlah Pemilih tidak Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilih dengan e-KTP atau Surat Keterangan (DPTb)	L	36	50	32	43	77	28	266
		P	45	44	43	37	83	46	298
		Jlh	81	94	75	80	160	74	564
4	Jumlah Pemilih (B1+B2+B3)	L	2.705	3.842	3.737	4.275	3.902	3.390	21.851
		P	2.973	4.154	4.051	4.421	4.086	3.608	23.293
		Jlh	5.678	7.996	7.788	8.696	7.988	6.998	45.144

Sumber: KPU Bolaang Mongondow Utara

Berdasarkan data diatas, tergambar dengan jelas bahwa: Pemilih dalam DPT pada Pilkada Tahun 2015 berjumlah 56.089. Angka ini mengalami peningkatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, dimana jumlahnya mencapai 57.671. Raihan ini berbanding lurus dengan partisipasi masyarakat yang mendatangi TPS dan menyalurkan hak politiknya pada hari H. Pada Pilkada Tahun 2015, pemilih yang menggunakan hak pilih mencapai 37.390 atau setara 66,22persen. Capaian ini mengalami peningkatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang mencapai 45.144 setara 77,52 persen. Angka ini melampaui target nasional yakni 77,50 persen (***)



DARI RIUHNYA LOLAK HINGGA KESUNYIAN POMOMAN
*Potret Sosialisasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pilgub
Sulut Tahun 2020*

Oleh : Hasrul Dumambow
Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow

Tujuan Sosialisasi

Sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam pemilihan bertujuan²:

1. *Sharing*, menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, program dan jadwal pemilihan
2. *Knowledge*, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan
3. *Participation*, meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

Selama ini pemahaman masyarakat terkait pemilihan hanya sebatas pada hari pelaksanaannya, belum sampai pada substansinya. Masyarakat belum memahami secara utuh nilai dasar demokrasi. Masyarakat perlu diedukasi agar menjadi pemilih yang aktif terlibat dalam setiap tahapan. Tujuan utama dari sosialisasi pemilihan yaitu membangun kesadaran masyarakat terkait penggunaan hak pilih secara rasional tanpa embel-embel maupun atribut tertentu. Selain itu

² Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Pasal 3.



masyarakat juga diharapkan ikut terlibat sebagai agen dalam menyosialisasikan tahapan pemilihan.

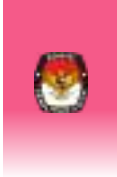
Gambaran Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

Kabupaten Bolaang Mongondow adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dengan Ibu kota adalah Lolak. Etnis mayoritas adalah Suku Mongondow. Bahasa ibu penduduk asli adalah Bahasa Mongondow. Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan pada tanggal 23 Maret 1954, terletak pada salah satu daerah Sulawesi Utara yang merupakan daerah subur penghasil utama beras serta dan hasil bumi lainnya serta daerah pertambangan mineral berupa emas.

Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengalami sejumlah pemekaran. Tahun 2007 dimekarkan menjadi Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada tahun 2008 dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari 15 Kecamatan, 2 Kelurahan dan 200 Desa. Pada tahun 2019, jumlah penduduknya mencapai 250.783 jiwa dengan luas wilayah 3.517,47 km² dan sebaran penduduk 71,3 jiwa/km².³

³<https://bolmongkab.bps.go.id/publication/>



Gambar Peta Kabupaten Bolaang Mongondow



(Sumber:
<https://peta-kota.blogspot.com/2017/02/peta-kabupaten-bolaang-mongondow.html>)

Potret Partisipasi Pemilih PerKecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Pilkada Tahun 2015 dan Pemilihan Tahun 2020

Tingkat partisipasi pemilih masih menjadi ukuran utama kesuksesan penyelenggaraan pemilihan, angka partisipasi pemilih di Kabupaten Bolaang Mongondow mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Tabel berikut ini untuk melihat partisipasi pemilih perkecamatan pada Pilkada tahun 2015 dan Pemilihan tahun 2020:

Tabel 1
Partisipasi Pemilih Pilgub Sulut Tiap Kecamatan Bolaang Mongondow Tahun 2015 dan Tahun 2020

No	Kecamatan/ Kabupaten	Tahun 2015			Tahun 2020			Kenaikan Tingkat Partisipasi Pemilih
		Tingkat Partisipasi (%)			Tingkat Partisipasi (%)			
		Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bilalang	45,27	49,7	47,4	73,8	80,14	76,82	29,42
2	Bolaang	41,62	47,2	44,32	76,19	84,28	80,08	35,76
3	Bolaang Timur	54,63	63,79	59,16	79,31	88,77	83,99	24,83
4	Dumoga	53,78	59,11	56,33	73,43	80,86	76,95	20,62



5	Dumoga Barat	50,39	52,17	51,24	75,7	82,08	78,77	27,53
6	Dumoga Tengah	50,77	53,93	52,31	77,77	81,37	79,52	27,21
7	Dumoga Tenggara	59,64	63,45	61,46	82,66	86,75	84,62	23,16
8	Dumoga Timur	55,94	58,13	57	74,36	76,76	75,52	18,52
9	Dumoga Utara	54,95	54,7	54,83	73,37	78,04	75,64	20,81
10	Lolak	51,65	57,31	54,35	72,58	82,11	77,17	22,82
11	Lolayan	49,57	56,35	52,79	74,96	83,31	78,98	26,19
12	Passi Barat	50,62	57,16	53,75	76,7	83,14	79,81	26,06
13	Passi Timur	55,4	57,66	56,47	80,62	86,62	83,48	27,01
14	Poigar	48,13	50,04	49,06	73,24	79,85	76,44	27,38
15	Sang Tombolang	52,54	60,18	56,2	79,25	84,54	81,82	25,62
	Bolaang Mongondow	51,28	55,67	53,39	75,65	82,27	78,85	25,45

(Sumber: Diolah dari berbagai sumber)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2015 sebesar 53,39 persen dan pada Pemilihan tahun 2020 sebesar 78,85 persen, ada kenaikan partisipasi pemilih yang sangat signifikan yaitu sebesar 25,45 persen.
2. Peningkatan partisipasi pemilih bervariasi tiap kecamatan. Peningkatan partisipasi pemilih tertinggi adalah Kecamatan Bolaang yaitu 35,76 persen, sedangkan terendah adalah Kecamatan Dumoga Timur yaitu 18,52 persen.
3. Terdapat sembilan kecamatan yang peningkatan partisipasinya melebihi peningkatan partisipasi pemilih Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Kecamatan, Bolaang (35,76 persen), Kecamatan Bilalang (29,42 persen), Kecamatan Dumoga Barat (27,53 persen), Kecamatan Poigar (27,38 persen), Kecamatan Dumoga Tengah (27,21 persen), Kecamatan Passi Timur (27,01 persen), Kecamatan Lolayan (26,19 persen), Kecamatan Passi Barat (26,06 persen) dan Kecamatan Sang Tombolang (25,62 persen).



Program Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih



Sosialisasi pola new normal: Sosialisasi *via daring* KPU Bolaang Mongondow (Bolmong) bersama Stakeholder, Foto: Subbagian Tekmas KPU Bolmong

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai bagian dari hierarki KPU Propinsi Sulawesi Utara mempunyai tanggungjawab untuk menyosialisasikan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020. Berbagai kegiatan sosialisasi dilakukan sebagai upaya menyebarluarkan informasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020.

Sejak KPU memutuskan melanjutkan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di bulan Juni 2020, maka ini merupakan pemilihan pertama di Indonesia dilakukan di tengah serangan virus yang cepat menular dan mematikan. Biasanya hal baru segala sesuatunya menjadi serba sulit untuk dilaksanakan. Hal pertama dilakukan adalah menginformasikan ini kepada *stakeholder* di level kabupaten yaitu Pemerintah Daerah, Pimpinan Parpol, Bawaslu, TNI/POLRI, dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan. Sosialisasi perdana dilakukan secara *virtual*. Inilah yang dimaksud serba sulit, lazimnya sosialisasi



secara tatap muka karena pandemi sosialisasi dilakukan dengan media *daring*. Sosialisasi perdana ini adalah *trial and error* sebelum KPU Bolaang Mongondow turun sosialisasi kepada masyarakat umum. Sosialisasi perdana ini terkait tahapan lanjutan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020. Alasan mengapa Pilkada tetap dilanjutkan walaupun ditengah kepungan virus mematikan, tahapan-tahapan yang ditunda kemudian dilanjutkan kembali serta tahapan-tahapan lainnya sebagaimana tercantum di PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Banyak kendala ditemui, biasanya bertatap muka langsung karena *virtual* hanya bertemu di layar 14 *inchi* itupun jika menggunakan *laptop*, jika hanya *handphone* tentu saja lebih kecil lagi. Kendala lainnya jaringan internet, *audio* dan *visual* yang kurang baik apalagi ketersediaan pulsa data bagi peserta (tidak ada biaya pengganti pulsa). Dari 50 orang yang di undang yang bergabung tidak sampai setengahnya.

Sosialisasi virtual memang tidak efektif, maka sosialisasi berikut kepada masyarakat umum dilakukan secara tatap muka, kendalanya beda dengan virtual. Jika dengan virtual protokol kesehatan mudah sekali diterapkan karena tidak bertemu secara langsung. Sosialisasi secara tatap muka protokol kesehatan harus diterapkan, menyiapkan tempat cuci tangan (*handsanitizer*), memakai masker, menjaga jarak sesama peserta. Inilah kenormalan dalam situasi pandemi saat akan bertemu dengan masyarakat umum secara *face to face*.



1. Sosialisasi Basis Komunitas Tingkat Kecamatan



Sosialisasi tatap muka: Sosialisasi Basis Komunitas Tingkat Kecamatan, Foto: Subbagian Tekmas KPU Bolmong

Pasca evaluasi sosialisasi virtual yang dirasakan tidak efektif, langkah sosialisasi berikutnya harus dilakukan dengan tatap-muka. KPU Bolaang Mongondow menyusun program kegiatan sosialisasi tingkat kecamatan dengan memetakan wilayah menjadi 3 bagian yaitu wilayah Dumoga Raya, Passi-Lolayan dan Pantura (Pantai Utara). Maka yang disasar pertama untuk sosialisasi adalah wilayah terjauh dari Ibukota Lolak yaitu Dumoga Raya. Strategi mendahulukan wilayah yang jauh dimaksudkan agar ketika tahapan terus berjalan mendekati hari H pencoblosan di tanggal 9 Desember 2020 kegiatan sosialisasi tidak terganggu dengan tahapan yang lainnya. Semakin mendekati hari H kegiatan sosialisasi tinggal menyisakan kecamatan-kecamatan terdekat dengan ibukota Bolaang Mongondow Lolak.

Lazimnya sosialisasi menghadirkan banyak orang agar informasi langsung tersampaikan kepada banyak orang, alasan pandemi



undangan dibatasi hanya 20 orang setiap kegiatan. Untuk memaksimalkan jangkauan sebaran informasi KPU Bolaang Mongondow dalam setiap kegiatan sosialisasi tingkat kecamatan mengundang unsur Tripika di Kecamatan (Camat, Kapolsek dan Danramil), Sangadi (kepala desa), Kepala Puskesmas, Pengawas Pemilihan, Pimpinan Ormas Keagamaan dan Ormas Pemuda. Setelah para undangan mendapatkan informasi terkait Pemilihan di tengah pandemi *Covid-19*, diharapkan mereka juga menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat di wilayah kecamatan terutama para Sangadi untuk meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat di desa.

Semua kecamatan dikunjungi, 15 kecamatan tidak ada yang terlewatkan. Dimulai dari menyelesaikan kecamatan-kecamatan di wilayah Dumoga, kemudian Passi - Lolayan dan terakhir wilayah Pantura. Namun demikian kecamatan yang lebih dulu dikunjungi adalah Kecamatan Bolaang dan Poigar, selanjutnya pindah ke kecamatan-kecamatan di wilayah Dumoga.

Setiap kegiatan selalu dihadiri oleh KPU Provinsi Sulut baik hadir secara langsung maupun lewat media *daring* dengan aplikasi *zoom cloud meeting*. Mungkin jika tidak pandemi *Covid-19* kita



Sosialisasi tatap muka: Pemateri via daring,
Foto: Subbagian Tekmas KPU Bolmong

tidak akan bersentuhan dengan aplikasi *video conference* seperti *zoom*. Memudahkan untuk memangkas jarak dan waktu sekaligus menjaga kontak fisik sebagai upaya menerapkan protokol kesehatan *Covid-19*.



2. Peran Relawan Demokrasi (Relasi)

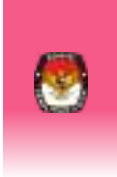


Rekrutmen Relasi: pendaftaran, wawancara, pengukuhan dan bimtek Relasi KPU Bolmong, Foto: Subbagian Tekmas KPU Bolmong

Relawan Demokrasi (Relasi) merupakan program sosialisasi yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan dengan melibatkan peran serta masyarakat, dengan sasaran utama adalah komunitas-komunitas yang di masyarakat. Relasi menjadi motor penggerak di kominutasnya.

Program Relasi di Kabupaten Bolaang Mongondow melibatkan kelompok masyarakat 10 (sepuluh) basis pilih strategis yaitu basis keluarga, basis pilih pemula, basis pilih muda, basis pilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, dan basis warga internet (netizen). Jumlahnya 30 orang, dengan komposisi perbasisnya 2 sampai 5 orang (jumlah tiap basis tidak sama)

Relasi di rekrut secara terbuka dengan mengumumkan kepada masyarakat tahapan pembentukannya. Mulai dari pengumuman perekrutan, pendaftaran, seleksi, penetapan dan pengumuman hasil



seleksi, bimbingan teknis dan masa kerjanya. Masa kerjanya 3 bulan (September-Desember 2020).

Sebelum bertugas turun sosialisasi ke basis masing-masing, Relasi di bimtek dengan membekali mereka dengan materi-materi terkait dengan demokrasi, pemilu dan pemilihan, partisipasi masyarakat, kode etik relawan demokrasi, tahapan pemilihan,



komunikasi publik dan yang paling penting adalah terkait dengan protokol kesehatan dalam kegiatan sosialisasi di masyarakat. dalam bimtek mereka dipandu berdiskusi menyusun program kerja sosialisasi perbasis. Selain materi sosialisasi berupa *poster*, *sticker*, *flyer* dan *banner* Relasi juga dibekali dengan atribut seperti rompi, kaos, topi, dan *nametag* sehingga mereka mudah dikenali dan perlengkapan protokol kesehatan ketika akan turun di masyarakat seperti masker, *faceshield*, *handsanitizer*, dan sarung tangan.



a) *Door to door*

Sosialisasi dengan bertemu warga secara langsung kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*). Relasi basis pemilih disabilitas dibantu PPK dan PPS mengunjungi pemilih



Sosialisasi Relasi Disabilitas di rumah warga difabel,
Foto: Relasi Basis Disabilitas

disabilitas di rumahnya. Mengajak pemilih disabilitas untuk menggunakan hak pilih. Menginformasikan bahwa TPS dibangun dengan konsep ramah disabilitas dan dilengkapi dengan protokol kesehatan. Relasi basis disabilitas mengajak pemilih disabilitas untuk jangan takut ke TPS. Basis pemilih perempuan menjangkau pertemuan rutin ibu-ibu PKK, arisan ibu-ibu perangkat desa di kampung-kampung, dan pertemuan ibu-ibu majelis ta'lim. Basis pemilih berkebutuhan khusus mengunjungi pasien, perawat serta dokter di rumah sakit dan puskesmas serta mengunjungi tahanan di Kantor Polisi. Basis pemilih pemula mengunjungi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat di sekolah serta kelompok-kelompok belajar siswa SMA/sederajat yang belajar dari rumah. Karena pandemi *Covid-19* sebagian sekolah belajar dengan metode *daring* (dalam jaringan) dan *luring* (luar jaringan). Basis pemilih keagamaan menjangkau pemilih dengan mengunjungi warga di tempat-tempat ibadah kolom jemaat gereja dan tempat-tempat pengajian pemuda dan remaja masjid.



b) *Goes to community*

Sosialisasi dengan mengunjungi komunitas-komunitas di masyarakat di lokasi mereka biasa bertemu atau di wilayah mereka tinggal. Basis komunitas menyapa warga dengan mendatangi komunitas



Sosialisasi Relasi Basis Marginal
Foto: Relasi Basis Marginal

game online dan komunitas *football lovers*. Basis kaum marginal menjangkau komunitas masyarakat petani dan nelayan pinggiran. Basis pemilih keluarga menjangkau warga dengan mendatangi pertemuan rutin kelompok-kelompok arisan berbasis keluarga.

c) Sosialisasi di Media Sosial

Relasi basis warga internet (*netizen*) berperan penting menyampaikan informasi dan mengedukasi warga dengan membuat dan menyebarkan ajakan kepada pemilih untuk berpartisipasi dalam Pilkada melalui media sosial. Relasi mengedukasi warga untuk tidak golput, menolak politik uang serta dan mengajak warga untuk aktif mengecek nama di daftar pemilih serta mengajak warga mematuhi protokol kesehatan dalam tahapan pemilihan. Cara ini dilakukan dengan memproduksi meme/karikatur dan video.



3. Apel Akbar Kesiapan Penyelenggaraan Pilgub dan Sosialisasi Tingkat Desa



Last Minute: Apel akbar dan sosialisasi tingkat desa, Foto: PPS se-Kecamatan Poigar

Lima hari menjelang hari pemungutan suara 9 Desember 2020 KPU Provinsi Sulut menggelar apel akbar kesiapan penyelenggaraan Pilgub Sulut yang diikuti seluruh jajaran KPU se-Sulawesi Utara termasuk badan *adhoc* bersama *stakeholder* dengan pusat kegiatan di ibukota propinsi disiarkan secara langsung melalui akun media sosial *facebook* dan *youtube* dan *zoom cloud meeting*. KPU Kabupaten/Kota dan badan *adhoc* bergabung secara *daring*.

Disaat bersamaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melaksanakan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan serentak 202 desa/kelurahan di Bolaang Mongondow. PPS mengundang tokoh masyarakat di desa yang tidak setuju (kontra) dengan pelaksanaan Pemilihan di tengah pandemi *Covid-19* dan tokoh masyarakat yang secara aktif mengkampanyekan menolak memilih di TPS karena alasan takut tertular virus *Covid-19*.



Tokoh-tokoh ini diajak berdiskusi tentang pentingnya pemilihan dan penerapan protokol kesehatan di TPS.

Kegiatan sosialisasi ini sangat efektif, menyasar wilayah desa/kelurahan dan tokoh-tokoh yang kontra dengan pelaksanaan pemilihan di masa pandemi. Dengan demikian dari sosialisasi dan diskusi ini diharapkan tokoh masyarakat yang semula tidak setuju pelaksanaan pemilihan di masa pandemi menjadi corong bagi KPU mengajak masyarakat untuk tidak takut datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya.

4. Sosialisasi Desa Terpencil

KPU berkewajiban menginformasikan dan mengedukasi tentang pelaksanaan pemilihan kepada semua elemen warga dimanapun berada, walaupun di daerah terpencil. Inilah yang menyemangati KPU Bolaang Mongondow menyasar desa terpencil, dan yang dipilih adalah desa Pomoman.

Mengapa Pomoman? Pomoman merupakan salah satu desa terpencil/terjauh di Bolaang Mongondow. Secara geografi berada di tengah hutan. Berjarak ± 56 km dari Lolak ibukota kabupaten Bolaang



Kru KPU Bolmong menuju Pomoman dengan mobil “rambo”, Foto: Didit-staf pendukung KPU Bolmong

Mongondow dan ± 15 km dari ibukota kecamatan Poigar. Waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan dengan menggunakan mobil *offroad*. Masyarakat setempat menyebutnya “Oto rambo atau mobil rambo”. Tidak ada transportasi umum terjadwal yang melayani rute menuju dan



dari Pomoman. Menuju Pomoman hanya bisa di tempuh oleh dua jenis kendaraan. Selain mobil “rambo” bisa juga di tempuh dengan kendaraan roda dua, tetapi yang sudah di desain minimal semitrail. Jasa transportasi *trip* pergi dan pulang ojek roda dua Rp. 100.000 dan mobil “rambo” Rp. 700.000. Biaya transportasi yang mahal sebanding dengan medan yang ditempuh. Menuju Pomoman melewati jalan berbatu yang belum diaspal, naik turun medan perbukitan yang tepiannya terdapat jurang yang dalam dan menyeberangi tujuh anak sungai. Hanya ada satu jembatan yang di bangun, sisanya enam kali harus masuk ke dalam anak sungai. Jika di musim penghujan kemungkinan Pomoman akan terisolir, akses jalan rawan bencana banjir bandang dan longsor. Peristiwa ini pernah terjadi akses jalan terputus diterjang banjir bandang dan longsor.

Walaupun secara geografi terpencil, untungya Pomoman sudah dijangkau oleh listrik dari PLN. Jaringan internet dapat diakses masyarakat. Itupun tidak stabil dan hanya ada di satu *spot* yaitu di kantor sekaligus balai desa. Lokasi dimana sosialisasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2020 diadakan.

KPU Bolaang Mongondow disambut hangat dan antusias oleh masyarakat Pomoman. *Sangadi* (kepala desa) dan perangkat pemerintahan desa bersama masyarakat mengikuti sosialisasi. KPU Propinsi Sulut hadir melalui *daring (via zoom)*.



Sosialisasi Daerah Terpencil di Desa Pomoman
Foto: Subbag Tekmas KPU Bolmong

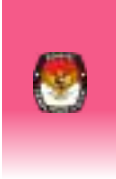
5. Sosialisasi Di Media Sosial

Kurun waktu dua dekade terakhir perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat masif masuk kedalam tatanan kehidupan masyarakat. Salah satunya kehadiran media sosial. Secara perlahan mengalihkan orientasi masyarakat terhadap kebutuhan informasi dari media mainstream ke media sosial.



Grafik DPT
Bolmong
berdasarkan
kelompok
umur
Sumber:
Subbagian
Program,
Data dan
Informasi
KPU
Bolmong

Pemilih DPT di Bolaang Mongondow dengan umur 17-40 tahun berjumlah 86.380 atau sekitar 52 persen dari DPT yaitu 166.144. Terdapat 25 orang belum 17 tahun dengan status menikah atau pernah menikah. Kelompok umur 40 tahun kebawah merupakan kelompok



yang kesehariannya tidak lepas dari *gadget*. Kelompok umur ini yang disasar oleh KPU Bolaang Mongondow untuk menyebarkan informasi pemilihan melalui berbagai platform media sosial.

KPU Bolaang Mongondow hadir di empat platform media sosial *Facebook, Instagram, Twitter* dan *Youtube*. Setiap hari akun media sosial KPU Bolaang Mongondow menyebarkan informasi tahapan, program dan jadwal Pemilihan, kegiatan yang telah dilaksanakan dan regulasi pemilihan serta ajakan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktifitas keseharian.

Memanfaatkan ribuan badan adhoc untuk memasifkan sosialisasi di media sosial KPU Bolaang Mongondow menginstruksikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara bersama jajaran sekretariatnya untuk merespon (*like*) dan membagikan setiap postingan akun media sosial KPU Bolaang Mongondow.



Sosialisasi media sosial: Postingan akun media sosial KPU Bolmong
Foto: facebook dan youtube KPU Bolmong



6. Program Rumah Pintar Pemilu (RPP)



Sosialisasi dan pendidikan pemilih di RPP KPU Bolmong (sebelum pandemi Covid-19), Foto: Subbagian Tekmas KPU Bolmong

Mengawali tahapan Pemilihan tahun 2020 dengan memanfaatkan sisa anggaran tahun 2019, KPU Bolaang Mongondow merenovasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan mengundang masyarakat untuk mengunjungi RPP.

Program RPP adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat. KPU Bolaang Mongondow mengundang pelajar dari 5 (lima) Sekolah Menengah Atas/ sederajat yang berada di kecamatan Lolak dan Bolaang. Mereka diedukasi tentang demokrasi, Pemilu dan Pemilihan di Indonesia. Pelajar SMA/ sederajat merupakan pemilih pemula sehingga penting bagi mereka untuk mengetahui sistem dan sejarah demokrasi elektoral di Indonesia.

Kegiatan diisi dengan materi sistem demokrasi, Pemilu dan Pemilihan di Indonesia yang disajikan melalui video, diskusi, fungames dan kuis. Kegiatan dibuat semenarik mungkin untuk menghindari kebosanan, peserta akan bosan jika materi dan kegiatan monoton atau tidak menarik. Mereka juga diberi kesempatan untuk membaca dan melihat koleksi buku, *display* dan minatur TPS di RPP.



Rumah Pintar Pemilu KPU Bolaang Mongondow terbuka untuk dikunjungi semua kalangan masyarakat baik itu pelajar, mahasiswa dan masyarakat umumnya. Selain itu KPU Bolaang Mongondow juga bersedia jika diundang pihak sekolah menjadi pemateri di kegiatan sekolah yang terkait dengan pendidikan demokrasi.

7. *Goes to School*

Segmen pemilih pemula merupakan salah satu segmen strategis sasaran sosialisasi Pemilihan Serentak tahun 2020. Sosialisasi goes to school menysasar pemilih pemula di SMK BPD Nanasi Kecamatan Poigar. Mengapa yang dipilih adalah SMK di Nanasi? Partisipasi pemilih desa Nanasi pada Pemilu 2019 tercatat hanya 69 persen. Selain itu mayoritas pelajar dan tenaga pendidik berasal dari desa Nanasi dan desa sekitarnya. Penting bagi mereka untuk mengetahui latar belakang dipilih sekolah mereka sehingga mereka juga termotivasi untuk menjadi bagian dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Pelajar SMK BPD Nanasi diedukasi tentang pentingnya partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2020, disosialisasikan juga hal baru di TPS pada saat pemungutan suara. Perihal baru ini terkait dengan penerapan protokol kesehatan di



Sosialisasi *goes to school* di SMK BPD Nanasi
Foto: Subbagian Tekmas KPU Bolmong

TPS. Selain pemberian materi kegiatan juga diisi dengan diskusi dan kuis sehingga peserta sosialisasi tidak bosan.



8. Forum Media *Gathering*



Peran media: Forum media *gathering* KPU Bolmong bersama wartawan di Bolaang Mongondow, Foto: Subbagian Tekmas KPU Bolmong

Memaksimalkan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 KPU Kabupaten Bolaang Mongondow mengundang awak media yang bertugas di wilayah kabupaten Bolaang Mongondow dalam forum media *gathering*. Dalam forum ini, awak media disosialisasikan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020 terutama dalam hal penerapan protokol kesehatan *Covid-19* di TPS yang tidak saja diterapkan oleh petugas di TPS (KPPS dan Petugas Ketertiban TPS) tetapi juga oleh pemilih dan semua pihak terkait seperti saksi dan pengawas TPS. 15 hal baru terkait protokol kesehatan harus diterapkan di TPS pada hari pelaksanaan pemungutan suara.

Forum diisi dengan pemaparan materi dan diskusi. KPU Propinsi Sulut dan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow memaparkan kesiapan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan tahun 2020 dan bagaimana penerapan protokol kesehatan di TPS. Dari



kegiatan ini diharapkan peran serta awak media dalam menyosialisasikan tahapan penyelenggaraan pemilihan ditengah pandemi dengan mengajak masyarakat untuk tidak takut datang ke TPS melalui pemberitaan di media baik cetak maupun *online*.



DARI KOKAPOY MEMOTRET SOSIALISASI PEMILU DI BOLTIM

Oleh : Terry Suoth

Desa Kokapoy menarik perhatian saya, selain secara geografis terpisah jauh dari desa-desa di Kecamatan Mooat, bahkan sampai saat ini untuk bisa tiba di desa tersebut kita harus melewati Kabupaten tetangga yaitu Minahasa Selatan. Udara sejuk dan kadang berkabut di sepanjang perjalanan, kerap kali membuat desa ini terasa semakin jauh dicapai. Jalan yang sempit, menanjak-menurun, juga sebagian besar aspal jalan masih dalam kondisi kurang baik menambah tantangan. Pepohonan tumbang, atau sekedar cabang dan ranting yang patah juga bisa menjadi hambatan besar.



Desa Kokapoy mula-mula adalah lahan yang diperuntukkan kepada para pengungsi dari Maluku, yang berjumlah sebanyak 195 Kepala Keluarga (KK). Kemudian terbentuk menjadi sebuah Desa pada tanggal 7 Agustus tahun 2007. Kemudian pada tahun 2013 dimekarkan menjadi dua desa, hingga lahirlah Desa Kokapoy Timur.

Seiring waktu berjalan, dari hasil penelusuran yang saya lakukan, saat ini jumlah eks pengungsi di kedua desa tersebut telah berkurang menjadi 78 Kepala Keluarga. Beberapa alasan yang menjadi penyebab mereka meninggalkan Desa Kokapoy, diantaranya: pekerjaan yang



tidak sesuai profesi, belum ada lahan usaha, belum ada penerangan yang memadai, akses jalan desa,

Sangadi yg perna menjabat dan yg terpilih

Pejabat sangadi

- Jan Kumendong (2007-2015
- Charles Kumendong (2015-2016)
- Robby Mawey (Oktober 2016- Desember 2016)

Sangadi terpilih

- charles Kumendong (2016 - Sekarang)

Untuk anda yang berniat berkunjung ke desa Kokapoy, juga harus bersiap-siap untuk jedah dari dunia maya, sebab di desa ini belum ada akses telepon seluler apalagi jaringan internet. Tentu ini menjadi kendala besar bagi penyelenggara, apa lagi untuk menjalankan tahapan pemilihan di masa pandemi covid-19. Adegan mencari signal telepon dan jaringan internet, bukanlah adegan drama atau sinetron, namun ini nyata terjadi. Misalnya saat pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan juga beberapa kegiatan bimbingan teknis atau rapat koordinasi yang harus digelar secara daring.



Pelantikan PPDP daring diatas bukit



Masih lekat dalam ingatan saya, di sebuah kesempatan kami mengajak bapak Meidy Tinangon, salah satu komisioner KPU Provinsi Sulawesi utara untuk berkunjung ke Desa Kokapoy. Sebetulnya kehadiran pak Meidy saat itu untuk monitoring kegiatan “Coklit Serentak” pada tanggal 18 Juli 2020, kemudian kami memanfaatkan waktu, sekaligus mengobati kerinduan PPDP, PPS bahkan PPK untuk bertemu dengan pimpinan dari Provinsi. Kesan bangga dan senang terpancar dari wajah-wajah PPDP dan PPS ketika rombongan tiba di Kokapoy. Tentu kunjungan pimpinan tingkat provinsi semacam ini akan mengisi memori indah mereka, serta bisa menjadi penyemangat untuk menjadi penyelenggara. Semangat menjadi penyelenggara sangat penting, sebab dari pengalaman kami pada tahapan rekrutmen PPS dan PPDP dan KPPS, peminat atau pendaftar dari desa Kokapoy dan Kokapoy Timur tidak mencapai kuota sehingga harus diperpanjang.



* Kadiv Hukum Bpk. Meidy Tinangon di Kokapoy



Sosialisasi Berbuah Partisipasi

Meski tidak bisa langsung diklaim bahwa tingginya tingkat partisipasi pemilih hanya semata-mata disebabkan oleh kegiatan sosialisasi, namun upaya sosialisasi yang maksimal, tentu juga membawa manfaat lain bagi masyarakat pemilih. Yakni yang utama adalah meningkatnya kesadaran berdemokrasi dan kesadaran untuk menggunakan hak pilih.

Dari segi kuantitatif menelusuri jejak partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan pemilihan Presiden, barangkali bisa kita temukan dengan sederhana dalam bentuk prosentase pemilih dari dokumen-dokumen atau arsip yang dimiliki KPU, serta rekaman media massa.

Namun bagi yang tertarik membaca secara kualitatif tentang hal ini, maka perlu menggunakan beberapa parameter untuk paling tidak mendeteksi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam sebuah kontestasi Pemilihan baik Pilkada atau Pemilu. Pada judul tulisan ini saya memilih kata potret dengan keinginan menangkap serta menampilkan kembali rekaman peristiwa pemilihan dari berbagai sumber yang bisa kita telusuri.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Peresmian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto di Manado pada hari Selasa, 30 September 2008 (www.boltimkab.go.id). Kemudian menggelar pemilu pertama pada tahun 2009, dengan status penyelenggara pemilu (KPU) yang masih ditangani oleh KPU Bolaang Mongondow. Dari tingkat partisipasi pada momentum pemilihan yang terakhir yakni pemilihan serentak 2020 yang mencapai 95,94persen, paling tidak



menggambarkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara berjalan dengan maksimal, meski sekali lagi tidak bisa dijustifikasi sebagai satu-satunya penyebab.

Setidaknya dari pengalaman sosialisai yang kami lakukan yang menjadi perhatian khusus yakni Desa Kokapoy di Kecamatan Mooat, Desa Jiko Belanga di Kecamatan Nuangan, serta Desa Bokaka di Kecamatan Kotabunan. Tentu tidak bermaksud mengabaikan Desa-Desa lainnya yang juga memerlukan perlakuan khusus dalam konteks penjangkauan sosialisasi kepiluan maupun kegiatan pendidikan pemilih lainnya.

Desa Kokapoy sempat menjadi perhatian publik pada saat Pemilu 2019, karena banyak terdapat pemilih ganda. Namun terkait sengakarut persoalan pemilih ganda ini mungkin bisa diceritakan di kesempatan lain. Setidaknya persoalan Data Pemilih tersebut tetap harus menjadi perhatian khusus dalam periode-periode kepiluan yang akan datang.



MENAKAR ARUS SOSIALISASI PEMILU / PILKADA DI DAERAH NUSA UTARA

Oleh : Iklam Patonaung

Abstrak

Kegiatan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah merupakan salah satu komponen pembangunan politik dalam mewujudkan Indonesia berdaulat berdasarkan demokrasi. Pembangunan itu akan berhasil jika adanya dukungan dan partisipasi masyarakat. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu tolak ukur kesuksesan pelaksanaan pembangunan, mengingat dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan menempatkan status masyarakat yang bukan hanya sasaran pembangunan tetapi juga merupakan subyek dalam proses modernisasi dan perubahan yang dikehendaki oleh pembangunan itu sendiri

Partisipasi masyarakat merupakan indikator utama berhasil atau tidaknya sebuah pembangunan Demokrasi. Tingginya tingkat partisipasi pemilih akan menunjukkan keberhasilan pemilu dan sebaliknya rendahnya partisipasi masyarakat atau pemilih menggunakan hak pilihnya akan menunjukkan ketidak berhasilan pemilu. Untuk itu perlu ada upaya upaya sosialisasi strategis untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat atau pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, karena sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi tentang pemilu atau pilkada.



Tulisan ini akan menguraikan beberapa metode sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Pilkada serentak tahun 2020 di tengah tengah berbagai macam tantangan yang sedang di hadapi, serta tantangan lainnya yang merupakan satu kesatuan dalam melakukan sosialisasi di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Secara umum Seperti yang kita ketahui pemilu maupun pilkada berlangsung dilaksanakan di tengah tengah bencana nasional non alam yaitu mewabahnya virus covid 19 atau yang lazim di sebut dengan Virus Corona semntara khusus secara geografis masyarakat sangihe selain tinggal di daratan besar juga tersebar di tiga kecamatan kepulauan yaitu kecamatan Kepulauan Tatoareng, kecamatan Kepulauan Nusa Tabukan, dan Kecamatan Kepulauan Marore dan tigapuluh sembilan desa kepulauan dari jumlah keseluruhan 167 Kelurahan dan Desa.

KATA KUNCI:

Sosialisasi, Strategi, Partisipasi Masyarakat

MENAKAR ARUS SOSIALISASI PEMILU / PILKADA DI DAERAH NUSA UTARA

A. Pendahuluan

Tujuan negara yang menganut sistem kesejahteraan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dewasa ini diyakini bahwa, demokrasi merupakan pilihan yang paling tepat untuk mencapai cita-cita kesejahteraan tersebut. Dalam bingkai demokrasi harkat dan martabat manusia dihargai atau bahkan dijunjung tinggi, dalam



bingkai demokrasi rakyat diberikan ruang yang sangat luas untuk dapat mempengaruhi kebijakan publik, bahkan dalam bingkai demokrasi rakyat diberikan ruang yang sangat luas untuk menentukan partai apa, dan atau siapa yang akan menjadi penguasa. Atas dasar itulah bangsa Indonesia yakin bahwa demokrasi adalah pilihan yang paling tepat untuk mewujudkan cita-cita mensejahterakan rakyat melalui partisipasi masyarakat. Miriam Budiardjo menyatakan partisipasi politik merupakan kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah, (Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, h. 367

Atas dasar ini kemudian bangsa Indonesia terus memperbaiki sistem pemilu dan sistem politik yang ada, dengan harapan tujuan berdemokrasi secara perlahan-lahan dapat tercapai. Semenjak kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 paling tidak ada dua perubahan penting dalam pemilu di Indonesia: pertama adalah kembalinya sistem multi partai. Kedua adanya pemilihan legislatif, pemilihan Presiden, serta pemilihan kepala daerah secara langsung. Perubahan merupakan lompatan demokrasi ini, sekali lagi diharapkan akan melahirkan pemimpin baik di level nasional dan daerah yang berkualitas, kredibel, kapabel, akuntabel, dan sekaligus peka terhadap berbagai persoalan masyarakat. Sekalipun demikian untuk mencapai pemilu yang baik dan berkualitas bukanlah perkara yang mudah, ada banyak persoalan yang muncul dalam perjalanan pemilu di Indonesia. Salah satu persoalan yang paling menjadi sorotan adalah terus menurunnya angka partisipasi pemilih dalam setiap pemilu di Indonesia tujuan yang sama tentu juga di harapkan oleh masyarakat propinsi Sulawesi utara dalam perhelatan Pemilihan Kepala daerah Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2020



meliputi 15 kabupaten kota yang masuk dalam wilayah propinsi Sulawesi Utara dan salah satunya adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe, selain berharap kesejahteraan dengan pemimpin yang mampu mensejahterakan masyarakatnya, juga harapan besar pemilu ataupun pilkada menjadi sarana demokrasi sebagaimana yang di cita citakan sebuah bangsa.

B. Letak Geografis Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Kabupaten kepulauan Sangihe terletak di antara pulau Sitaro dan pulau Mindanau (filipina) serta berada di bibir samudra pasifik. Kabupaten Kepulauan Sangihe beribu kota di Tahuna dimana secara keseluruhan jumlah pulau yang ada berjumlah 105 pulau dengan rincian ; 79 pulau tak berpenghuni dan 26 pulau berpenghuni. Secara geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak $2^{\circ} 4' 13'' - 4^{\circ} 44' 22''$ LU dan $125^{\circ} 56' 57''$ BT .

Pada Tahun 2002, kabupaten kepulauan Sangihe di mekarkan (pada saat itu masi bernama kabupaten Sangihe dan Talaud) menjadi dua kabupaten berdasarkan Undang undang Nomor persen Tahun 2002 menjadikabupaten kepulauan sangihe dan kabupaten Kepulauan Talaud. Pemekaran kembali di lakukan di kabupaten induk (kabupaten Kepulauan Sangihe) menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO). Pada tahun 2007 sesuai undang undang nomor 15 Tahun 2007 tanggal 2 januari 2007. Peresmiannya di laksanakan pada tanggal 23 mei 2007 di ruang mapalus kantor gubernur Sulawesi Utara sekaligus dengan pelantikan PPS Bupati Kabupaten Kepulauan SITARO Drs. Idrus Mokodompit. Menurut data Publikasi BPS di akhir bulan Desember tahun 2020 angka penduduk yang ada di Kepulauan Sangihe mencapai 139.262



jiwa jumlah penduduk dengan uraian 71.055 jiwa penduduk laki laki sedangkan perempuan berjumlah 68.207 jiwa.

Pemilu atau pemilihan umum sebelum di lakukan secara serentak secara nasional sudah lebih dahululu dilakukan di kabupaten sangihe pada tahun, dalam sejarah walaupun masih harus di lakukan kajian secara mendalam di ketahui bahwa di kabupaten sangihe telah di lakuka sejak tahun 1952 sehinga pemilu ini di tetapkan secara nasional sampai saat ini.

Dalam sejarah pemilu di sangihe khususnya pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur tantangannya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang kurang baik menggunakan hak pilihnya maupun menjadi bagian dari penyelenggara pemilu yaitu badan adhoc (PPK, PPS, dan KPPS) untuk pengguna hak pilih jika di lihat dari tahun sebelumnya saja hanya kecil peningkatannya yaitu pada tahun 2015 dari jumlah pelih 107.708 yang menggunakan hak pilihnya 66.155 dengan presentasi pengguna hak pilih 61,42persen. Sedangkan di tahun 2020 dari jumlah pemilih tercatat dalam DPT 106.168 pengguna hak pilih 73.543dengan presentase 69,27persen.

C. Pengertian Sosialisasi dan implementasi yang di lakukan oleh KPU Kab. Kepulauan Sangihe

Sosiologi menjelaskan sosialisasi sebagai proses dalam diri seseorang ketika mereka belajar mengenai nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat, sehingga mereka mampu memainkan peran masing – masing dengan tepat dalam masyarakat (“socialization is the process through which people learn attitudes, values, and actions appropriate for members of a particular culture”).



Sosialisasi pada umumnya dipahami sebagai sebuah proses belajar, kondisi ini terjadi karena pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar mengenai peran, norma dan nilai untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. (Yusa Djuyandi, 2014. *Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif*. E.Journal HUMANIORA)

Sosialisasi merupakan suatu proses di mana di dalamnya terjadi pengambilan peranan (role talking) dalam beradaptasi proses ini seseorang belajar untuk mengetahui peranan yang harus dijalankan serta peranan yang harus dijalankan orang lain melalui penguasaan peranan yang ada dalam masyarakat ini seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain. (Setiadi, 2007. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana)

Sosialisasi merupakan aktivitas manusia dalam berfikir, bersikap, dan berperilaku dalam menjalin hubungan sosial diantara sesamanya. Sosialisasi dalam arti luas merupakan suatu usaha masyarakat yang menghantar warganya untuk masuk ke dalam kebudayaan. Dengan kata lain masyarakat melakukan suatu rangkaian kegiatan tertentu untuk menyerah terimakan kebudayaan dari satu generasi berikutnya (Abdullah, 2006. *Pengantar Komunikasi*. Jakarta: Salemba Empat)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah suatu proses pembelajaran terhadap seseorang agar memahami dan memiliki kesadaran peran dengan tepat di dalam masyarakat. Sehingga sosialisasi juga sering dikatakan sebagai proses pendidikan untuk lebih mengetahui sesuatu hal yang belum diketahui seseorang di dalam kehidupan sosial, seperti mengetahui peran, norma dan nilai di dalam bermasyarakat untuk beradaptasi dan berinteraksi antar sesama manusia. Dalam hali ini sosialisasi tentang pemilu bertujuan agar



semua elemen masyarakat memahami serta sadar betul terhadap peran masing masing dalam pemilu atau pilkada.

Di Indonesia masih ada kelompok anti partisipasi dalam artian tidak ikut serta dalam pemilu tersebut dan salah satunya adalah mereka yang sering di disebut sebagai kelompok Golongan putih (Golput) yaitu golongan yang secara sadar menyatakan dirinya untuk tidak memilih. Alasan yang diberikan oleh pemilih golput pun bermacam-macam, mulai dari sibuk, tidak ada waktu, tidak percaya pada calonnya, tidak ada manfaatnya pada mereka, buang-buang duit saja dan lain-lain.

Fenomena golput tidak dapat dipungkiri keberadaannya karena golput juga merupakan suatu pilihan bagi setiap individu yang lebih memilih masuk ke dalam golongan putih tersebut. Namun, keberadaan warga yang memilih untuk golput ini pada akhirnya dianggap sebagai patologi demokrasi/penyakit demokrasi. Sehingga memang arus ada upaya yang dapat dilakukan oleh KPU khususnya KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam meminimalisir golput untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum serta meningkatkan legitimasi dari pemimpin yang terpilih dengan menekan angka golput. Dengan kata lain bila golput rendah, maka tingkat partisipasi masyarakat menjadi tinggi sehingga membuat legitimasi Gubernur dan Wakil Gubernur pada pemilihan tahun 2020 ini terpilih menjadi lebih kuat. Partisipasi pemilu merupakan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum. Kurangnya partisipasi merupakan kurangnya pula kesadaran politik masyarakat dalam berdemokrasi melalui pemilu. Partisipasi dapat ditingkatkan melalui kesadaran, pembinaan serta pendidikan terhadap masyarakat. Pembentukan kesadaran, pembinaan dan pendidikan politik dapat dilakukan dengan program sosialisasi pemilu.



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sangihe dalam melakukan sosialisasi atau pemberian informasi pada pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tidak hanya berjalan sendiri, namun juga menggandeng pihak lain juga sesuai dengan Tupoksinya pada pemilu 2019 ataupun Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 misalnya dari pihak Dinas Dukcapil Guna mendapatkan Keakuratan Data Pemilih yang berbasis e-KTP serta memberikan kemudahan dalam proses mendapatkan e-KTP bagi penduduk yang belum memilikinya dengan program Perkaman e-KTP serentak dan Ayo



Kawal Perekaman e-KTP bersama dengan KPU menjemput Bola sehingga Perekaman yang selama ini dilakukan di ibu kota kabupaten, dengan dua program dari KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe bekerja sama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Sangihe di atas maka Perekaman e-KTP dilaksanakan di setiap Kecamatan.

Foto. Perekaman e-KTP di kecamatan Tamako (Dokumen PARMAS)

KPU kabupaten Kepulauan Sangihe juga bekerja sama dengan lembaga lembaga pendidikan sehingga walaupun sekolah dalam suasana di liburkan karena anjuran pemerintah memutuskan mata rantai penyebaran virus covid 19 masih bisa melakukan sosialisasi dengan



cara menghadirkan 20 orang dalam setiap sosialisasi ataupun dengan cara daring dengan bantuan pihak pihak yang berwenang di lembaga pendidikan tersebut. Begitu juga kerja sama yang di bangun oleh KPU Kabupaten Sangihe dengan pihak Kesehatan, TNI dan POLRI serta lembaga lainnya dengan kata lain bahwa KPU kabupaten tidak ingin menjadi pemain tunggal dalam memainkan peran sosialisasi pemilu namun juga mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang ada pada penduduk kabupaten kepulauan sangihe baik dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Meskipun begitu tentu kita tak mungkin berspekulasi dengan keterlibatan semua unsur tersebut adalah jaminan 100persen peningkatan partisipasi itu mudah semudah membalikkan telapak tangan kita, sebab pencapaian tujuan adalah hasil yang diharapkan dan upaya pencapaian hasil yang ingin diperoleh dari dilakukanya kegiatan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam hal sosialisasi ini yang menjadi tujuan dari program sosialisasi pemilu adalah meningkatkan partisipasi pemilih, di sementara jika berkaca dari tantangan yang di hadapi KPUD Kabupaten Kepulauan Sangihe hampir lebih Besar dari pencapaian tujuan sosialisasi yang di lakukan selama ini.

D. Bentuk Bentuk Dasar sosialisasi

Sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat): Sosialisasi Primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sedangkan sosialisasi Sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu



dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi (Pramitha, D. Sosialisasi Bahasa dalam Pembentukan Kepribadian Anak. Bandar Lampung: Fisip Universitas Lampung, 2010: h. 18)

Sosialisasi primer dalam KPU sendiri bisa diartikan sebagai pemantapan tahapan mulai dari persiapan sampai pada pelaksanaan pemilu yang di dalamnya termasuk mempersiapkan struktur dan infrastruktur yang mumpuni menjalani sebuah tahapan pemilu atau pilkada, dari kelengkapan perangkat penyelenggara sampai pada menyiapkan Sumber Daya Masyarakat (SDM) penyelenggaraannya, apalagi di tingkatan badan adhoc (PPK, PPS, KPPS) yang dalam proses perekrutannya hanya ada setiap kali perhelatan pemilu atau pilkada tersebut di laksanakan. Sementara sosialisasi sekunder adalah tahapan sosialisasi di mana KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe menyiapkan beberapa program untuk menyampaikan informasi pemilu mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih sampai kepada informasi pungut hitung suara kepada masyarakat secara umum agar tidak ada satupun tahapan dalam pemilu atau pilkada tersebut tidak di ketahui oleh masyarakat sehingga dengan informasi yang selalu di informasikan tersebut menggugah ketertarikan mereka untuk berpartisipasi dalam proses pemilu atau pilkada dari melibatkan diri sebagai penyelenggara atau “penyambung lidah” KPU sekaligus juga menggugah ketertarikan mereka mengetahui lebih paripurna tentang siapa yang mencalonkan diri dalam pemilu atau pilkada sehingga mereka tidak ada keraguan bagi mereka menyalurkan hak suaranya.



E. Upaya Upaya Sosialisasi Pemilu / Pilkada Yang Di Lakukan KpuD Kabupaten Sangihe Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Sosialisasi pemilu merupakan salah satu bagian dari sosialisasi politik. Dalam hal ini sosialisasi pemilu merupakan jenis sosialisasi formal. jenis sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), disebut sosialisasi formal karena lembaga tersebut mempunyai kewenangan serta mempunyai landasan hukum, selain itu materi yang disampaikan oleh lembaga tersebut merupakan kebijakan pemerintah. Jenis sosialisasi formal merupakan jenis yang sering digunakan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan program atau kebijakan yang baru dibuat kepada masyarakat, sebagaimana misalnya Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan proses pemilihan umum selanjutnya dalam peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015, sosialisasi pemilihan umum disebut sosialisasi pemilihan. Adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pemilu adalah suatu proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang yang dibentuk menurut undang-undang dan ketentuan berlaku dengan tujuan memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya pemilu. Adapun tujuan sosialisasi pemilu yaitu untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang urgensi pemilu, sehingga muncul sikap proaktif dari



masyarakat untuk memberikan hak suaranya secara baik, benar dan penuh tanggungjawab. Beberapa proses atau program yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mensosialisasikan Pemilu khususnya Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Utara di Tahun 2020.

KPUD Kabupaten Sangihe sudah berupaya keras meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum agar masyarakat mau memberikan hak suaranya dalam proses pesta demokrasi tersebut. Komisi pemilihan umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia sudah banyak strategi yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu khususnya dalam Pilkada 2020 diantaranya memberikan pendidikan pemilih (*vote education*). Kegiatan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu, namun bisa juga dilaksanakan oleh semua elemen bangsa ini, karena pemilu itu yang menentukan nasib bangsa, dalam menentukan wakil rakyat menjadi pemimpin bangsa baik ditingkat pusat maupun di daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bagaimana tata cara dan peran masyarakat dalam pemilu dengan demikian masyarakat akan mengerti peran mereka dalam pesta demokrasi tersebut.

Selain memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, pendidikan pemilu juga bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan terselenggaranya pemilu dan pilukada. Selain itu kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang berkualitas dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik.

Selain berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemilihan pemilu, komisi pemilihan umum juga



berusaha menarik minat pemilih pemula untuk turut berpartisipasi dalam Pilkada 2020. Partisipasi pemilih pemula sangat penting sebagai pembelajaran untuk berpartisipasi dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Selain menarik minat, memberikan pemahaman dan pendidikan kepada pemilih pemula merupakan langkah yang sangat penting sehingga mereka tidak akan sembarangan dalam menentukan pilihannya. Di Indonesia sendiri, pemilih dengan kisaran usia 17-21 tahun yang berstatus pelajar dan mahasiswa ini selalu menjadi topik, sehingga komisi pemilihan umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe berupaya bagaimana caranya supaya mereka berpartisipasi secara aktif dalam Pemilu khususnya pilkada. Semua pihak setuju dan tidak mau kalau pemilih pemula tidak memiliki pendirian politik, atau suaranya malah mengambang dalam Pemilu maupun pilkada.

Agar supaya sistem demokrasi semakin baik, dibutuhkan partisipasi semua pemilih, khususnya partisipasi pemilih pemula, hingga level partisipan bahkan level subjek. Pada kedua level ini, pemilih sudah sangat paham dan aktif terlibat pada semua tahapan pemilihan umum.

Beberapa potret sosialisasi yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Pilkada 2020 di antara lain ialah sebagai berikut:

1. Sosialisasi tahapan pilkada melalui media maupun pemasangan baliho informasi pilkada.

Pemberian informasi melalui media juga dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu dengan memanfaatkan satu satunya radio yaitu RRI Tahuna dan surat kabar daerah serta media online yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan membuat pemberitahuan kepada masyarakat berupa reklame beberapa hal yang kpu lakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat



adalah dengan cara lebih berusaha lagi untuk meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Begitu juga dengan pemberian informasi kepada masyarakat melalui media yang ada, selalu ditingkatkan, sehingga masyarakat luas mendapat informasi informasi penting dengan cepat dan mudah. Ketika masyarakat sudah mendapat informasi dengan mudah dan tepat, maka masyarakat akan mengetahui tentang pemilihan kepala daerah 2020 dan tentu saja hal tersebut akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan- kegiatan selama masa tahapan pemilihan Kepala Daerah 2020.



foto. Media Gatrin dan Informasi tahapan pemilu melalui Baliho
Dok. PARMAS KPU Kab. Sangihe



2. Sosialisasi Pembentukan PPDP dan Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih

Petugas Pemutakhiran data Pemilih merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan Proses pemutakhiran data pemilih. PPDP dalam melakukan Pemutakhiran data pemilih mengemban tugas yang sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab karena itu PPDP harus tepat dalam pencocokan data dan teliti dalam bekerja serta dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan salah satunya adalah RT/RW atau sebutan lain di daerah-daerah tertentu termasuk juga dengan PPS.

Oleh karenanya dalam Pembentukan PPDP, KPU Kabupaten Sangihe juga sangat hati-hati dan teliti dalam menentukan siapa-siapa yang harus menjadi petugas PPDP melalui beberapa sosialisasi termasuk sosialisasi pembentukan PPDP yang di dalamnya terinformasikan juga tentang tugas dan kewajiban PPDP.



Foto. Sosialisasi Pembentukan PPDP Dok. PARMAS KPU Kab. Sangihe

3. Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc.

Tahapan penyelenggaraan pemilihan 2020 dilaksanakan oleh jajaran komisi pemilihan umum, seluruh proses tersebut tidak hanya melibatkan lembaga KPU yang bersifat permanen (KPU, KPU Propinsi,



KPU Kabupaten / Kota), melainkan melibatkan juga penyelenggara di tingkat kecamatan, desa sampai ke TPS yang sifatnya sementara dan bertugas selama pemilihan tersebut di langsungkan. Penyelenggara tersebut sering di sebut dengan badan adhoc (PPK, PPS, dan KPPS) sebagaimana tercantum pada undang undang nomor 7 tahun 2017 pasal 6 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa KPU terdiri dari KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, dan KPPLN.

Dan berdasarkan Peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 pasal 7 tentang Tata Kerja KPU, KPU propinsi dan KPU Kabupaten Kota menyatakan bahwa KPU Kabupaten / Kotamembentuk PPK di setiap Kecamatan atau sebutan lain dan PPS di setiap desa atau sebutan lain. Meskipun bersifat sementara PPK, PPS, dan KPPS namun memiliki peranan penting dalam sebuah penyelenggaraan pemilihan. Oleh karena pembentukannya harus di lakukan secara transparan dan profesional.

4. Sosialisasi di basis Pemilih Pemula dan pemilih Muda

Dalam hal pilkada tahun 2020 ini Berdasarkan undang undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 68 yakni “warga negara republik indonesia yang pada hari pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 tahun atau pernah menikah mempunyai hak memilih”, pada umumnya mereka yang menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih pemula tersebut belum memiliki informasi dan pemahaman yang cukup mengenai pilkada. Hal tersebut bisa terbilang cukup wajar karena sebagai pemilih, mereka belum memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pemilihan baik pemilu atau pilkada



Mengingat pemahaman mereka secara umum belum mumpuni tersebut masih minim maka di khawatirkan akan di kuasai oleh kepentingan tertentu, maka KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe meletakkan porsi sosialisasi mengenai pilkada tahun 2020 terhadap pemilih pemula menjadi sangat penting sebagai salah satu cara dalam upaya memberikan informasi tentang sistem, mekanisme dan regulasi pilkada. Cara sosialisasinya beraneka macam, ada melalui sekolah sekolah ataupun mendatangi mereka di tempat diman biasanya mereka berkumpul.



foto. Sosialisasi terhadap pemilih pemula dan pemilih muda
Dok. PARMAS KPU Kab. Sangihe

5. Sosialisasi berbasis Kecamatan

Gerakan sosialisasi berbasis kecamatan ini di maksudkan agar sosialisasi yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang pilkada tahun 2020 mampu menyentuh para pemilih sampai di tingkat yang paling bawah sekalipun, namun satu hal yang menjadi penghalang terkait dengan masa pandemi virus corona yang sedang di alami bangsa indonesia, sedianya sosialisasi dengan basis ini di harapkan mampu menghadirkan banyak orang dalam sosialisasi dengan harapan semakin banyak orang yang hadir dalam sosialisasi



maka semakin banyak informan yang dapat melanjutkan informasi informasi untuk di sampaikan kepada masyarakat.

Seiring dengan aturan dan protokol kesehatan tersebut maka dengan terpaksa pihak KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe hanya mengundang beberapa orang dalam sosialisasi tersebut dengan kapasitas orang tersebut sebagai tokoh agama ataupun tokoh agama dan pemerintah kecamatan yang notabene mereka ini memiliki basis masa yang jelas untuk di sampaikan informasi yang mereka dapatkan dalam sosialisasi tersebut. Sosialisasi di basis kecamatan ini, dari 15 (lima belas) kecamatan hanya bisa di lakukan di 12 (dua belas) kecamatan yang ada di daratan sedang di 3 (tiga) kecamatan di kepulauan kita terbentur dengan persoalan dana transportasi yang tidak teranggarkan.



Sosialisasi di Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna Timur dan Sosialisasi di Kecamatan Tamako Dok. PARMAS KPU Kab. Sangihe



6. Sosialisasi di daerah terpencil dan daerah partisipasi rendah.

Tujuan sosialisasi dengan pilihan daerah terpencil dan partisipasi rendah tentu berkaca dari pemilihan sebelumnya yaitu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019, sehingga menjadi penting dilakukannya sosialisasi di daerah dengan masalah seperti ini.



Foto. Sosialisasi di daerah partisipasi rendah dan Sosialisasi di daerah terpencil, Dok. PARMAS KPU Kab. Sangihe

F. Tantangan Sosialisasi Pilkada di masa Pandemi

Pilkada tahun 2020 harus diakui merupakan pilkada yang paling unik dan pertama yang pernah diselenggarakan oleh bangsa Indonesia sejak pertama kali dilakukan, dimana pilkada diselenggarakan dimasa pandemi virus corona, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak penyelenggara dan seluruh pihak yang berkepentingan di dalamnya mulai memikirkan rekayasa tahapan sampai pada proses pelaksanaannya.

Dalam melakukan sosialisasi tahapan pilkada, KPU Kabupaten sangihe dalam melaksanakan pilkada gubernur dan wakil gubernur Sulawesi utara tak lepas dari dampak pandemi ini, sehingga sangat diperlukan pikiran-pikiran inovatif dan strategis dalam melakukan berbagai macam bentuk sosialisasi pilkada selama tidak menyalahi



aturan yang mengaturnya. Hal yang paling di rasakan dalam pilkada di masa pandemi ini adalah tahapan sosialisasi pembentukan penyelenggara badan adhoc, ada kecemasan dan ada ketakutan di tengah tengah masyarakat bahwa mnejadi penyelenggara di masa pandemi akan sangat mudah terpapar oleh virus corona. maka dengan ketakutan masyarakat tersebut pada masa perekrutan badan adhoc banyak kuota yang tidak terpenuhi atau sedikit yang berkeinginan menjadi penyelenggara dari jumlah yang di butuhkan.

Banyak langkah langkah yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Sangihe mulai denan berkoordinasi dengan pihak pemerintah selevel kecamatan maupun desa sampai pada koordinasi dengan lembaga lembaga profesi seperti profesi guru maupun profesi lainnya. Namun langkah ini juga hanya sedikit menolong, sehinga mau tidak mau KPU dan Pemerintah melakukan strategi “dari pintu ke pintu” atau mendatangi calon penyelenggaranya secara langsung agar bersedia terlibat da berpartisipasi dalam pilkada dengan cara menjadi penyelenggara badan adhoc di wilayah dominsilinya. Strategi inilah yang kemudian menjadi jalan keluar terhadap masalah badan adhoc dan di anggap paling sukses secara kuantitas namun kelemahannya adalah secara kualitas sumberdaya manusia sangat kurang di karenakan kebanyakan yang bersedia adlah mereka yang belum berpengalaman dalam proses penyelenggaraan sementara mereka yang sudah memiliki pengalaman lebih memilih tidak bersedia dengan alasan “pada saat pemilihan umum 2019 tidak ada pandemi namun mereka sangat kewalahan bahkan banyak yang meninggal dunia di tingkat PPS dan KPPS, apalagi dimasa pemilihan kepala daerah 2020 di laksanakan di masa pandemi tentu dari segi mekanisme dan sebagainya akan semakin rumit”.



Selain persoalan pandemi diatas, KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe secara lokal memiliki tantangan tersendiri dalam hal melakukan sosialisasi paling tidak masalah letak wilayah geografisnya yang memiliki 3 kecamatan kepulauan dan banyak wilayah desa kepulauan. Belum lagi kalo kita berbicara anggaran sosialisasi yang harusnya tidak boleh di sama ratakan dengan kabupaten / kota lainnya, sebab untuk biaya transportasi saja kita memerlukan jumlah biaya yang tidak sedikit. Salah satu contoh di kecamatan marore, satu satunya transpor untuk mencapai titik tersebut adalah transportasi melalui laut, ada transportasi laut yg tersedia untuk sampai di kecamatan marore namun jadwalnya dua minggu sekali sementara kalo kita menggunakan transportasi dengan model cakter dalam sekali pulang pergi kecamatan marore sedikitnya harus membayar 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sampai 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)



G. Kesimpulan

Sosialisasi merupakan salah satu program di dalam rangkaian kegiatan pemilihan umum (pemilu). Sosialisasi Pemilu telah menjadi tanggungjawab KPU sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 1 poin 10 menjelaskan bahwa Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan. Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.

Pada Tujuan dilakukanya sosialisasi pemilu oleh KPU telah ditetapkan pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 pasal 3 yaitu: a) menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan; b) meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; dan c) meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan

Dari uraian di atas amanat sosialisai seperti dalam peraturan KPU nomor 5 tersebut oleh KPU kabupaten Kepulauan Sangihe telah di laksanakan dan di lakukan secara baik dan bertanggung jawab, walaupun di sana sini masih terdapat banyak kekurangan namun KPU Kabupaten Sangihe bisa berbangga diri dengan terlaksananya pilkada 2020 berjalan sukses dan lancar bahkan di banding dengan pilkada gubernur dan wakil gubernur pada masa sebelumnya, tinggkat partisipasi dalam pilkada tahun 2020 di kabupaten kepulauan sanghe terhitung yang paling tinggi.



Bab 4

Jejak Relawan Demokrasi



RELAWAN DEMOKRASI PADA PILKADA 2020 DITENGAH PANDEMI COVID-19

Dalam kamus Bahasa Indonesia, relawan hampir sama artinya dengan kata sukarelawan yang artinya adalah orang yang melakukan pekerjaan/sesuatu secara suka rela (tanpa paksaan). Jadi dapat disimpulkan seseorang itu disebut relawan jika melakukan sesuatu hal secara sukarela, mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran, kegiatan yang mereka buat memberikan keuntungan positif bagi lingkungan atau organisasi yang dibantunya serta tidak ada dasar motivasi atau mengharapkan imbalan uang.

Relawan dalam penyelenggaraan pemilihan dalam hal ini di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum (KPU), kita menyebutnya dengan kata Relawan Demokrasi atau biasa disebut dengan Relasi. Program Relawan Demokrasi ini adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi serta membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota.

Relawan Demokrasi sekarang untuk Pilkada 2020 sangat berbeda dengan Relawan Demokrasi pada Pemilu 2019 lalu dimana mereka dihadapkan pada kondisi bencana alam yaitu pandemic covid19



(*Corona Virus Disease 2019*). Karena kondisi ini membuat teman-teman relasi membatasi jumlah orang dalam bersosialisasi serta senantiasa menerapkan dan memperhatikan protokol kesehatan . Penggunaan alat perlindungan diri (APD), penyediaan sarana sanitasi, pengecekan suhu tubuh, pakai masker, pengaturan jaga jarak, pengaturan larangan kerumunan dan pembatasan peserta setiap sosialisasi, melibatkan tim gugus tugas pencegahan Covid19 dalam kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, harus menjadi prioritas utama pada saat melakukan sosialisasi.

Relawan Demokrasi di Kota Bitung akhirnya mampu menumbuhkan kembali kesadaran politik terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana relawan demokrasi dapat menggerakkan masyarakat tempat dimana mereka berada agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilihan Kepala Daerah 2020 mengalami kenaikan menjadi 78persen dibandingkan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 lalu hanya 64,8persen. Meskipun kondisi Pemilihan Kepala Daerah sekarang berbeda dengan yang lalu karena adanya pandemic Covid19, yang mana dalam melakukan sosialisasi selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh peserta kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat.

KARAKTERISTIK WILAYAH

Kota Bitung merupakan salah satu dari 7 kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang menyelenggarakan tahapan pemilihan kepala daerah. Kota Bitung memiliki pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan. Kota Bitung terletak di timur laut tanah Minahasa dan merupakan kota industri khususnya industri perikanan.



Kota Bitung dikepalai oleh seorang Wali Kota dan Wakil Walikota, dimana wilayahnya terdiri dari wilayah daratan yang berada di kaki gunung Duasudara dan sebuah pulau yang bernama pulau Lembeh. Kota Bitung terdiri dari 8 kecamatan (6 kecamatan di daratan dan 2 kecamatan di pulau Lembeh) serta 69 kelurahan dengan Visi : Bitung yang Maju, Berdaya Saing, Berbudaya dan Sejahtera menjadi Titik Simpul dan Pintu Gerbang Indonesia di Kawasan Asia Pasifik.

BASIS RELAWAN DEMOKRASI

Di Kota Bitung Relawan Demokrasi ada 10 basis, dimana setiap basis ada 5 orang, jadi semua berjumlah 50 orang. Rincian 10 basis ini adalah : 1. Keluarga; 2. Pemilih pemula; 3. Pemilih muda; 4. Pemilih perempuan; 5. Pemilih penyandang disabilitas; 6. Pemilih berkebutuhan khusus; 7. Pemilih marginal; 8. Komunitas; 9. Warga internet; dan 10. Keagamaan. Berikut penjelasan untuk masing-masing basis :

1. Basis Keluarga

Keluarga merupakan basis yang orientasi gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Keluarga merupakan unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi. Relasi di basis ini melakukan sosialisasi melalui pertemuan





arisan PKK, arisan keluarga, arisan kerukunan se adat istiadat, dasa wisma dan sebagainya. Kegiatan ini biasa teman-teman basis lakukan secara bersama-sama maupun sendiri disetiap lingkungan tempat tinggal masing-masing, baik siang maupun malam mereka lakukan sosialisasi ini, selama informasi ini selalu mereka komunikasikan bersama.

2. Basis Pemilih Pemula



Pemilih pemula ini merupakan pemilih yang akan memasuki usia memilih dan baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan. Usia pemilih ini berkisar antara umur 17 - 21 tahun yang pada umumnya masuk duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA/Sederajat). Bukan itu saja yang termasuk pemilih pemula itu adalah pensiunan TNI/Polri dimana mereka alih status menjadi

masyarakat sipil biasa, sehingga mereka pertama kali juga menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan. Karena kondisi pandemic Covid19, banyak sekolah maupun kampus yang diliburkan, maka teman-teman basis mengambil solusi dalam melakukan sosialisasi di jalan-jalan, dari rumah ke rumah yang ada pemilih pemulanya, serta tempat-tempat nongkrong yang banyak dikunjungi



oleh pemilih pemula (café Janji Jiwa, RM Ayam Geprek), BKI STBM Duasudara, dengan tidak lupa selalu mengutamakan protokol kesehatan.

3. Basis Pemilih Muda

Mereka yang disebut sebagai pemuda adalah menurut undang-undang no 40 tahun 2009 tentang kepemudaan adalah warga negara yang berusia 16 tahun sampai

30 tahun. Dalam konteks pemilu, mereka yang disebut basis pemilih muda adalah warga negara yang telah memiliki hak pilih dan usianya tidak melebihi 30 tahun, jadi kisaran usia pemilih muda adalah 22 sampai 30 tahun.

Basis pemilih muda dijadikan sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena jumlah mereka dalam struktur pemilih yang cukup signifikan. Teman-



teman basis ini melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih ke pemuda di complex, pengurus pelajar Muhammadiyah Kota Bitung, organisasi himpunan penjelajah alam terbuka Spizaetus, dan dikalangan guru SMK Muhammadiyah Bitung.



4. Basis Perempuan

Kaum perempuan mempunyai peranan penting dalam segala hal, contohnya dalam keluarga segala urusan dalam keluarga baik itu urusan ekonomi, pendidikan kepada anak, pendidikan keagamaan, mendidik dan mengasuh anak kaum ibu/perempuan sangat berperan penting. Begitu pula dengan dalam hal kepemiluan, salah satu basis dalam Relawan Demokrasi adalah basis perempuan, dimana perempuan dapat memainkan peran untuk memotivasi dan mendukung lingkungan, setidaknya pada komunitasnya.

Sasaran dalam program basis perempuan adalah perkumpulan atau kelompok ibu-ibu yang mengesampingkan hak pilih mereka dan lebih mementingkan pekerjaan rumah tangga dan bekerja diluar rumah. Tujuan yang hendak dicapai merupakan alasan yang melatarbelakangi tidak seimbangnya pemilih perempuan dan pemilih laki-laki, disamping itu terbentuknya komunitas berdasarkan kebutuhan dan kepentingan seperti komunitas ibu-ibu pengajian Majelis Ta'lim, kolom, WKI, PKK, dasa wisma serta komunitas ibu-ibu pedagang pasar.





5. Basis Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Program dari basis disabilitas adalah meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih. Mengapa menjadi basis sosialisasi ? Karena terdapat kecenderungan mereka tidak menggunakan hak pilih jika tidak ada kepastian bahwa penyelenggara pemilu benar-benar aksesibel terhadap keterbatasan yang mereka miliki. Untuk itu, penyelenggara pemilu melalui relawan demokrasi khususnya basis disabilitas harus mensosialisasikan tentang kebijakan dan bentuk layanan ramah disabilitas untuk semua jenis disabilitas, mengingat banyaknya ragam pemilih disabilitas dan perbedaan kebutuhan dari setiap disabilitas. Dari 15 orang penyandang disabilitas yang dilakukan sosialisasi, ada 2 orang yang belum terdaftar namanya di Dinas Sosial, 5 orang yang tuna grahita, sisanya adalah tuna rungu dan tuna daksa dan kebanyakan adalah laki-laki.





6. Basis Kebutuhan Khusus

Basis kebutuhan khusus ini melakukan sosialisasi ketempat-tempat yang pemilihnya berada di wilayah terpencil, perbatasan, penghuni lembaga pemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pedagang dan nelayan serta kelompok lain yang terpinggirkan. Pada saat melakukan sosialisasi di lapas dan rumah sakit, prosedur administrasi sangat diutamakan dimana teman-teman relasi harus membawa surat pengantar dari KPU Bitung serta penggunaan alat pelindung diri pada saat masuk ke dalam lingkungan lapas dan rumah sakit.



7. Basis Marginal

Marginal adalah suatu kelompok yang jumlahnya sangat kecil atau bisa juga diartikan sebagai kelompok pra sejahtera, dimana manusia-manusia individu didalamnya memiliki maksud, tujuan, kepercayaan, sumber daya, kebutuhan dan kondisi lain yang serupa. Marginal secara umum jauh dari aktifitas atau kegiatan politik, tetapi bukan berarti mereka miskin informasi politik, mereka juga memiliki tingkat kemandirian yang tinggi karena mereka pada umumnya sudah mapan dari aspek finansial dan pemikiran.

Dalam sebuah marginal terjadi relasi pribadi yang erat antar anggota masrginal tersebut karena adanya kesamaan nilai dan kepentingan sehingga diharapkan orang-orang yang berada dalam



suatu kelompok marginal bisa menjadi pemilih yang cerdas dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini dan melahirkan calon pemimpin yang amanah, jujur, cerdas dan berintegritas.



8. Basis Komunitas

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain dari yang seharusnya. Basis komunitas ini sangat luas cakupannya karena bisa masuk keseluruhan komunitas yang ada di basis-basis lain. Jika kita dapat merangkul dan memberi pemahaman kepada satu atau dua orang yang memiliki pengaruh di suatu kelompok tersebut maka anggota lainnya akan lebih mudah diajak untuk mengikuti sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang bisa dilakukan oleh basis komunitas seperti ke komunitas pecinta kuliner, pencinta alam, komunitas motor, komunitas budaya, komunitas punk, komunitas olahraga dan lain sebagainya.





9. Basis Warga Net

Basis warna net ini sangat berperan dalam mensosialisasikan tahapan atau informasi tentang Pemilihan Kepala Daerah pada saat ini karena kondisi pandemic Covid19 yang membuat masyarakat dapat mengetahui informasi tersebut lewat media sosial, elektronik maupun media cetak. Kemajuan teknologi sekarang ini membuat masyarakat tidak akan gaktek/melek lagi terhadap namanya media sosial seperti facebook, whatsapp, instagram dan twitter yang dapat mereka gunakan dalam mencari informasi tentang Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bitung

Kehadiran media sosial sedikit banyak telah mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Mulai dari efek ketergantungan pengguna terhadap media sosial hingga pengaruh kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, relasi basis warga net senantiasa menyampaikan atau mensosialisasikan bagaimana cara mencoblos yang benar, jangan golput, bagaimana alur dalam TPS, siapa-siapa saja





yang bisa memilih sefrta informasi lainnya tentang Pilkada melalui akun-akun media sosial yang ada.

10. Basis Keagamaan

Salah satu dari basis di relawan demokrasi adalah basis keagamaan, dimana ruang lingkupnya cenderung ke tempat-tempat atau kegiatan-kegiatan keagamaan. Penyelenggara pemilu harus bersinergi dan berkolaborasi dengan kelompok-kelompok keagamaan agar dapat menggunakan forum-forum keagamaan seperti ibadah kolom, pengajian di majelis ta'lim sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih. Tokoh agama sangat berperan dalam mengarahkan jamaahnya ke arah mana, meskipun pilihan itu tetap menjadi rahasia bagi masingmasing pemilih.





“BUNGA RAMPAI RELAWAN DEMOKRASI” PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Pemilihan sebagai manifestasi demokrasi lebih dari sekedar tindakan memilih pemimpin secara teratur dan berkala yang diselenggarakan dalam beberapa tahun. Demokrasi juga tentang membangun kekuatan dari pemimpin secara nyata memajukan kesejahteraan social, ekonomi dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua warga Negara.

Terselenggarakannya suatu pemilihan karena adanya kontribusi dari beberapa pihak di antaranya peran dari “Relawan Demokrasi. Menjadi warga Negara yang baik itu bukan cuma soal siapa kita dan dari mana kita berasal. Tetapi untuk menjadi warga Negara yang baik itu, kita harus mempunyai kontribusi untuk Negara kita sendiri, maka dari itu, saya bertekad untuk bisa berpartisipasi sebagai Relawan Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Berjuang di tengah bencana pandemi covid-19, bahkan nyawa dipertaruhkan demi suksesnya Pilkada 2020. Banyak cerita dan kenangan yang membuat kami merasa bangga menjadi bagian dari penyelenggara. Semua kami jalani dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dan semangat yang kuat sehingga hasilnya terlihat dengan terlaksannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. Ini kisah kami Pejuang-Pejuang Demokrasi :

Nama saya **Yoan Manoppo**, saya akan menceritakan pengalaman saya saat melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai



relasi (Relawan Demokrasi). Ada banyak hal yang saya jumpai mulai dari ketika melaksanakan tugas sosialisasi perdana di desa Kiama. Saya sebagai relawan demokrasi basis pemilih perempuan dan juga ada kedua teman saya yang dari desa Salibabu dan desa Damau. Kami bertiga bertemu di pelabuhan spit melonguane dan melanjutkan perjalanan menuju desa Kiama. Yang pertama kami jumpai saat sosialisasi adalah 4 orang ibu dan 2 orang nenek yang sedang santai didepan rumah (duduk di dego-dego). Setelah menyampaikan maksud, kami langsung mensosialisasikan mengenai pemilihan Gubernur pada tanggal 9 Desember 2020. Sementara sosialisasi berlangsung, seorang nenek bertanya: “apakah ada depe serangan fajar?”. Kami tersenyum sedikit lalu segera menjelaskan bahwa dalam memilih kita harus memilih berdasarkan hati nurani, bukan karena paksaan, dan bukan karena uang atau jabatan. Lalu ibu tersebut segera menanggapi dengan spontan “oh nyanda ada dang...!”. Kami pun menjawab dengan sabar “ia Bu”. Kami melanjutkan perjalanan ke desa Mala. Disana ada 1 orang bapak dan 4 orang ibu yang sedang enjoy dengan aktifitas mereka. “bermain HALMA”. Dengan sopan kami meminta izin untuk mensosialisasikan tentang pemilihan gubernur pada tanggal 9 Desember 2020 nanti.

Dengan wajah cemberut serang ibu menjawab: “silahkan...!”. Suasana waktu itu agak tegang dan kaku, karena mungkin mereka merasa terganggu dengan aktifitas mereka. Singkat cerita, setelah selesai sosialisasi, saya meminta izin untuk menanyakan nama-nama mereka, untuk ditulis dalam daftar nama peserta sosialisasi. Lalu, salah seorang ibu, kira-kira usianya sekitar 30an, menolak untuk memberitahukan namanya. Ia juga melarang teman-temannya untuk menyampaikan nama mereka kepada kami. (mungkin mereka mengira kami ini adalah teroris.... Kwkwwkw... kami terus berusaha dengan



sabar untuk menjelaskan kembali maksud dan tujuan kami kemudian menyakinkan mereka dengan cara menunjukkan semua atribut yang kami pakai (kaos, Rompi, topi, masker) dan akhirnya mereka meminta maaf dan segera menyebutkan nama mereka satu persatu. Dan kami pun segera mengakhiri sosialisasi dan kembali kerumah kami masing-masing.

Ada banyak pengalaman saya saat menjadi Relasi. Yaitu, saya menjadi pribadi yang berani tampil di depan orang banyak dan orang yang belum saya kenal. Saya juga bisa belajar lebih sabar untuk menghadapi karakter/figure masyarakat yang berbeda-beda, salah satu diantaranya adalah ketika kami meminta untuk mematuhi protocol kesehatan yang dianjurkan pemerintah yaitu memakai masker. Banyak warga yang marah-marah, meskipun pada akhirnya mereka akan pulang kerumah dan mengambil masker, lalu memakainya.

Saya sangat bersyukur berkesempatan untuk menjadi relasi, karena saya bisa memperoleh ilmu yang tidak di dapat saat saya masih berstatus mahasiswa. At the end of my story, I gave Big Thanks to KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, para Komisioner dan juga pegawai-pegawai yang lainnya yang telah membantu kami dan berbagi ilmu dengan kami.



Foto. Basis Berkebutuhan Khusus



Tahun 2020 menjadi sebuah sejarah baru bagi Negara Indonesia yang dikenal dengan tahun politik dimasa pandemi Covid-19 dimana tidak ada perkumpulan, harus menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Sebagai tahun pesta demokrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dimasa pandemi ini, merupakan pertama kali bagi saya mengikuti pendaftaran untuk menjadi bagian dari Relawan Demokrasi komisi pemilihan umum Kabupaten Kepulauan Talaud rasa syukur yang tak terhingga karena pengumuman pendaftaran telah diumumkan dan melihat nama saya lolos dalam seleksi dan sempat mikir apakah saya terpilih atau tidak karena yang mendaftar menjadi anggota Relawan Demokrasi kemarin itu banyak 75 orang dan hanya 30 orang yang dipilih. Tidak sangka tapi Bersyukur dan Pujih Tuhan bisa lulus

Tugas menjadi seorang Relawan terasa begitu berat karena harus memenuhi target yang ditetapkan apalagi dimasa pandemi ini. Singkat cerita dari saya, pasti kalian penasaran ceritanya hehehe... apa sih tugas dari Relawan Demokrasi yang dikerjakan selama 3 bulan? Relawan Demokrasi itu tidak hanya menyampaikan tata cara mencoblos dengan baik dan benar, tetapi disisi lain tugas Relawan Demokrasi adalah meningkatkan partisipasi pemilih, bukan hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, Relawan Demokrasi ini juga bertujuan untuk mengedukasi pemilih, selain itu Relawan Demokrasi ini juga bertugas untuk memberikan sosialisasi tahapan pemilu serta memberikan edukasi seputar pemilu kepada masyarakat.

Menjadi Relawan Demokrasi ini juga bukan hal yang mudah, namun tugas tersebut menjadi ringan karena adanya komunikasi dan kerjasama dengan anggota kelompok. Tugas kita itu bukan dikantor KPU saja, kita juga mendatangi masyarakat dari desa ke desa dan dari dusun ke dusun dan dari pelosok ke pelosok, kita rela menghabiskan



waktu bersama masyarakat karena Relawan adalah melakukan sesuatu tanpa meminta imbalan, dan kita juga bisa mempunyai banyak teman dan bisa dikenal sama masyarakat yang sangat berantusias dan mendengarkan apa yang disampaikan sama teman-teman relawan.

Saya bangga menjadi salah satu keluarga besar dari KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, ya walaupun cuman dalam waktu yang sangat singkat ini saya benar-benar mendapatkan banyak pengalaman dari senior-senior dan komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Dan cara kita menyampaikan sosialisasi juga dengan cara yang bisa dimengerti sama masyarakat kecil, dan kita juga pernah mengadakan seperti game tanya jawab biar masyarakat tidak jenuh untuk mendengarkan apa yang disosialisasikan dan walaupun hujan, panas, dan dimasa pandemi yang melanda tetapi itu tidak membuat kita untuk pesimis dan ternyata masih banyak masyarakat yang semangat untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Harapan kami dari tahun ke tahun masyarakat akan semakin sadar bahwa pentingnya mengikuti dan berpartisipasi dalam pemilu karena itu semua adalah pesta Demokrasi.

Menjadi Relawan Demokrasi adalah sebuah pengalaman yang unik dengan sederet kenangan indah yang sulit untuk dilupakan bahkan mungkin akan tetap dikenang sepanjang masa hidup. Masa Pandemi Covid-19 memberi kami tantangan apakah sebagai Relawan Demokrasi khususnya Basis Kaum Disabilitas mampu bersosialisasi ataukah menyerah sebelum bekerja. Banyak pengalaman yang menarik selama kegiatan sosialisasi, dengan latar belakang masyarakat yang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Kebanyakan masyarakat secara khusus pemilih disabilitas mengalami kendala sehubungan dengan kurang paham membaca huruf braille mereka cenderung untuk tidak mengambil bagian dalam pemilihan atau lebih memilih golput.



Berhubungan dengan kondisi Covid-19 lebih memberikan peluang bagi mereka untuk tidak memilih. Kami tim Relawan Demokrasi Khususnya Basis Kaum Disabilitas tidak menyerah hanya karena dengan alasan-alasan di atas, kami terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang ada bahkan secara khusus bagi kaum disabilitas bahwa Pemilihan pada bulan Desember tanggal 9 adalah pemilihan yang sangat aman. Pihak penyelenggara baik dari Pusat sampai Daerah berusaha semaksimal mungkin untuk terus menerapkan protocol kesehatan dan itupun kami sebagai Relawan Demokrasi terapkan selama kegiatan sosialisasi. Semangat terus kami berikan kepada pemilih supaya pada masa Pandemi Covid-19pun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 tetap terselenggarakan tanpa ada klaster-klastre baru. Dan terbukti Pemilihan berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.



Foto. Perjuangan Kaum Disabilitas



Basis Komunitas

Saya sebagai anggota Relawan Demokrasi yang dikatakan masih baru, masih belum ada pengalaman melaksanakan sosialisasi. Namun karena tugas dan tanggungjawab sebagai relawan aku harus turun lapangan.

Awalnya aku grogi ditambah lagi keringat dingin tapi dengan semangat dan tekad saya yakin dan percaya pasti bias. Yang menarik disaat saya melaksanakan sosialisasi ke komunitas lansia, dimana mereka bertanya-tanya siapa saya dan apa tujuan saya hadir di tengah-tengah para lansia, dan lebih lucunya lagi mereka bilang begini “anak ini bukannya pernah sekolah di sini (Desa Taturan) karena berhubungan saya memakai masker sehingga masih timbul dibenak mereka siapa saya sebenarnya. Setelah saya memperkenalkan nama dan menjelaskan tujuan saya hadir di tenga-tengah mereka dan apa yang terjadi mereka malah tertawa lucu dimana mereka bisa mengenali saya dimana sudah 8 Tahun saya tidak lagi dating ke Desa Taturan dan tidak disangka bisa berjumpa lagi lewat kegiatan sosialisasi.

Saya sangat berterima kasih kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk turut serta dalam persiapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 karena lewat kegiatan Relawan Demokrasi saya boleh belajar betapa pentingnya sebuah tugas dan tanggungjawab yang dimana kalau dengan sungguh-sungguh kita menjalankannya semesta mempunyai manfaat berarti untuk kita semua.





Basis Pemilih Perempuan

Sebagai seorang relawan demokrasi pada basis pemilih perempuan, menjadi salah satu pengalaman tersendiri karena tugas kami sebagai relawan demokrasi untuk meningkatkan dan mensukseskan Pemilihan 2020 yang pada umumnya sasaran utama kami adalah pemilih perempuan. Sosialisasi biasa kami lakukan pada kegiatan ibadah-ibadah dirumah khusus pada kaum perempuan maupun pada kegiatan arisan ibu-ibu baik yang ada dilingkungan sekitar tempat tinggal kami masing-masing maupun wilayah kecamatan lain yang bisa kami menerima dan kami jangkau. Menjadi tantangan tersendiri karena sosialisasi ini kami laksanakan dimasa pandemi Covid-19 yang harus sesuai dengan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, walaupun terkadang sebagian masyarakat kadang menolak kedatangan kami karena perasaan takut terhadap virus covid-19, menjadi satu pengalaman yang tidak terlupakan pada pemilihan 2020 kali dan menjadi sejarah pertama pemilihan di masa Covid-19.





**“Menguak Tantangan di Balik Keberhasilan Sosialisasi:
Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala
Daerah Tahun 2020 Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan”**

Oleh: Muhammad Yusran⁴⁾

Indonesia merupakan negara dengan prinsip demokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar⁵. Sebagai negara demokrasi, pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Pemilu yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pun memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Pelaksanaan pemilu yang baik melahirkan harapan yang lebih baik akan masa depan demokrasi bangsa.

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah salah satu daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Daerah yang terbentuk pada tahun 2008 ini menyambut pergantian pemimpin dengan sukacita. Komisi Pemilihan Umum yang memperoleh amanat konstitusi mengawal demokrasi di Indonesia memegang peranan penting dalam menyukkseskan hajatan lima tahunan tersebut. Tak hanya bertanggungjawab menyelesaikan tahapan dari awal hingga akhir dengan tanpa sengketa dan

⁴ Analis Hukum Pada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

⁵ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2).



permasalahan hukum, KPU juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat pemegang hak pilih tentang pentingnya keikutsertaan dalam perhelatan pesta demokrasi tersebut.

Partisipasi politik secara sederhana dapat dipahami sebagai sikap masyarakat dalam menentukan pilihan dan arah menuju yang lebih baik ke depannya. Sedangkan menurut Budiardjo, secara lebih luas partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Salah satu kegiatannya adalah memberikan suara dalam pemilu.⁶ Partisipasi masyarakat dalam memilih pada Pemilu bisa tergambar dari banyak tidaknya masyarakat yang memilih golput (golongan putih). Golput dapat juga disebut sebagai perilaku apatis (acuh), tidak berpartisipasi dengan kegiatan memilih pemimpin atau wakil rakyat. Perilaku acuh tersebut disebabkan oleh suatu kondisi psikologis masyarakat yang hampir setiap Pemilu ikut berpartisipasi memilih, namun merasa bahwa hasil Pemilu tidak memberikan banyak perbaikan nasib.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu juga berkaitan dengan tingkat legitimasi hasil Pemilu, karena akan menentukan orang-orang yang dipilih oleh rakyat untuk menduduki jabatan tertentu. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya juga berkaitan dengan kepercayaan warga negara pada demokrasi dalam bentuk

⁶ Mohammad Molyadi, *Membangun Demokrasi dengan Partisipasi Masyarakat dalam Memilih pada Pemilu 2019*, Jurnal Info Singkat Kajian Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol.XI, No.09/1/Puslit/Mei/2019, 2019, Hal. 14.



Pemilu yang akan mewakili mereka untuk menjalankan mandat rakyat dan menjadi perwakilan di parlemen.

Sebab ciri sebuah negara berdemokrasi adalah seberapa besar masyarakat terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilu. Tanpa adanya upaya yang melibatkan masyarakat, maka Pemilu hanya akan menjadi kegiatan formalitas demokrasi semata.⁷ Pemilu tidak terbatas hanya terbatas pada pemenuhan hak saja tetapi juga menyangkut tanggung jawab kita sebagai warga negara dalam menentukan masa depan bangsa agar lebih kedepannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Robert F. Kennedy seorang senator Amerika bahwa⁸:

“Elections remind us not only of the rights but the responsibilities of citizenship in a democracy (Pemilu mengingatkan kita tidak hanya tentang hak tetapi tanggung jawab kewarganegaraan dalam demokrasi)”.

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah yang partisipatif dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menyelenggarakan berbagai agenda sosialisasi kepada para masyarakat penggunaan hak pilih.

Selain itu, untuk menjangkau masyarakat luas dengan konsep yang berbeda, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga mengadakan sosialisasi di *café* tempat masyarakat berkumpul seperti yang telah kami lakukan di salah satu *café* yang ada di Kab. Bolaang Mongondow Selatan.

⁷ *Ibid.*, Hal. 15.

⁸ Ratna Sari Dewi, *Ombudsman dan Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019*, 2019, diakses dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-dan-pengawasan-pemilihan-umum-pemilu-2019>.



Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2020

Sumber Foto : Divisi Parmas KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Selain itu, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara khusus telah memaksimalkan program Relawan Demokrasi atau Relasi yang menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota.

Adapun dasar hukum dalam pembentukan relawan demokrasi adalah sebagai berikut.

1. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Surat KPU RI Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
3. Keputusan KPU Bolsel Nomor 119/PP.06.2-Kpt/7111/Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020.

Program Relasi dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas proses pemilu;
2. meningkatkan partisipasi pemilu;



3. meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi;
4. membangkitkan kesukarelaan masyarakat ikut serta dalam agenda pemilu dan demokratisasi.

Program Relasi tersebut telah memberi dampak yang signifikan dalam peningkatan partisipasi masyarakat khususnya pada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tingkat partisipasi masyarakat menyentuh angka 93,35 persen dengan angka partisipasi tertinggi terdapat pada Kecamatan Tomini dengan persentase 96,26 persen serta tingkat partisipasi terendah terdapat pada Kecamatan Pinolosian Timur dengan partisipasi masyarakat di angka 90,46 persen. Namun secara umum angka partisipasi masyarakat seluruh kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 berada di angka 90 persen ke atas. Untuk lebih jelasnya, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.⁹

⁹ Divisi Parmas KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.



Tabel 1.
**Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan**

NO	KECAMATAN	DATA PEMILIH			PENGGUNA HAK PILIH				TINGKAT PARMAS
		DPT	DPTb	TOTAL	DPT	DPTb	DPPH	TOTAL	
1	BOLAANG UKI	11.916	194	12.110	10.936	194	42	11.172	92,25%
2	HELUMO	4.390	57	4.447	4.194	57	3	4.254	95,66%
3	POSIGADAN	9.586	134	9.720	9.078	134	5	9.217	94,83%
4	TOMINI	3.904	30	3.934	3.751	30	6	3.787	96,26%
5	PINOLOSIAN	7.579	58	7.637	7.027	58	11	7.096	92,92%
6	PINOLOSIAN TENGAH	4.445	81	4.526	4.106	81	6	4.193	92,64%
7	PINOLOSIAN TIMUR	5.563	47	5.610	5.025	47	3	5.075	90,46%
JUMLAH		47.383	601	47.984	44.117	601	76	44.794	93,35%

(Sumber : Divisi Parmas KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)



Sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tingkat partisipasi masyarakat menyentuh angka 93,22 persen. Sama halnya data partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tingkat partisipasi masyarakat tertinggi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2020 terdapat di Kecamatan Tomini dengan persentase 96,19 dan juga angka partisipasi masyarakat terendah terdapat di Kecamatan Pinolosian Timur dengan persentase 90,45 serta tingkat partisipasi masyarakat untuk tiap kecamatan, berada di angka 90 persen ke atas. Untuk lebih jelasnya, data terkait tingkat partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut.¹⁰

Tabel 2
Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

NO	KECAMATAN	DATA PEMILIH			PENGGUNA HAK PILIH				TINGKAT PARMAS
		DPT	DPTb	TOTAL	DPT	DPTb	DPPH	TOTAL	
1	BOLAANG UKI	11.916	194	12.110	10.936	194	5	11.135	91,95%
2	HELUMO	4.390	57	4.447	4.194	57	0	4.251	95,59%
3	POSIGADAN	9.586	134	9.720	9.078	134	1	9.213	94,78%
4	TOMINI	3.904	30	3.934	3.751	30	3	3.784	96,19%
5	PINOLOSIAN	7.579	58	7.637	7.027	58	3	7.088	92,81%
6	PINOLOSIAN TENGAH	4.445	81	4.526	4.106	81	0	4.187	92,51%
7	PINOLOSIAN TIMUR	5.563	47	5.610	5.025	47	2	5.074	90,45%
JUMLAH		47.383	601	47.984	44.117	601	14	44.732	93,22%

(Sumber : Divisi Parmas KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)

¹⁰ *ibid.*



Dalam menjalankan tugasnya, Relawan Demokrasi menjalankan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan cara bersamaan (terintegrasi). Ketika para relawan sedang mengadakan kegiatan, maka dalam kegiatan tersebut mencakup keduanya yaitu sosialisasi pemilihan dan pendidikan pemilih. Artinya perbedaan antara sosialisasi pemilihan dengan pendidikan pemilih dalam kegiatan relawan demokrasi tersebut sebatas pada apa yang disampaikan oleh relawan demokrasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, peran Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam membantu meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Sosialisasi Pemilu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa sosialisasi pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilu.

b. Pendidikan Pemilih

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota



menyebutkan bahwa pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilihan. Pendidikan pemilih ini sebagian besar ditujukan untuk para pemilih pemula dan pemuda karena mereka merupakan warga negara yang pada saat pemilihan itu berlangsung memilih pada kali pertama.

Adapun metode sosialisasi yang digunakan oleh para Relawan Demokrasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat meliputi hal berikut.¹¹

1. **Ceramah.** Relasi menyampaikan materi, dengan *story telling* (berkisah), alat bantu (misal: *powerpoint*, video, *audio*, gambar, *meme* dan lain-lain).
2. **Brainstorming.** Relasi menggali pendapat peserta dari sebuah permasalahan, menuliskannya, kemudian membuat pemetaan atas jawaban peserta (*mind map*). Setelah itu, memberikan penjelasan sembari melakukan konfirmasi atas jawaban-jawaban yang membutuhkan penjelasan.
3. **Tanya jawab.** Relasi mempersilahkan peserta untuk menyampaikan pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber dan/atau peserta lain atau narasumber bertanya kemudian dijawab oleh peserta.
4. **Permainan.** Relasi memandu peserta untuk melakukan permainan. Setelah itu, mengajak peserta untuk melakukan refleksi, menanyakan tentang pembelajaran yang didapatkan dan peserta mengonteksikannya dengan pemilihan.

¹¹ Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, *Modul Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak*, 2019, Hal. 3-4.



5. **Diskusi.** Relasi membagi peserta ke dalam beberapa kelompok, kemudian menyampaikan sebuah kasus tertentu untuk dibahas setiap kelompok, selanjutnya hasil pembahasannya akan dipresentasikan.
6. **Simulasi.** Peserta bermain peran untuk memperoleh pengalaman seperti keadaan yang sebenarnya.
7. **Lomba.** Relasi mengadakan perlombaan kepada kelompok sasaran untuk membuat materi lebih menarik. Metode ini bisa digunakan untuk basis pemilih pemula, pemilih berusia muda dan pemilih berbasis warga internet.

Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Relawan Demokrasi

Keberhasilan KPU Kabupaten Mongondow Selatan meningkatkan angka partisipasi masyarakat tersebut, tidak lepas dari upaya dan kerja keras bersama para Relawan Demokrasi dalam memberikan pemahaman dan edukasi tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan. Namun, ditengah keberhasilan peningkatan partisipasi pemilih, terdapat banyak hambatan dan tantangan yang dialami oleh para Relasi. Situasi pandemi virus *Corona (Covid-19)* yang semakin meningkat, menjadi ancaman tersendiri bagi para relawan ketika berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selain itu, pemilihan yang akan dilaksanakan di tengah pandemi, menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan tertular *Covid-19* saat menggunakan hak pilihnya di bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri yang dialami oleh Iron Rahman Relawan Demokrasi segmen komunitas. Para relawan dalam mengajak dan menyakinkan masyarakat untuk tetap hadir dan menyalurkan hak pilihnya dan tidak memilih untuk golput.



Keterbatasan sarana jaringan telekomunikasi yang belum menyebar di seluruh wilayah Kab. Bolaang Mongondow Selatan juga menjadi kendala yang mengharuskan para Relasi harus siap secara fisik dan mental turun langsung kepada masyarakat meski terkadang melewati medan yang tergolong cukup ekstrim dan terjal. Sebagaimana yang dialami oleh beberapa Relawan Demokrasi.

Hal tersebutlah yang dialami oleh Hendra Pabela seorang Relawan Demokrasi Basis Warganet yang harus mendatangi sebuah keluarga dengan 7 (tujuh) orang wajib pilih dalam keluarga tersebut yang menetap di dalam kebun terletak di Desa Duminanga Kecamatan Helumo. Beliau harus menyeberangi sungai dengan arus yang deras dan melewati jalan berbukit dengan jarak tempuh perjalanan sekitar satu setengah jam guna untuk bersosialisasi secara langsung menyampaikan informasi terkait tahapan pemilihan serta pentingnya menyalurkan hak suara yang menjadi tanggung jawabnya. Hal yang sama juga dialami oleh Yandris Djibalu dan Fadli Launuha Relawan Demokrasi Basis Marjinal yang harus naik turun gunung, melewati jalan yang licin dan bahkan terjatuh saat menyeberangi sungai untuk bisa sampai pada basis tempat sosialisasi yang dituju.

Hal lucu pun banyak dialami oleh para Relawan Demokrasi. Salah satunya, yang dialami oleh Yandris Djibalu, yang saat turun bersosialisasi di masyarakat yang menjadi segmentasinya, masyarakat mengira yang datang adalah seorang anggota polisi sehingga langsung menutup rapat-rapat pintu rumah mereka karena rompi Relawan Demokrasi yang dikenakan ketika turun bersosialisasi saat itu. Hal yang sama dialami oleh Elfira Pakaya Relawan Demokrasi Basis Perempuan ketika melaksanakan sosialisasi, masyarakat takut mendekat karena menyangka sedang ada razia masker, dan pernah juga disangka sebagai petugas partai yang ingin berkampanye sehingga



tidak mendapat respon oleh masyarakat yang didatangi saat itu bahkan ketika menyampaikan salam pun, tidak mendapat respon dari masyarakat. Namun setelah menjelaskan hal yang sebenarnya, masyarakat mulai paham tentang apa yang menjadi tujuannya berkunjung.

Berkunjung ke masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah, dan pentingnya menyalurkan hak suara ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini secara langsung diakui oleh Rahmat Riyanto Abbas Relawan Demokrasi pada segmen warganet. Menurutnya, latar belakang aktif dalam organisasi kepemudaan lantas tidak menjadi jaminan baginya mampu menyampaikan informasi dengan baik, perlu pemahaman secara mendalam materi sosialisasi yang hendak disampaikan. Terlebih lagi, segmentasi yang menjadi sasarannya adalah warganet atau sering disebut sebagai kaum milenial, tokoh pemuda maupun tokoh masyarakat yang rata-rata berpendidikan tinggi memiliki jiwa kritis terhadap permasalahan-permasalahan utamanya terkait politik. Sehingga tentunya, harus siap menerima pikiran maupun pertanyaan kritis dari masyarakat yang menjadi segmentasinya.

Kegiatan sosialisasi yang dikemas dalam konsep Relawan Demokrasi bekerja secara kolektif dan tim dapat menjadi strategi yang mempermudah kegiatan sosialisasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rizki Hermanto Tontoli Relawan Demokrasi segmen disabilitas. Menurutnya, pembentukan tim menjadi salah satu cara yang efektif dalam memotivasi rekan kerja dalam sebuah tim, sehingga tetap bersemangat dan solid dalam mencari metode yang tepat bagaimana menyajikan dan mengemas informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat sehingga mudah diterima dan dipahami. Hal ini berguna untuk membangun komunikasi dan rasa peduli serta saling membantu



antara relawan yang satu dengan yang lain. Pentingnya strategi dalam menyampaikan sosialisasi, juga diyakini oleh Mayang Putri Yasin Relawan Demokrasi basis pemilih pemula hal ini diperlukan agar informasi yang disampaikan mudah diterima dan dipahami masyarakat yang menjadi target sosialisasi.



Kegiatan sosialisasi oleh Relawan Demokrasi segmen marjinal, menjangkau Masyarakat hingga ke tengah perkebunan,
Sumber Foto : Divisi Parmas KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Pentingnya turun memberikan sosialisasi dan pendidikan politik di masyarakat diyakini oleh Ibrahim Mohi Relawan Demokrasi segmen komunitas menjadi sangat penting untuk dilakukan, sebab menurut pengalamannya ketika turun dan mengajak masyarakat secara langsung untuk tidak golput, masyarakat setempat masih meyakini bahwa suara-suara mereka dalam pemilihan sangatlah mahal dan harus dibeli dengan uang atau dalam prakteknya populer dikenal sebagai *money politic*. Namun beliau tetap menjelaskan hal yang sebenarnya dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa praktek tersebut bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi masyarakat yang menerima suap untuk memilih salah satu calon.



Secara umum dapat disimpulkan bahwa adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing segmen saat sosialisasi yaitu sebagai berikut:

1. Terkendala oleh pemilihan gaya bahasa dan teknik yang digunakan saat sosialisasi agar mudah dipahami oleh target;
2. Terkendala dengan kondisi fisik dari target sehingga tidak terbiasa saat berinteraksi dan harus beradaptasi terlebih dahulu, dan juga tidak tersedianya alat peraga yang dapat mempermudah dan menunjang terlaksananya sosialisasi dengan efektif khususnya untuk segmen disabilitas.
3. Terkendala dengan waktu dan kondisi saat melakukan sosialisasi, karena sedang berada pada situasi pandemi, yang seharusnya dapat secara mudah dilakukan dengan mendatangi sekolah-sekolah, tempat para pemilih pemula berada. Namun karena situasi pandemi *Covid-19*, tidak berjalannya sekolah tatap muka. Sehingga para relawan harus mendatangi secara langsung segmentasi masyarakat yang dimaksud secara langsung, serta resiko terpapar *Covid-19* kapan saja bisa terjadi saat berinteraksi langsung dengan masyarakat.
4. Terkendala dalam menjangkau masyarakat dengan media sosial disebabkan oleh jaringan terlekomunikasi yang belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Terkendala dalam menjangkau masyarakat secara langsung melihat situasi geografis Kab. Bolaang mongondow Selatan yang cukup ekstrim di beberapa lokasi, yang mengharuskan kesiapan fisik para relawan saat hendak bersosialisasi.
6. Terkendala oleh penerimaan informasi oleh masyarakat yang menjadi target sosialisasi yang masih belum efektif disebabkan



ketidaktahuan maksud kedatangan para relawan sehingga cenderung mengabaikan apa yang disampaikan.

7. Terkendala oleh sebagian besar masyarakat yang masih mengalami krisis kepercayaan terhadap calon pemimpin.
8. Terkendala oleh kekhawatiran yang berlebihan dari masyarakat bahwa kegiatan Pemilihan, akan menghambat aktivitas mereka untuk mencari nafkah dan juga takut akan risiko terpapar oleh *Covid-19* saat menyalurkan hak pilihnya di bilik TPS.
9. Terkendala oleh pola pikir masyarakat yang sebagian besarnya belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya demokrasi.

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para Relawan Demokrasi menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi dalam menghadapi serangkaian persiapan menuju agenda perhelatan pesta demokrasi kedepannya. Pencapaian tingkat partisipasi yang menyentuh angka 93 persen menjadi keberhasilan dan kebanggaan tersendiri bagi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan para Relawan Demokrasi yang telah berjuang menyukseskan perhelatan demokrasi dengan meningkatnya angka partisipasi masyarakat.

Kesimpulan

Peran Relawan Demokrasi yaitu sebagai mitra KPU yang fungsinya untuk meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, dan membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilihan dan demokratisasi dan sebagai agen pendidikan pemilih fungsinya untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang pemilihan.

Program Relawan Demokrasi menjadi salah satu kunci keberhasilan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam



meningkatkan angka partisipasi masyarakat. Namun dibalik keberhasilan tersebut, berbagai persoalan dihadapi oleh para Relawan Demokrasi dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan tersebutlah yang dapat menjadi pembelajaran dan bahan evaluasi dalam menentukan strategi menyongsong penghelatan peserta demokrasi kedepannya.



INDAHNYA KERUKUNAN

Ada pengalaman yang paling berkesan bagi kami Basis Keagamaan saat melakukan Sosialisasi di beberapa rumah ibadah baik dari umat Muslim maupun warga Kristen yang sempat kami kunjungi.

Cerita itu bermula ketika saya Rahman, Ronaldo dan Mentari merencanakan untuk mengunjungi tempat ibadah di Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna. Ketika kami berangkat kira-kira sore hari menjelang malam maka tibalah kami di Mesjid Al-Taqwa Mala Pintu Kelurahan Santiago, disana sedang berkumpul beberapa bapak-bapak dan pemuda yang sedang mengadakan pengajian, dengan langkah pasti dan niat yang baik kami menunggu sampai pengajian itu selesai serta kami meminta waktu sejenak untuk menyampaikan hal-hal terkait kegiatan sosialisasi dan maksud kedatangan kami di masjid tersebut.

Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pengurus Masjid Al-Taqwa yang menerima kami untuk dating melakukan sosialisasi serta memeberikan waktu bagi kami untuk melaksanakan tugas kami sebagai Relawan Demokrasi Basis Keagamaan.

Tidak lupa juga kami memperkenalkan diri kami agar keakraban sebagai sesama manusia dapat terjalin dengan baik meskipun beberapa dari kami juga saling berbeda keyakinan namun kami sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan sesama orang Sangihe yang dari mulanya adalah saudara-bersaudara.

Percakapan demi percakapan terjalin antara kami Relawan Demokrasi dengan peserta pengajian juga pengurus Mesjid, banyak hal kami diskusikan dengan santai, sesekali dibarengi dengan canda tawa karena banyak hal kami bahas antara lain sejarah berdirinya tempat ibadah ini, kondisi umat muslim yang hidup berdampingan akrab



dengan umat agama yang lain, kami juga membahas mengenai perjalanan pemilihan, kegiatan yang dilakukan ditengah masa pandemic Covid-19 ini sangat membutuhkan perhatian dan kehati-hatian yang lebih memngingat ini adalah hal yang mustahil dilihat dengan mata manusia karena butuh pemeriksaan lebih mendalam. **“kita tidak tahu musuh kita dimana, pada siapa dan berapa banyak jumlahnya”** ucap salah satu peserta pengajian. Saat itu kami larut dalam percakapan yang ditemani dengan beberpa kudapan disediakan oleh pengurus masjid.

Dari percakapan kami maka dapat saya simpulkan bahwa kebersamaan dan rasa persaudaraan yang rukun adalah kunci untuk dapat menciptakan kekuatan dalam rangka membangun daerah serta mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 karena ketika ada kebersamaan yang rukun dan saling toleransi maka banyak hal dapat diwujudkan.

Beberapa hari berikutnya kami mengunjungi rumah ibadah umat Kristen yaitu Gereja di daerah Kolongan Kecamatan Tahuna Barat. Salah satu Gereja yang kami kunjungi untuk mengadakan kegiatan sosialisasi sedang dalam proses rehabilitasi atau perbaikan atap karena bagian atap dinilai sudah tidak layak lagi dan berpeluang akan rusak dan jatuh menimpa jemaat yang sedang melaksanakan ibadah. Kami sungguh bahagia karena saat kami mengunjungi tempat itu banyak umat yang sedang hadir beribadah tapi tetap memperhatikan protocol kesehatan yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak sebagaimana telah diatur oleh Tim Satgas Covid-19 Gereja tersebut .

Kebahagiaan kami tidak lain karena dengan banyaknya orang tersebut otomatis informasi yang akan kami sampaikan akan diketahui oleh banyak orang sekaligus dalam waktu bersamaan.



Dari pihak pengurus gereja menerangkan kepada kami bahwa walaupun kegiatan peribadatan dihadiri oleh banyak orang tapi tetap menerapkan dan mengutamakan protocol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Biasanya sebelum bencana pandemi terjadi jemaat gereja yang terkumpul lebih banyak dari saat ini karena belum mengenal pembatasan kehadiran dalam suatu tempat. Dalam perbincangan kami banyak hal yang baik kami dapati, hal baik itu antara lain pihak pemuka agama akan tetap menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif guna menyukseskan pelaksanaan pemilihan dan tetap menyuarakan penerapan protocol kesehatan ketika mengikuti kampanye yang akan digelar oleh pasangan calon.



Foto Sosialisasi di Mesjid



Foto Sosialisasi di Gereja

Marginal dan Terpinggirkan

Saya sangat kagum dengan alam nusantara ciptaan tangan Tuhan Yang Maha Kuasa terlebih lagi di daerah kami Kepulauan Sangihe. Alam yang sebagian besar masih asri dibalut dengan pegunungan indah sambal ditemani laut dan pantai yang luar biasa indah. Bagi siapapun yang sudah pernah berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Sangihe pastilah sudah mengetahui betapa indahnya dan uniknya alam ciptaan ini. Karena karakteristik daerah kami adalah wilayah kepulauan maka



tidak mengherankan sebagian besar mata pencaharian penduduk daerah ini adalah nelayan yang bergantung pada hasil laut.

Banyak jenis hasil laut yang terdapat didaerah kami seperti berbagai jenis ikan baik yang didapat secara alami maupun yang telah dibudi dayakan, terumbu karang dan juga hasil laut lainnya. Rata-rata masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sector kelautan bermukim di daerah-daerah pesisir seperti Salurang, Petta, Kendahe, Lapango dan juga daerah pesisir lainnya.

Perjalanan yang sangat sulit telah kami tempuh demi melaksanakan amanat bangsa dan negara yaitu Sosialisasi pada masyarakat segmen marginal dan terpinggirkan yang kadang kurang tersentuh oleh informasi-informasi resmi langsung kehadapan mereka.

Perjalanan yang berliku dan naik turun gunung harus kami lalui. Umumnya transportasi yang kami gunakan untuk mobilisasi kami adalah kendaraan roda dua yaitu motor. Kami menyusuri kampung-kampung pesisir dan mencari masyarakat yang sedang menunggu keluarga mereka pulang dari mencari ikan dilaut. Dengan penuh hormat dan hati-hati serta pendekatan secara kekeluargaan kami mencoba menyampaikan maksud serta materi sosialisasi kami, tapi metode yang kami gunakan adalah bercerita, bercengkrama walaupun singkat tapi langsung menyentuh ke maksud materi, tidak lupa juga kami selipkan Bahasa daerah agar supaya antusias dari pendengar tetap terjaga. Kenyataan yang kami temui masyarakat disana memiliki latar belakang pendidikan yang kurang tinggi menyebabkan mereka kurang dapat menyerap dengan baik perkembangan yang terjadi sehingga focus mereka hanyalah mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Akses jalan, jaringan internet merupakan beberapa kendala yang juga membatasi masyarakat di segmen ini untuk mengembangkan diri mereka, **“Inilah pekerjaan kami,**



sehari-harinya kami hanya melaut” tutur salah satu bapak dan ibu yang kami temui sambil kami melanjutkan perjalanan kami ketempat lain dengan berjalan kaki menyusuri pasir tepi pantai.

Mendengar kata ‘Waria/bencong atau transpuan” pasti akan membawa kita pada kesan yang kurang menyenangkan. Kelompok mereka sering disepelekan dan sering tidak dianggap dalam masyarakat. Bahkan beberapa dari mereka tidak jarang mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari masyarakat.

Kelompok kecil masyarakat ini memiliki pekerjaan sebagai penata rias ataupun tukang potong rambut wanita. Bagaimanapun bentuk dan rupa mereka, mereka juga adalah masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 ini.

Kami Relawan Demokrasi Basis Marginal tetap melakukan sosialisasi kepada mereka dengan cara dating langsung ke tempat dimana mereka sehari-hari bekerja yaitu salon. Dengan semangat yang sama kami mendekati mereka, kami meminta waktu dan memperkenalkan diri kami setelah mendapat kesempatan dan waktu kami mensosialisasikan apa yang menjadi materi kami dengan menitik beratkan pada masalah Hak dan kewajiban sebagai wajib pilih.

Kami mengajak mereka untuk mengecek ke kelurahan dimana mereka tinggal agar mengetahui apakah mereka terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta dimana mereka harus menggunakan hak suara mereka. Kami dalam melaksanakan sosialisasi kepada mereka tidak membeda-bedakan serta tidak bersikap diskriminatif agar mereka merasa dihargai dan diterima di masyarakat, **“kalau ada kesempatan sebelum atau sepulang kerja kami akan cek nama kami kalau terdaftar”** tutur Bunga kepada kami dengan nada yang gemulai.



Foto. Beberapa Transpuan dan Salon dikunjungi

Daerah pesisir dan lorong kami kunjungi

Pelajaran berharga yang kami dapati dalam kegiatan ini selama 3 (tiga) bulan kami turun ke berbagai pelosok dan berbagai segmen adalah daerah kami sangat beragam dan majemuk masyarakatnya, kebersamaan dan saling menghargai merupakan factor utama dalam menyukseskan Pemilihan ini. Pengalaman yang kami temui kami simpan dalam ingatan kami, kami juga bagikan kepada teman-teman sesame relawan, keluarga kami dan juga beberapa kami abadikan



dalam foto untuk disimpan sebagai kenangan yang sulit kami lupakan selama kami bertugas.

Menjadi Relawan Demokrasi 2020 adalah pengalaman berkesan dan sulit kami lupakan karena dengan kami menjadi relawan kami banyak mngetahui, menemui, menjumpai masyarakat dengan berbagai aktifitas, kebutuhan, kesusahan, keunikan mereka masing-masing.

“Bangga telah menjadi Relawan Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 serta bangga pernah menjadi bagian dari keluarga besar KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe” ucap Steven, Rahman, Lady, Tiara, Tian, Aldo dan Relasiers lain kepada kami staf Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sempat berbincang-bincang dengan beberapa dari mereka.

Kami juga sebagai pegawai dan Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat bangga dan puas dengan kinerja mereka selama tiga bulan.



Relasier Dalam Kamera







DAFTAR PUSTAKA

Bagian Bina Partisipasi Masyarakat Biro Teknis dan Hupmas, *Pedoman Pendidikan Pemilih*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta, 2015.

Keppres Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor:210/PL.02.6-Kpt/71/Prov/XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 413/PL.02.6-Kpt/7111/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Modul Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak*. 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/ref-leksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>.

<https://pilkada2020.kpu.go.id/>

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Modul Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak*. 2019.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota*. KPU-RI: Jakarta.

Mohammad Molyadi. *Membangun Demokrasi dengan Partisipasi Masyarakat dalam Memilih pada Pemilu 2019*. Jurnal Info Singkat Kajian Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol.XI, No.09/I/Puslit/Mei/2019. 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Sumber Lain:

Mashuri, Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur di Provinsi Riau, 2013, Jurnal Menara Vol 12 No.2 Juli-Desember, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/220382-partisipasi-masyarakat-pada-pemilihan-gu.pdf> pada tanggal 17 Maret 2021.

Keputusan KPU Bonsel Nomor 119/PP.06.2-Kpt/7111/Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Ratna Sari Dewi. *Ombudsman dan Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019*. 2019. diakses dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-dan-pengawasan-pemilihan-umum-pemilu-2019>.

Surat KPU RI Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;

SOSIALISASI

PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020 DI SULAWESI UTARA

Kegiatan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah merupakan salah satu komponen pembangunan politik dalam mewujudkan Indonesiaberdaulat berdasarkan demokrasi. Pembangunan itu akan berhasil jika adanyadukungan dan partisipasi masyarakat. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu tolak ukurkesuksesan pelaksanaanpembangunan, mengingat dengan adanya partisipasi masyarakat dalampembangunan akan menempatkan status masyarakat yang bukan hanyasasaranpembangunan tetapi juga merupakan subyek dalam proses modernisasi dan perubahan yang dikehendaki oleh pembangunan itu sendiri

Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas,
Wenang, Mahakeret Timur, Kec. Wenang,
Kota Manado, Sulawesi Utara 95112



@kpusulut



KPU Provinsi Sulawesi Utara



www.kpu.go.id



KPU Sulawesi Utara



@KPU SULUT

ISBN 978-623-6183-29-8



9

786236

183298